

QUO VADIS INOVASI PEMBANGUNAN DESA
(Studi di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten
Lamongan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

BAHRUL ALAM
155030100111021



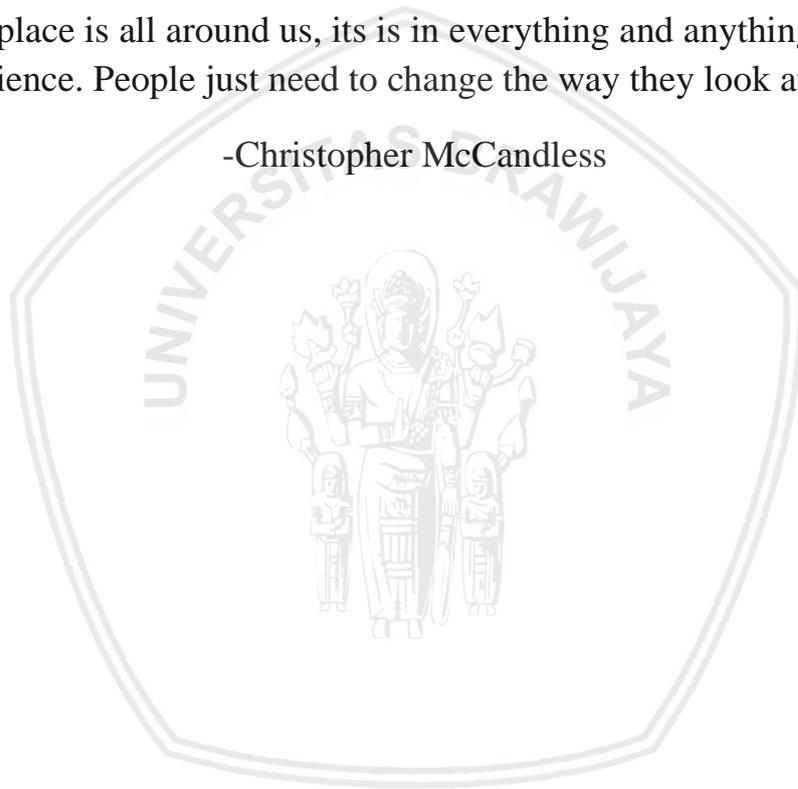
Dosen Pembimbing
Dr.rer.pol., Romy Hermawan, S.sos, M.AP
Drs. Abdul Wachid, M.AP

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2019

MOTTO

God's place is all around us, its is in everything and anything we can experience. People just need to change the way they look at things.

-Christopher McCandless



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Glagah,
Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan)

Disusun oleh : Bahrul Alam

NIM : 155030100111021

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, 17 Juni 2019

Ketua Komisi Pembimbing,

Anggota Komisi Pembimbing,



Dr. rer. pol., Romy Hermawan., S.sos., M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 Juli 2019

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas nama: Bahrul Alam

Judul : *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing

Dr. Rer. Pol., Romy Hermawan, S.sos., M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

Dosen Penguji I

Dr. Siti Rochmah, Msi
NIP. 19570313 198601 2 001

Anggota Komisi Pembimbing

Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209 198703 1 008

Dosen Penguji II

Nurjati Widodo, S.AP., M.AP
NIP. 201201 830129 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 20 dan Pasal 25 ayat 2).

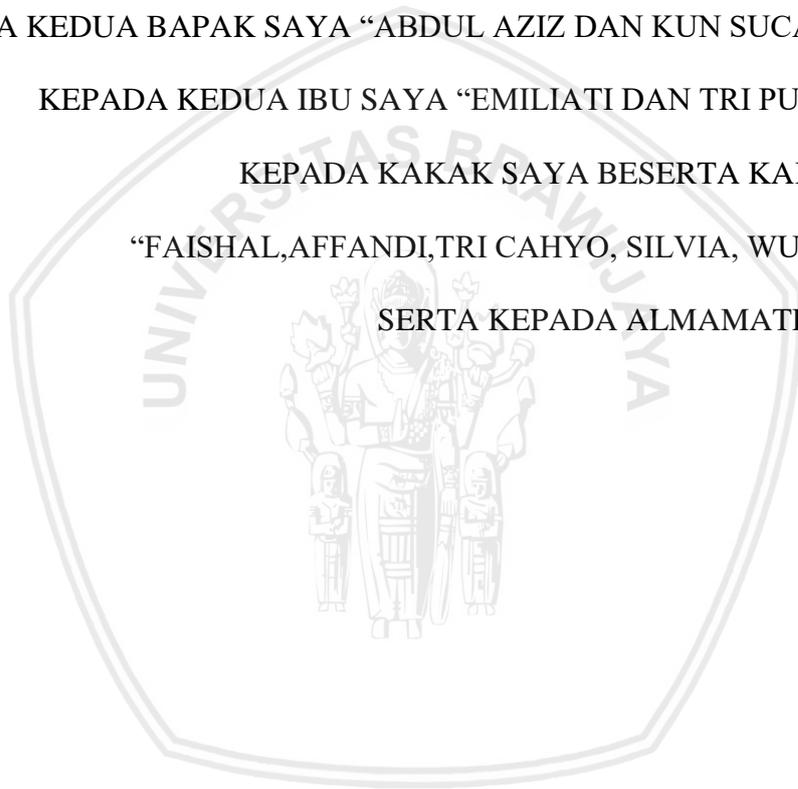
Malang, 26 Juni 2019



Bahrul Alam
NIM. 155030100111021

LEMBAR PERSEMBAHAN

SAYA PERSEMBAHKAN KARYA INI
KEPADA KEDUA BAPAK SAYA “ABDUL AZIZ DAN KUN SUCAHYONO”
KEPADA KEDUA IBU SAYA “EMILIATI DAN TRI PUJI ASTUTI
KEPADA KAKAK SAYA BESERTA KAKAK IPAR
“FAISHAL,AFFANDI,TRI CAHYO, SILVIA, WULANDARI
SERTA KEPADA ALMAMATER FIA UB



RINGKASAN

Bahrul Alam, 2019. *Quo Vadis Inovasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan)*, Dr.rer.pol., Romy Hermawa, M.A., Drs. Abdul Wachid, M.AP, 150 Hal + xii

Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan merupakan sebuah desa mandiri yang ada di Indonesia. Setiap desa di Indonesia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tipologi inovasi dari *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dilakukan untuk dapat mengoptimalkan pembangunan desa dalam proses inovasi dan pembangunan, supaya pembangunan desa bisa membuat suatu pembaruan dalam meningkatkan kualitas pembagunan dan menjadi tepat sasaran karena proses inovasi merupakan perencanaan awal dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Glagah telah melakukan *Quo vadis* inovasi pembangunan desa, yang dilakukan secara bertahap dari musyawarah dusun dan tahap forum musyawarah desa. *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa yang dilaksanakan di Desa Glagah juga mendapatkan hambatan berupa tingkat kesadaran masyarakat yang kurang akan adanya pembangunan dan masalah dana yang dimiliki desa tidak mencukupi kebutuhan.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian antara lain, pertama pemerintah desa sebaiknya membuat kegiatan pemberdayaan/pembinaan yang berfokus pada pengelolaan potensi lokal dan benar-benar dapat memberikan bekal kepada masyarakat dalam meningkatkan roda perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi lokal. Kedua, pemerintah desa diharapkan berfokus membangun sarana infrastruktur untuk menunjang pengembangan pada potensi yang dimiliki.

Kata Kunci : Quo Vadis Inovasi, Pembangunan Desa

SUMMARY

Bahrul Alam, 2019. **Quo Vadis Village Development Innovations (Study in Glagah Village, Glagah District, Lamongan Regency)**, Dr.rer.pol., Romy Hermawa, M.A., Drs. Abdul Wachid, M.AP, 150 things + xii

Glagah Village, Glagah District, Lamongan Regency is an independent village in Indonesia. Every village in Indonesia carries out its rights and obligations in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning villages. Organizing. Village Government, Village Development Implementation, Village Community Development, and Village Community Empowerment. This study aims to describe the typology of innovation from Quo Vadis Village Development Innovation in Glagah Village, and to find out the supporting and inhibiting factors to be able to optimize village development in the process of innovation and development, so that village development can make an update to improve the quality of development and become right on target because the innovation process is the initial planning in implementing village development.

The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through interviews, documentation, and observation. The analysis in this study was carried out through the analysis methods of Miles, Huberman and Saldana.

The results showed that Glagah Village had carried out Quo Vadis on village development innovations, which were carried out in stages from hamlet meetings and village discussion forums. Quo Vadis Village Development Innovation carried out in Glagah Village also found obstacles in the form of a level of awareness of the people who lacked development and the problem of funds owned by the village was insufficient.

Suggestions that can be given in the study include, first, the village government should make empowerment / fostering activities that focus on managing local potential and can truly provide provision to the community in increasing the wheels of the village economy by optimizing local potential. Second, the village government is expected to focus on building infrastructure facilities to support the development of their potential.

Keywords: Quo Vadis Innovation, Village Development

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“*Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., MS selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya sekaligus selaku

5. Bapak Dr.rer.pol., Romy Hermawan, MA selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan ikhlas agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil yang terbaik.
6. Bapak Drs. Abdul Wachid, M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan ikhlas agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan hasil yang terbaik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas segala bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
9. Seluruh Staff Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang yang telah memberikan bantuan dalam pengurusan izin penelitian.
10. Bapak Kohar selaku Kepala Desa Glagah yang telah memberikan izin dan telah membantu berjalannya penelitian dengan sangat baik.
11. Bapak Khairul Hadi selaku masyarakat Desa Glagah yang telah memberikan waktunya dan telah membantu berjalannya penelitian dengan sangat baik.
12. Bapak Said selaku kepala lembaga bidang ekonomi masyarakat desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang telah memberikan waktunya dan telah membantu berjalannya penelitian.
13. Seluruh Perangkat Desa Glagah yang telah membantu peneliti di dalam mengumpulkan data penelitian.

14. Seluruh Masyarakat Desa Glagah yang telah membantu peneliti di dalam mengumpulkan data penelitian.
15. Teman-teman “Konfrensi Meja Griya Shanta” Satria, Fadil, Topel, Glenn, Farid, Iqbal, Abdillah, Hanip dan Galang.
16. Teman-teman Fia Futsal Team “FFT”, terutama angkatan 2015, “Raka, Rizkian, Redo, Ricko, Ambon.
17. Teman-teman perantauan dari Lamongan dan Bojonegoro
18. Teman-teman Crew Lepas Suntuk
19. Sobat Intisari “Ijul, Theo, Sinung”
20. Teman-teman SMA saya “Bayu, Naufal, Andik, Tegar, Dimas, Isom, Ozik, Jemblong dll
21. Teman-teman yang pernah tinggal satu kontrakan dengan saya

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 26 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kontribusi Penelitian	9
1. Kontribusi Akademis	9
2. Kontribusi Praktis	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian <i>Quo Vadis</i>	13
B. Pembangunan	14
1. Definisi Pembangunan.....	14
2. Konsep Pembangunan.....	16
3. Nilai dan Tujuan Pembangunan	17
4. Model Pembangunan.....	20
C. Desa.....	22
1. Pengertian Desa.....	22
2. Komponen Desa	24



3.	Pemerintahan Desa	26
D.	Pembangunan Desa	30
1.	Otonomi Desa	30
2.	Definisi Pembangunan Desa	32
E.	Inovasi.....	34
1.	Definisi Inovasi.....	34
2.	Tipologi Inovasi.....	35
3.	Proses Inovasi.....	36
4.	Ciri Inovasi	38
5.	Level Inovasi.....	39
6.	Kategori Inovasi.....	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
A.	Jenis Penelitian	42
B.	Fokus Penelitian	43
C.	Lokasi dan Situs Penelitian	44
D.	Jenis dan Sumber Data	45
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	47
F.	Instrumen Penelitian.....	48
G.	Analisis Data	49
H.	Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		53
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1.	Gambaran Umum Kabupaten Lamongan	53
2.	Gambaran Umum Desa Glagah	58
B.	Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	69
1.	<i>Quo Vadis</i> Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.....	69
2.	Faktor Pendukung dan Penghambat dari <i>Quo Vadis</i> Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah.....	95
C.	Analisis Data Penelitian	100
1.	<i>Quo Vadis</i> Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.....	100



2. Faktor Pendukung dan Penghambat <i>Quo Vadis</i> Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah.....	121
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
1. <i>Quo Vadis</i> Inovasi Pembangunan Desa studi di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan	127
2. Faktor Pendukung dan Penghambat <i>Quo Vadis</i> Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah	131
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	135



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan55
 Tabel 2 Pendidikan masyarakat Desa Glagah62
 Tabel 3 Mata Pencaharian dan Jumlahnya64
 Tabel 4 Nama-nama Perangkat Desa Glagah68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Tahun 2017	6
Gambar 2 Struktur Pemerintahan Desa tahun 2001	29
Gambar 3 Tipologi Inovasi Sektor Publik	36
Gambar 4 Analisis Data Model Interaktif	50
Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Lamongan 2016	54
Gambar 6 Peta Desa Glagah tahun 2016	59
Gambar 7 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Glagah.....	67
Gambar 8 Kantor Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan	138
Gambar 9 Realisasi Kerja Desa Glagah	139
Gambar 10 Kegiatan Posyandu	140
Gambar 11 Wawancara dengan Kepala Desa Glagah.....	140
Gambar 12 Wawancara dengan Pak Said selaku Ketua bidang lembaga ekonomi masyarakat desa Dinas Pemberdayaan dan Desa	141
Gambar 13 Wawancara dengan Pak Khairul selaku masyarakat Desa Glagah ...	141
Gambar 14 Petani Tambak memanen hasil tambak	142
Gambar 15 Kegiatan Posyandu Desa Glagah	142
Gambar 16 Membangun jalan dari program Desa Glagah	143
Gambar 17 Kios Pertokoan Desa Glagah.....	144
Gambar 18 Jalan Rabat Beton.....	144
Gambar 19 Kantor Bumdes Glagah	145
Gambar 20 Program Kampong KB.....	145
Gambar 21 Anak Sungai Bengawan Solo.....	146
Gambar 22 Akses jalan menuju salah satu area persawahan	146
Gambar 23 Tempat pengolahan sampah di Desa Glagah	147
Gambar 24 Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Glagah	147
Gambar 25 Tempat Pelayanan Desa Glagah.....	148



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Observasi Lapangan	138
Lampiran 2 Surat Riset Penelitian.....	149
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	153



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi (Budiman, 1995:1). Dalam aspek pembangunan, masyarakat akan mengalami tahap *outcome* atau hasil, baik yang diinginkan ataupun tidak diinginkan. Maka dalam pembangunan membutuhkan adanya suatu pola pembangunan, dimana pola pembangunan tersebut menghasilkan perubahan untuk masyarakat. Dimana dasar pembangunan yang telah direncanakan tersebut tidak lain untuk kebutuhan masyarakat itu sendiri. Sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan, dibutuhkan suatu inovasi sebagai kumpulan alternatif dari gagasan, ide maupun strategi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Inovasi adalah salah satu aspek yang penting dalam proses pembangunan. Inovasi bertujuan untuk memberi suatu pembaharuan pada pembangunan. Inovasi didalam suatu pembangunan juga harus mengarah pada tujuan yang akan dicapai, agar nanti dalam pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi juga dapat mengatasi permasalahan dalam pembangunan dan membuat pembaharuan dari permasalahan yang dihadapi. Menurut Muluk (2008:44) Inti dari inovasi ialah perubahan menuju hal-hal baru.

Desa merupakan objek dari pembangunan, maka dari itu desa memerlukan adanya suatu inovasi dalam melakukan pembangunan. Agar dalam proses pelaksanaan pembangunan pemerintah desa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki desa dan melakukan perbaikan pembangunan desa. Dengan adanya inovasi terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dana untuk pembangunan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap desa memiliki alokasi anggaran dana untuk kepentingan pembangunan desa, yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Inovasi disini yang nantinya akan menjadi suatu alternatif untuk menjadikan sumber dana desa menjadi lebih produktif dalam penggunaannya, sumber dana desa tersebut berasal dari bantuan dana desa, alokasi dana desa dll. Sumber dana yang didapat desa digunakan pemerintah dalam mengembangkan program untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa. Dengan begitu, arah dari pembangunan desa dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa. Akan tetapi dalam merealisasikannya perlu adanya suatu perencanaan atau sebuah program yang inovatif dan diterapkan di desa tersebut.

Pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola desa itu sendiri berdasarkan pengembangan apa yang ingin dilakukan. Hal tersebut termaktub dalam pengertian desa menurut Zakaria (dalam Nurman, 2015:227) yang menyatakan desa ialah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Teori

tersebut menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum kuat, serta memiliki suatu kelembagaan pemerintahan yang berwenang dalam mengelola wilayah perdesaan berdasarkan peraturan desa yang ditetapkan untuk diproses lebih lanjut lagi dan menentukan kemana arah dari pembangunan desa tersebut. Masyarakat desa yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya tersebut juga diperkuat dalam Undang-Undang No.6 tentang desa tahun 2014 Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pengembangan pembangunan desa akan selalu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas dari masyarakat desa itu sendiri dan pembangunan akan menyesuaikan perkembangan yang terjadi di ruang lingkup desa. Pengembangan yang dimaksud ialah dengan adanya kegiatan pembangunan, baik pembangunan masyarakat desa ataupun pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa, maka nantinya hasil kegiatan dari desa itu akan bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut ataupun masyarakat lainnya. Pembangunan desa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No.6 tentang Desa tahun 2014 Pasal 1 ayat (8) merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang yang berlaku, maka proses penyelenggaraan pembangunan bisa berjalan sesuai dengan kewenangan desa tersebut berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan.

Pemerintah Desa dalam melakukan pembangunan, telah memberikan kewenangan otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-undang No.23 tahun 2014 pasal 1 ayat (12) bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, pelaksanaan otonomi daerah akan mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang mana dalam pelaksanaannya merupakan suatu harapan bagi pembangunan daerah, mengelola daerah, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam penerapan pembangunan, desa sudah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan tujuan dari pemerintahan desa itu sendiri dan termaktub dalam UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014 Pasal 2 yang menyebutkan “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika” yang dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi desa menjadi mandiri dan otonom. Otonom pemerintahan desa ialah desa memiliki kewenangan dalam mengelola sumber dayanya dan juga dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, dan dapat mengatur urusan pemerintahan desa.

Penyelenggaraan otonomi desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, menurut Nurman (2015:255) dijelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Maka dari itu, pemerintah desa harus melakukan pembangunan melalui program pemerintah desa yang sesuai dengan keadaan kondisi desa tersebut. Adanya pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan perubahan pada desa. Dengan adanya penyelenggaraan pembangunan dapat mewujudkan pembangunan menuju kemandirian desa melalui pengelolaan aset sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Setiap kawasan perdesaan memiliki potensi sumber daya yang beragam disertai dengan topografi yang berbeda-beda, dengan kewenangan yang dimiliki desa, akan lebih mudah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga dapat membantu desa yang masih berada dalam ketertinggalan.

Berdasarkan pemaparan pengertian inovasi pembangunan desa tersebut maka suatu inovasi juga diperlukan di Desa Glagah, dimana Desa Glagah ialah desa yang berkembang dan memiliki lahan persawahan sebagai potensi lokal. Lahan persawahan di Desa Glagah dinamakan pertanian tambak, karena memiliki ciri khas yaitu lahan persawahan di daerah ini dapat ditanami padi dan juga dapat digunakan untuk budidaya ikan atau udang dengan satu petak lahan secara bergantian mengikuti musim panen. Tidak hanya di Desa Glagah, namun juga terdapat di desa-desa se Kecamatan Glagah. Di Desa Glagah juga dilintasi Anak Sungai Bengawan Solo sebagai saluran irigasi dan sungai-sungai kecil yang mengalir di area persawahan.

Desa/Kelurahan	Lahan Pertanian		Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kentong	172,50		2,50	
2 Wengen	202,00		2,00	
3 Bangkok	158,00		2,00	160,00
4 Meluntur	133,50		0,50	134,00
5 Dukuhtunggal	323,50		7,00	330,50
6 Bapuhbandun	153,00		3,00	156,00
7 Tanggungpriat	146,00		1,00	147,00
8 Sudangan	132,00		2,00	134,00
9 Karangagung	114,00		2,00	116,00
10 Duduklor	147,00		1,00	148,00
11 Medang	139,00		2,00	141,00
12 Mendago	134,50		1,50	136,00
13 Began	68,00		2,00	70,00
14 Menganti	224,00		3,50	227,50
15 Rayungsumuk	174,00		3,00	177,00
16 Gempolpendo	98,50		3,50	104,00
17 Soko	134,00		2,00	136,00
18 Morocelan	96,00		2,50	98,50
19 Pasi	171,00		3,00	176,00
20 Margoanyar	180,50		3,00	183,50
21 Glagah	201,00		2,00	203,00
22 Bapuhbaru	163,50		1,00	164,50
23 Jatirengo	206,50		15,00	221,50
24 Konang	77,50		2,00	79,50
25 Wonorejo	109,50		2,00	111,50
26 Panggang	142,50		3,50	146,00
27 Wedoro	101,50		1,00	102,50
28 Karangturi	172,50		2,50	175,00
29 Meluwur	127,00		1,00	128,00
jumlah	4.403		85,00	4.487,50

Gambar 1 : Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Tahun 2017

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen BPS Kecamatan Glagah) 2019

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa desa-desa di Kecamatan Glagah sebagian besar luas lahannya adalah area persawahan. Luas wilayah di Kecamatan Glagah dalam data statistik pada gambar 1, bisa disimpulkan bahwa hampir 75% luas wilayah ialah lahan persawahan, tidak terkecuali di Desa Glagah. Oleh karena itu, Desa Glagah sebagai pusat administrasi dari Kecamatan Glagah, harusnya dapat menjadi tolak ukur dari pengembangan potensi lokal yaitu pertanian tambak. Jika pengembangan dalam pembangunan infrastruktur yang menunjang potensi pertanian tambak ataupun kegiatan pada pemberdayaan masyarakat terhadap

pengelolaan hasil pertanian tambak tidak dioptimalkan dan tidak terkoordinir dengan baik, maka sangat disayangkan potensi yang dimiliki tidak mengalami kemajuan dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Pembangunan saat ini dalam mengoptimalkan potensi lokal di Desa Glagah belum sepenuhnya terwujud dikarenakan pembangunan di Desa Glagah masih belum berfokus untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki oleh desa tersebut. Pembangunan di Desa Glagah saat ini mengarah pada pembangunan perbaikan infrastruktur secara umum di dusun-dusun yang ada Desa Glagah. Contohnya seperti pembangunan saluran selokan, jalan rabat beton, jembatan penghubung RT/RW dsb. Sedangkan pemberdayaan masyarakat di Desa Glagah hanya mencakup pada pemberdayaan secara umum, seperti adanya kegiatan posyandu, kegiatan pengelolaan sampah dsb. Arah dari kegiatan pembangunan fisik belum sepenuhnya berfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dalam meningkatkan infrastruktur pertanian tambak, sedangkan kegiatan dari pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya berfokus pada pengelolaan potensi lokal yang dimiliki oleh desa. Hal ini juga berpengaruh pada faktor pendukung dan penghambat dari pembangunan di Desa Glagah.

Pembangunan di Desa Glagah saat ini mengarah pada pembangunan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa beserta pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Maka dari itu peran *quo vadis* dalam inovasi pembangunan Desa Glagah ialah mengetahui pembangunan yang sedang berlangsung beserta inovasi yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Glagah. Dengan adanya pemerintah desa berinovasi diharapkan pembangunan mengarah

pada pengelolaan potensi lokal. Misalkan dengan melakukan pembangunan berupa bendungan, penataan saluran irigasi, tempat pelelangan ikan hasil panen, yang nantinya akan menjadi pusat dari kegiatan pertambakan. Sedangkan dalam pemberdayaan diharapkan adanya kegiatan usaha bersama untuk mengelola hasil dari pertanian tambak yang mana akan menciptakan peluang dalam meningkatkan roda perekonomian. Dengan adanya inovasi ini bertujuan untuk mencari suatu pembaharuan terhadap pembangunan dalam membantu mengelola pertambakan yang sebelumnya belum ada ataupun ada dan dikembangkan lagi. Dengan begitu dalam mengelola potensi yang dimiliki Desa Glagah, pemerintah desa dapat melakukan pengembangan suatu inovasi dengan segala usaha yang akan dilakukan dalam pembangunan di Desa Glagah. Sehingga nantinya diharapkan Desa Glagah menjadi pusat pertambakan di Kabupaten Lamongan atau menjadikan Desa Glagah sebagai desa minapolitan (pengembangan kawasan dengan konsep yang menitik beratkan pada kemajuan sektor perikanan), dengan begitu akan menjadi awal dari pertumbuhan perekonomian desa di Kecamatan Glagah.

Mencakup latar belakang diatas, maka peneliti berminat untuk meneliti bagaimana arah dari suatu Inovasi untuk Pembangunan yang akan dilakukan di desa Glagah. Untuk itu peneliti mengangkatnya dalam penelitian yang berjudul **“Quo Vadis Inovasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Quo Vadis* Inovasi dalam Pembangunan Desa di Desa Glagah Kabupaten Lamongan?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan di Desa Glagah Kabupaten Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis tentang Quo vadis Inovasi dalam Pembangunan Desa di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.
2. Untuk Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan Desa di Desa Glagah Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.

D. Kontribusi Penelitian

Setiap penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis. Adapun kontribusi penelitian sebagai berikut :

1. Kontribusi Akademis

Hasil Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Publik, khususnya dengan topik sejenis.

2. Kontribusi Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu upaya dalam rangka menerapkan kaidah teori dalam perannya serta sebagai pembanding teori dan praktek di lapangan sesuai disiplin ilmu yang telah dipelajari.

b. Publik atau Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi sebuah informasi yang berguna bagi masyarakat luas atau publik, untuk dapat menganalisis sesuatu yang baru tentang inovasi pembangunan desa, khususnya di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.

c. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah dapat menjadi suatu upaya dan informasi yang bermanfaat dalam menerapkan kaidah teori yang ada dalam penerapannya, dan sebagai masukan atau pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan literasi bagi peneliti dan juga bagi pembaca dalam pengembangan ilmu. Selain itu juga bisa menambah wawasan tentang Quo Vadis Inovasi dalam Pembangunan Desa.

2. Manfaat *Novelty*

Peneliti diharapkan dapat membuat sesuatu yang baru dan hasil penelitian dapat membantu serta memberi masukan kepada Pemerintah dan Masyarakat Desa beserta pihak-pihak terkait dalam mengembangkan Inovasi untuk Pembangunan

Desa agar menjadi lebih baik lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di Desa maupun di daerah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari lima sub bab. Pertama, diawali dengan latar belakang. Kedua dilanjutkan dengan rumusan masalah yang diambil. Ketiga, tentang tujuan dari penelitian ini. Keempat tentang kontribusi penelitian. Kelima yaitu menguraikan tentang sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka, mencakup tentang teori dari berbagai literatur yang berkaitan dan mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari teori, konsep maupun pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di bidangnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian berisikan tentang rancangan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, mencakup materi yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, analisis data, keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus yang telah peneliti tentukan dan dalam bab ini terdapat Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Penyajian Data dan Fokus Penelitian yang meliputi Inovasi Pembangunan Desa. Dan dalam bab ini juga Analisis Data yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh terhadap teori yang telah ditentukan oleh peneliti dan sudah dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah peneliti lakukan dan dalam bab ini juga terdapat juga saran yang fungsinya adalah untuk memberikan masukan terhadap instansi yang telah diteliti oleh peneliti supaya dapat membangun atau mengembangkan dan juga memperbaiki apa yang perlu diperbaiki.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian *Quo Vadis*

Quo vadis sendiri sebenarnya berasal dari bahasa *Classical Latin* yaitu, k^wo: wa:dis, dan *Ecclesiastical Latin* k^wo: vadi:s adalah sebuah kalimat dalam bahasa latin yang diterjemahkan secara harfiah berarti: “Ke mana engkau pergi?” (Pratiwi, 2015:2). Jika dihubungkan dengan Inovasi Pembangunan Desa, *Quo Vadis* memiliki arti yaitu, “Mau dibawah kemana Inovasi dalam Pembangunan Desa? atau bisa diperjelas menjadi “kemana arah perkembangan Inovasi dari Pembangunan Desa?”.

Quo vadis memiliki peran dalam menentukan arah dari suatu inovasi pembangunan desa. Inovasi memunculkan suatu ide yang mana akan membawa suatu perubahan baru di dalam ruang lingkup tersebut. Pembangunan membuat suatu perubahan tersebut menjadi nyata, yang mana hasil dari pembangunan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat yang berpartisipasi didalamnya. Oleh karena itu, *quo vadis* dari inovasi pembangunan desa itu harus jelas, inovasi apa yang akan dimunculkan dengan keadaan lingkungan sekitar dan tahapan-tahapan dalam merealisasikannya..

Jadi suatu inovasi benar-benar akan tercipta dan diwujudkan melalui rencana dari pembangunan yang akan dilakukan. Sehingga *Quo vadis* menjadi instrument penting dalam pembangunan desa, karena pembangunan haruslah

memiliki arah dan tujuan yang mana akan memiliki pengaruh pada ruang lingkup di desa tersebut.

B. Pembangunan

1. Definisi Pembangunan

Definisi dalam pembangunan terdapat banyak kajian untuk menjabarkannya, menjadikan sebuah teori dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketertinggalan yang teori tersebut sangat amat luas dan mengikuti perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, teorinya selalu dinamis dan responsif, teorinya relevan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Meskipun teori tentang pembangunan amatlah luas, setidaknya menggunakan teori yang relevan terhadap satu permasalahan. Berikut ini definisi teori pembangunan.

Teori pembangunan adalah teori yang berhubungan dengan masalah-masalah pembangunan, yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang terjadi disuatu masyarakat atau suatu daerah atau suatu negara guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Bryant dan White (dalam, Harjanto 2011:5) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi utama :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).

2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai, dan kesejahteraan (*equity*).
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sunstainability*).
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Bryant dan White mengingatkan, bahwa lima prinsip dasar pembangunan diatas harus berorientasi pada pembangunan yang berwawasan *people centered development* (pembangunan yang berpusat pada rakyat), yang mengandung arti adanya proses pembangunan dengan tujuan peningkatan kemampuan manusia dalam menentukan masa depannya (Suryono, 2010:3). Sedangkan Rogers (dalam, Suryono 2010:3:4) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat, yang diselenggarakan dengan jalan memberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi, untuk mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun material bagi mayoritas warga masyarakat dengan mengendalikan lingkungan hidup mereka secara lebih baik (termasuk pemerataan, kebebasan, dan berbagai masalah kualitas hidup yang lain).

Pengertian konsep-konsep pembangunan di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan

secara sadar dan terus menerus untuk mencapai kemajuan dan perbaikan hidup yang lebih baik menuju tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, dalam pembangunan (*development*) terkandung unsur-unsur yang saling berkaitan, yaitu suatu perubahan dari sesuatu yang dianggap masih kurang menuju sesuatu yang lebih baik. Perubahan tersebut yang nantinya diarahkan untuk rakyat dalam membangun kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup yang lebih baik. Di setiap daerah memiliki suatu potensi yaitu potensi masyarakat yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri kemudian dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan

Jadi, dengan adanya suatu pembangunan baik secara aktivitas sosial ataupun pembangunan secara materil yang sebagaimana ditunjukan kepada masyarakat ialah agar terciptanya suatu pembaharuan suatu daerah tersebut yang mencakup berbagai aspek dan proses pembangunan dilakukan terus menerus dari suatu keadaan yang belum cukup baik menjadi lebih baik dan dianggap sudah baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Konsep Pembangunan

Konsep Pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita (dalam Nurman, 2015:87) ialah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan Siagian (dalam, Harjanto 2011:5) memberikan pengertian konsep pembangunan sebagai Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh

suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ahli, pengertian konsep pembangunan pada dasarnya mengacu pada memperbaiki serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada, dan dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. konsep pembangunan juga bertujuan dalam menentukan suatu proses perubahan dari pembangunan tersebut. Perubahan yang dimaksud ialah perubahan yang terencana dengan cara memperbaiki kekurangan dari daerah tersebut dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat.

3. Nilai dan Tujuan Pembangunan

Nilai dan tujuan pembangunan menurut Goulet (dalam Nurman 2015:94) mengatakan bahwa paling tidak ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami pembangunan yang paling hakiki. Ketiga komponen dasar tersebut adalah :

1. Kecukupan (*sustenance*),
2. Jati diri (*self-esteem*),
3. Kebebasan (*freedom*).

Ketiga hal inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang

terwujud dalam berbagai macam manifestasi (bentuk) di hamper semua masyarakat dan budaya sepanjang zaman (Nurman, 2017:95).

Berikut merupakan ketiga komponen menurut Goulet (1971) dalam Nurman (2017):

1. Kecukupan (*sunstenance*)

Yang dimaksud dengan kecukupan adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan dasar (makanan), melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka muncullah kondisi “keterbelakangan absolut”

2. Jati Diri (*self-esteem*)

Komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih baik adalah dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengerjakan sesuatu dan seterusnya.

3. Kebebasan (*freedom*)

Nilai universal yang ketiga yang terkandung dalam makna pembangunan adalah konsep kebebasan/kemerdekaan manusia. Kebebasan diartikan secara luas, yaitu kemampuan untuk berdiri tegak diatas kaki sendiri (otonom) dan demokratis.

Menurut (Nurman, 2015: 97) Berdasarkan tiga komponen dasar pembangunan di atas, Menurut (Nurman, 2015: 97) setidaknya ada tiga tujuan inti dari suatu pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan dan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan.

Tujuan pembangunan menurut Siagian (2008:4) pembangunan dapat dipahami melalui nilai dan ide sebagai berikut :

1. Pembangunan merupakan suatu proses.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu yang dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, sedang, dan pendek.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas dalam hal ini dapat melalui kegiatan pembangunan yang bersifat multidimensional.

6. Semua hal diatas ditujukan usaha pembinaan bangsa sehingga negara dapat semakin kokoh fondasinya.

Berdasarkan pengertian tentang nilai dan tujuan dari pembangunan untuk menyikapinya adalah bagaimana pemerintahan menyediakan hal yang secara menyeluruh dapat dirasakan oleh masyarakat, baik pembanguan sosial yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan sosial di desa tersebut. Ataupun pembangunan fisik secara materiil untuk menopang kebutuhan lingkungan yang menjadi prioritas masyarakat desa tersebut dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan yang nyata sebagai bentuk implikasi dari nilai dan tujuan dari pembangunan.

4. Model Pembangunan

Model Pembangunan menurut Jamaludin (2017:228) mengkategorikan model pembangunan yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan memiliki beberapa model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Model Pembangunan I (Pertumbuhan)

Tjahya Supriatna (1997:16) Model pembangunan ini berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an. Pembangunan berorientasi pada peningkatan pertumbuhan pendapatan nasional. Peranan pemerintah sejak semula bersifat entrepreneurial. Aparatur pemerintah sangat menentukan dalam merencanakan pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Perencanaan diwarnai oleh pendekatan sektoral dan parsial.

2) Model Pembangunan II (Pemerataan dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok/Kebutuhan Dasar)

Menurut Diana Conyers (1994:45) Kebutuhan dasar dapat dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, konsumsi bahan-bahan pokok, seperti pangan, sandang, perumahan (papan) yang dapat dijangkau oleh setiap orang. *Kedua*, pelayanan pokok, seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, yang setiap orang berhak untuk mempunyai akses yang sama. *Ketiga*, hak untuk berpartisipasi dalam membuat dan melaksanakan program yang berpengaruh terhadap pengembangan pribadi.

3) Model Pembangunan III (Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia)

Menurut David C., model pembangunan ini meliputi prakarsa dan pengambilan keputusan yang diserahkan kepada masyarakat; meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber-sumber yang ada; memanfaatkan kondisi lokal secara optimal dan maksimal; menekankan pembelajaran sosial antara birokrasi dan komunitas; mengembangkan jaringan antara birokrasi dan lembaga swasta.

4) Model Pembangunan IV (Peningkatan Daya Saing)

Model Pembangunan ini berkembang pada akhir abad ke-20. Menurut Supriatna, pembangunan berupaya untuk meningkatkan daya saing. Lokus model ini adalah *nation state* dalam keseluruhan unsur dan isinya, serta upaya peningkatan daya saing, pengembangan kemitraan dalam independensi global yang dinamis, dan didasari nilai-nilai budaya universal.

Model-model pembangunan akan lebih mudah dalam mengkategorikan suatu kawasan dengan arah pembangunan yang selanjutnya. Untuk kasus di desa Glagah pembangunan yang cocok dengan kawasan tersebut ialah model pembangunan III, karena desa Glagah sedang tahap perkembangan dari segala aspek dan nanti mungkin arah dari pembangunan pada pemerataan pembangunan yang mendasari perkembangan aktualisasi sosial dan pengembangan potensi daerah serta mengelola agar dapat memaksimalkan pendapatan pada potensi desa, disamping itu dapat tercipta suatu lapangan kerja baru bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bertani.

C. Desa

1. Pengertian Desa

Secara umum desa diartikan dengan gejala yang bersifat luas, karena desa terdapat dimanapun di dunia ini. Akan tetapi desa memiliki pengertian tersendiri. Desa sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu, baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya (Jamaludin, 2017:4). Sedangkan Bintarto (Wasistiono dan Tahir, 2006) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan atau perwujudan dari geografi, ekonomi, sosial, politik, dan kultural dalam hubungan serta pengaruhnya terhadap daerah yang lainnya yang terdapat di dalam suatu daerah tertentu atau pengaruhnya memiliki timbal balik dengan daerah lain. Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli ialah, desa yang memiliki potensi-potensi sumber daya yang melimpah berdasarkan topografinya dan mengelolanya sedemikian rupa guna

untuk mencukupi kebutuhan ekonomi masyarakat desa tersebut ataupun masyarakat daerah dari hasil potensi yang dimiliki.

Desa dimana pun cenderung memiliki karakteristik tertentu dalam subtansinya. Dalam Undang-undang No.6 tentang desa tahun 2014, desa dipahami sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dari bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Pasal 1 ayat (43) tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa sebagai berikut, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan beberapa pengertian desa tersebut jelas bahwa pengertian desa menurut para ahli dan UU nomor 23 Pasal 1 ayat (43) tahun 2014 yang mengarah pada kewenangan pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan desa dengan mengoptimalkan kebutuhan dari desa tersebut, yang mana akan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat desa dan juga bagi daerah yang membutuhkan potensi dari desa tersebut.

2. Komponen Desa

Desa adalah bagian dari negara yang tak terpisahkan, peranan desa pada kemajuan suatu daerah sangat signifikan. Di dalam desa terdapat suatu sistem yang memiliki komponen secara fisik, manusia maupun kelembagaan sosial yang dapat mempengaruhi perkembangan dari desa tersebut. Menurut Arni (1995:25) komponen desa ialah sebagai berikut :

1. Sumber daya pertanian dan lingkungan hidup

Perdesaan memiliki sumber daya pertanian dan lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat.

2. Perekonomian wilayah perdesaan

Kegiatan ekonomi perdesaan berkaitan dengan kebutuhan pasar diluar daerah, yang berupa komoditi primer dan sekunder.

3. Kelembagaan sosial

Kegiatan perekonomian di pedesaan ditandai dengan eratnya hubungan petani, pedagang, peternak, penyebaran inovasi, pengelolaan sarana produksi pertanian lokal, dan transportasi. Selain itu, lembaga sosial yang ada seperti kelompok tani, kelompok pemuda, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, pesantren, dan lembaga pendidikan formal, serta lembaga keuangan mikro berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian dan kehidupan masyarakat setempat. Kelembagaan tersebut berpengaruh terhadap distribusi dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

4. Sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia di wilayah perdesaan merupakan subjek atau pelaku utama yang menggerakkan roda perekonomian dan perubahan dalam jangka panjang.

5. Sarana dan prasana fisik

Desa selain menjalankan aktivitas sosial dan kelembagaan, ditunjang pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat serta meningkatkan hubungan dan jaringan antara satu desa dan desa lainnya. Komponen ini secara fungsional dibedakan sarana fisik penunjang produksi dan aktivitas sosial. Komponen sarana fisik mencakup pelayanan dalam bidang ekonomi, seperti jalan desa, jembatan, irigasi, dan pabrik pengolahan pertanian. Dalam bidang kesehatan tersedianya posyandu, sanitasi, dan air bersih. dalam bidang pendidikan, tersedianya sekolah dasar, pesantren, atau madrasah.

Komponen yang terdapat dalam desa juga memiliki peran sebagai penopang dan peningkat kesejahteraan, juga sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Masyarakat juga dirasa perlu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sarana dan prasarana untuk mempermudah dalam melangsungkan kehidupan yang sejahtera dan juga pada pendekatan lingkungan yang berkelanjutan.

Dewasa ini, pembangunan desa memegang peranan penting dalam kelestarian alam. Peranan dari kelestarian alam sendiri terdapat pada pola

pengelolaan sumber daya yang tersedia. Sehingga menjadi penting kegiatan produksi potensi desa tersebut untuk meningkatkan perekonomian perdesaan yang akan mendorong integrasi kuat desa agar pembangunan desa bisa tercapai secara menyeluruh, dan tidak ada ketimpangan serta adanya keseimbangan antar komponen yang berpartisipasi di dalamnya. Untuk itu, pembangunan di desa Glagah sangat diperlukan adanya komponen-komponen yang saling berkaitan, karena adanya potensi pertanian tambak yang dimana sebagian besar daerahnya adalah tambak.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Sumber Saparin (2009: 19) merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar ataupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan pemerintah desa menurut Nurcholis (2011:138) adalah pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Yang mana pemerintah mempunyai tugas pokok. *Pertama*, melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat; *Kedua* menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dan dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintahan desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang

seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Pada pemerintahan desa yang dimana sejak berlakunya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk menjalankan pemerintahannya.

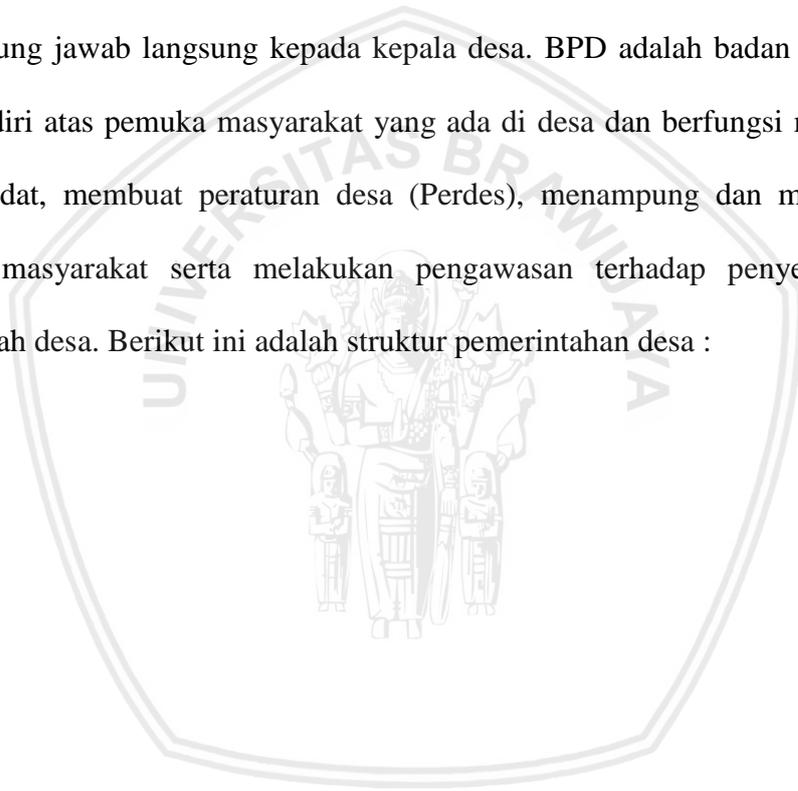
Fungsi pemerintah desa menurut Rivai (2004:53), merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar-individu di dalam situasi sosial kelompok masyarakat yang fungsi pemerintahannya secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, sebagai berikut :

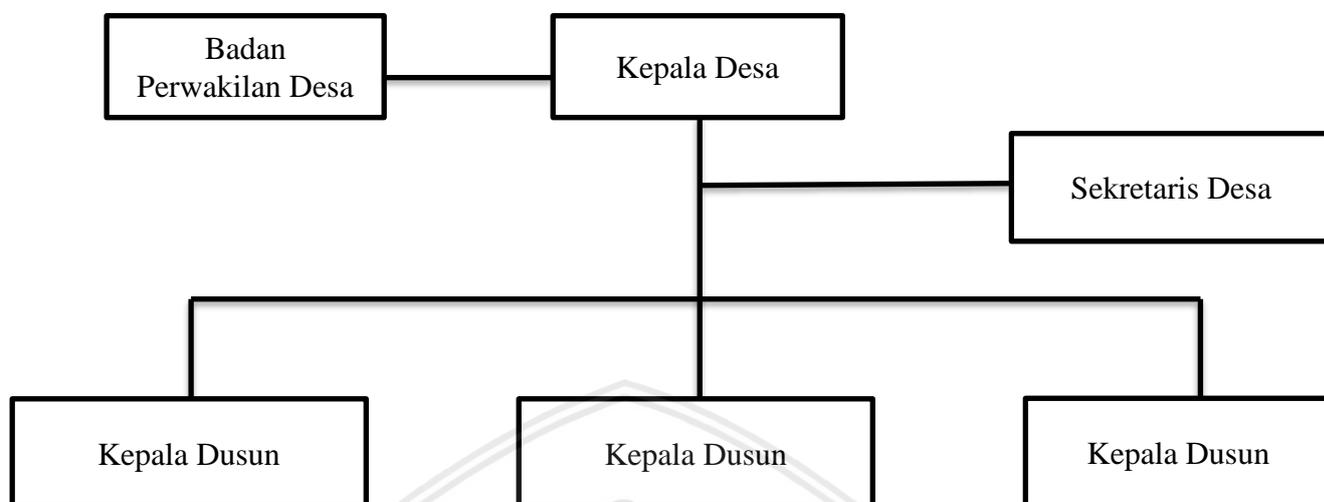
1. *Intruktif*, Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah yang dimana pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
2. *Konsultatif*, Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya.
3. *Partisipasi*, Dalam fungsi ini, pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya.
4. *Delegasi*, Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah.
5. *Pengendalian*, Fungsi pengendalian beramsumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam.

Dengan adanya fungsi-fungsi dari pemerintah desa tersebut, maka partisipasi pemerintah desa terhadap pembangunan desa untuk menjadi lebih baik dilakukan secara terkendali dan terarah. Masyarakat memberikan kepercayaan terhadap pemerintahan desa dalam pengkoordinasian kepentingan masyarakat desa agar pembangunan dan tata kelola desa bisa efektif dan memungkinkan tercapainya

tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan pengendalian yang dapat diwujudkan melalui kegiatan yang sudah dicanangkan.

Pemerintahan Desa dalam menjalankan kegiatannya terdapat jajaran perangkat desa yang perannya membantu kepala desa dalam penyelenggaraan kegiatan di desa. Menurut Nurman (2015: 237) susunan pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemdes bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka masyarakat yang ada di desa dan berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa (Perdes), menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Berikut ini adalah struktur pemerintahan desa :





Gambar 2 : Struktur Pemerintahan Desa tahun 2001

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Pemerintah RI Nomor 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa) 2019

Perangkat desa saling bekerja sama dalam melakukan pembangunan berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, perangkat desa juga menerima aspirasi keluhan dari masyarakat terkait kebutuhan nyata dari masyarakat melalui BPD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat ditingkat desa. BPD memiliki kedudukan setara dengan Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya, BPD mempunyai hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa mengenai proses pembangunan desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa menyusun administrasi pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan kegiatan yang akan diterapkan di Desa yang akan dibantu oleh setiap kepala dusun untuk mewakili warganya dalam penyampaian kebutuhan utama dari setiap dusun yang nantinya disimpulkan menjadi kebutuhan bersama bagi warga desa. Setelah itu dengan adanya putusan dari kepala desa tentang apa yang akan dikembangkan dan dilakukan dalam pembangunan desa, pemerintahan desa merujuk kepada BPD yang

tembusannya disampaikan kepada camat atau bupati agar pembangunan desa dapat dialokasikan anggaran dana yang nantinya dipergunakan untuk mewujudkan pembangunan, sesuai dengan inovasi yang akan dikembangkan dalam pembangunan desa tersebut.

D. Pembangunan Desa

1. Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa daerah otonom adalah Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang terdapat di desa memang berbeda dengan otonomi daerah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota. Menurut Jamaludin (2017:183) Otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi desa tetap harus menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik

Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat, dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Untuk itu, desa tidak dikelola secara teknokratis, tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan sosial budaya yang ada.

Sejalan dengan itu, otonomi desa menurut Sutoro Eko (2005: xv) menjelaskan bahwa tujuan yang substansial dari desentralisasi sebagai berikut :

- a. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat.
- b. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- c. Mendongkrak kesejahteraan perangkat desa.
- d. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa.
- e. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab, dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa.
- f. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan.
- g. Membuka arena pembelajaran yang sangat baik bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
- h. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Otonomi Desa yang dilakukan pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan desa setidaknya melihat esensi dan substansi rujukan tersebut, yaitu kesejahteraan masyarakat, partisipasi aktif, dan upaya membangun kepercayaan bersama yang dibingkai dengan sinergitas antara pemerintah dengan partisipasi masyarakat yang nantinya bekerja sama dalam pembangunan desa. Upaya dalam

mengawal tujuan desentralisasi dan otonomi desa memerlukan komitmen dan partisipatif desa dalam melakukan pembangunan menuju kemandirian desa agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang sebagaimana diketahui sebagai tujuan dari Otonomi daerah.

2. Definisi Pembangunan Desa

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, ketrampilan dan prakarsa masyarakat.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan (Adisasmita 2006:3).

Pemerintah desa dalam melakukan pembangunan mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Pada pelaksanaannya, pembangunan desa seharusnya mengacu pada

pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Adisasmita (2013:75) menjelaskan tiga prinsip pokok pembangunan desa sebagai berikut :

1. Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada, pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu
 - a. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
 - c. Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor dan antar sektor di setiap daerah, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi sebaik-baiknya.

Tujuan umum dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (*improving quality of life*). Karena arah pembangunan sudah ke pola desentralistik yang mana pembangunannya tidak terpusat pada suatu

daerah saja, dan untuk melakukan pembangunan sudah tidak adanya kesenjangan dalam proses pembangunan, pemeran utama dalam pembangunan desa ialah masyarakat dan pemerintahan desa.

E. Inovasi

1. Definisi Inovasi

Definisi Inovasi menurut etimologi, inovasi berasal dari kata *innovation* yang bermakna pembaharuan atau perubahan secara baru. Inovasi adakalanya diartikan penemuan, tetapi berbeda maknanya dengan penemuan dalam arti diskoveri dan invensi. Diskoveri mempunyai makna penemuan sesuatu yang sesuatu itu telah ada sebelumnya, sedangkan Invensi adalah penemuan yang benar-benar baru sebagai hasil kreasi manusia. Dalam hal ini inovasi dibutuhkan sebagai dikoveri dan invensi karena penting adanya suatu temuan yang sudah ada dan dikembangkan, tapi menemukan suatu temuan yang baru tidak kalah penting dalam menciptakan suatu pembaharuan di suatu desa dan peran inovasi sering digunakan untuk menemukan sebuah trobosan baru dalam pembangunan kawasan tersebut.

Definisi inovasi menurut Muluk (2008:44) Inti dari Inovasi ialah perubahan menuju hal-hal baru. Untuk itu, inovasi membutuhkan sebuah pemikiran yang inovatif dan kreatif dalam memunculkan suatu solusi baru terhadap sebuah permasalahan yang dihadapi di desa tersebut. Suatu solusi baru akan membawa perubahan pada lingkungannya dengan memanfaatkan dan mengelola suatu sumber daya yang kurang produktif menjadi sumber daya yang produktif.

Peran Inovasi di dalam *quo vadis* pembangunan desa diartikan sebagai cara untuk mengembangkan ide maupun gagasan dan membuatnya menjadi sebuah

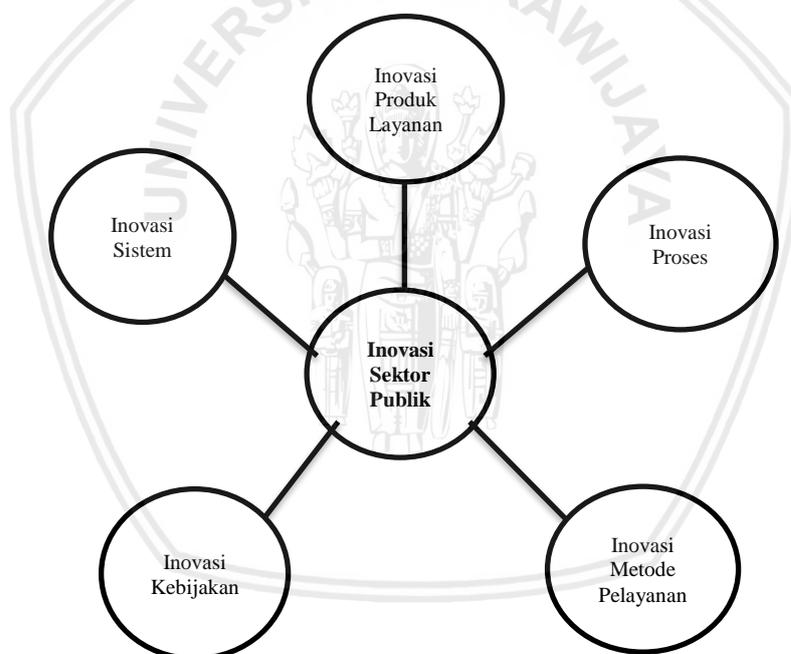
karya yang bermanfaat bagi masyarakat desa, sebuah pembangunan ketika dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang kreatif akan menciptakan suatu terobosan dalam pemecahan suatu masalah yang di hadapi desa tersebut. sesuai dengan perkembangan lingkungan yang dinamis. Untuk mewujudkan pembangunan desa itu sendiri dibutuhkan yang namanya kreativitas dan juga inovasi dalam merealisasikannya, agar nantinya masyarakat desa bisa memanfaatkan potensi fisik maupun nonfisik yang dimilikinya. Dalam merealisasikan pembangunan tersebut perlu adanya suatu perencanaan sebuah program yang akan diterapkan di desa. Sebuah desa akan berkembang pesat ketika masyarakat dapat berpartisipasi didalamnya, dalam hal peningkatan sumber daya manusia yang akan menopang pembangunan fisik dari desa. Dengan demikian, untuk mewujudkan kepentingan bersama semua lapisan masyarakat dan pemerintah desa bersama-sama membangun desa tersebut dengan cara mencari inovasi terkait pengembangan potensi dari desa tersebut agar menjadi manfaat bagi yang lainnya.

2. Tipologi Inovasi

Konsep baru dalam sebuah inovasi memang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, terutama dalam upaya pembangunan di desa yang sangat membutuhkan sebuah terobosan untuk berkembang. Muluk (2008:45) menyatakan bahwa tipologi dari inovasi sektor publik adalah sebagai berikut :

- a. Inovasi produk atau layanan berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi.

- b. Inovasi proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi.
- c. Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan.
- d. Inovasi dalam strategi atau kebijakan mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada.
- e. Inovasi sistem mencakup cara baru atau yang diperbaharui dalam berinteraksi dengan actor-aktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan (*changes in governance*).



Gambar 3 Tipologi Inovasi Sektor Publik

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Sumber : Muluk (2008 : 45)

3. Proses Inovasi

Proses Inovasi menurut Rogers (2003) yang dikutip Suwarno (2008:91) mengemukakan bahwa tahapan dari proses inovasi adalah *Knowledge* (Pengetahuan), *Persuasion* (Kepercayaan), *Decision* (Keputusan), *Implementation*

(Penerapan), *Confirmation* (Konfirmasi). Suwarno (2008:91-97) menjelaskan proses inovasi pada umumnya akan melewati tahapan sebagai berikut :

a. Pengetahuan

Tahap pengetahuan adalah tahapan di mana konsumen/pasar (pada sektor bisnis) atau warga negara (pada sektor publik) mulai mengenal pasar. Dalam fase pengetahuan, pasar biasanya mulai tersegmentasi secara otomatis. Konsumen hanya tertarik untuk mengikuti berita atau informasi mengenai produk inovasi yang sesuai kebutuhannya.

b. Persuasi

Pada tahap kedua, konsumen atau warga negara mulai dipengaruhi sikap dan perilakunya agar positif atau sejalan dengan misi dari produk tersebut. Pada tahapan ini berbentuk pola pikir dari konsumen atau warga negara yang akan menentukan perilaku konsumen atau warga negara yang akan menentukan perilaku konsumen selanjutnya untuk memutuskan sikapnya untuk menerima atau menolak. Tahapan persuasi merupakan tahapan kritis yang menentukan jenis keputusan yang akan diambil oleh calon adopter.

c. Keputusan

Setelah adopter mengetahui adanya produk inovasi dan dipengaruhi oleh sejawatnya melalui komunikasi interpersonal, maka adopter memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi tersebut. Rogers membedakan penolakan pasif dengan penolakan aktif. Penolakan aktif adalah penolakan yang dilakukan oleh calon adopter setelah yang bersangkutan mempertimbangkan atau mencoba terlebih dahulu produk tersebut. Sehingga penolakan yang terjadi mempunyai dasar atau alasan objektif. Sedangkan penolakan pasif adalah penolakan total tanpa menghiraukan sama sekali produk tersebut.

d. Implementasi

Pada tahapan ini, terjadi perubahan perilaku individu yang mengadopsi produk, dimana adopter mulai memanfaatkan produk barunya tersebut sesuai dengan fungsinya.

e. Konfirmasi

Pada tahapan ini adopter sudah merasakan nyaman dengan produk yang diadopsinya. Kecenderungan perilaku adopter selanjutnya adalah mencari penguatan. Perilaku adopter pada tahapan ini adalah menghindari situasi yang berlawanan atau melemahkan posisi sikapnya dalam memanfaatkan produk inovasi, sehingga yang dicari adalah informasi yang mendukung keputusan sebanyak-banyaknya.

4. Ciri Inovasi

Ciri inovasi pada dasarnya muncul ketika di dalamnya terdapat ciri inovasi, dan disertai cara berpikir yang kreatif dan inovatif. Paul G.H. Engel (dalam Susanto, 2010:134) menyatakan bahwa setidaknya terdapat lima ciri inovasi yang disebutkan sebagai berikut :

- a. *Continuity, and the use of new elements.* Disebut inovasi, manakala suatu organisasi sanggup mempertahankan kontinuitas. Dalam upaya mempertahankan keberlangsungan itu, suatu perusahaan atau organisasi dapat menerapkan elemen-elemen baru, seperti: meningkatkan produk dan layanan, menerapkan proses baru, merancang dan menerapkan sistem baru dari bisnis, dan mengimplementasikan metode baru manajemen.
- b. *Intentionality, a wish to improve one's way doing things.* Benar-benar niat, harus punya keinginan untuk meningkatkan bagaimana cara menerapkan inovasi itu.
- c. *Mental models that favor, limit or even impede.* Inovasi adalah soal model mental yang baik, batas-batas norma-norma, atau sperangkat aturan yang menjadi pedoman untuk melakukan perubahan yang lebih baik.
- d. *Institutional arrangements that enchance, reduce or suffocate.* Peraturan lembaga yang meningkatkan, mengurangi, atau memperketat.
- e. *An social/relational context that enables, weakens or inhibits.* Konteks sosial/konteks relasi yang memungkinkan, melemahkan, atau menghambat.

Ciri inovasi yang telah dijelaskan dapat menjadi acuan bahwa apakah sebuah inovasi dapat dikatakan suatu program ataupun kebijakan dalam melakukan pembangunan desa. Misalnya pada pembangunan desa yang akan dilakukan di desa Glagah, apakah dengan adanya inovasi tersebut dapat membuat suatu program yang akan memberi terobosan pada pembangunan di desa tersebut.

5. Level Inovasi

Inovasi memiliki aspek lain yang berkaitan dengan inovasi yaitu level inovasi. Setiap inovasi mempunyai efek samping dari penerapannya dan level inovasi merupakan aspek dalam inovasi yang mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh inovasi tersebut. Level organisasi menurut Mulgan dan Albury dalam Muluk (2008:46) terdapat tiga level inovasi. Level inovasi tersebut antara lain:

1. Inovasi Inkremental

Inovasi inkremental merupakan inovasi yang terjadi dengan membawa perubahan-perubahan kecil terhadap proses atau layanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi yang berada didalam level ini jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan ke organisasian. Namun inovasi inkremental memiliki peranan yang penting dalam pembaruan sektor publik karena dapat melakukan perubahan kecil yang dapat diterapkan secara terus menerus dan mendukung rajutan pelayanan yang responsive terhadap kebutuhan lokal dan perorangan serta mendukung nilai tambah uang.

2. Inovasi Radikal

Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau pengenalan cara-cara yang baru dalam proses pengorganisasian atau pelayanan. Inovasi level ini jarang sekali dilakukan karena membutuhkan dorongan politik yang besar karena memiliki resiko yang besar pula. Inovasi radikal diperlukan untuk membawa perbaikan yang nyata dalam kinerja pelayanan publik dan memenuhi harapan pengguna layanan lama yang terabaikan.

3. Inovasi Transformatif

Inovasi transformatif atau sistem membawa perubahan dalam struktur angkatan kerja dan keorganisasian yang mentransformatifkan semua sektor dan secara dramatis mengubah hubungan keorganisasian. Inovasi transformatif ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil yang diinginkan dan membutuhkan perubahan yang mendasar dalam susunan sosial, budaya dan organisasi. Inovasi ini bersifat lebih mendalam karena mencakup sistematis keorganisasian. Inovasi jenis ini bisa dengan mudah dijalankan.

6. Kategori Inovasi

Konsep Inovasi terdapat dua kategori dalam proses inovasi. Menurut pendapat Christensen dan Laergreid dalam Muluk (2008:47-48) terdapat dua kategori. Kategori tersebut antara lain:

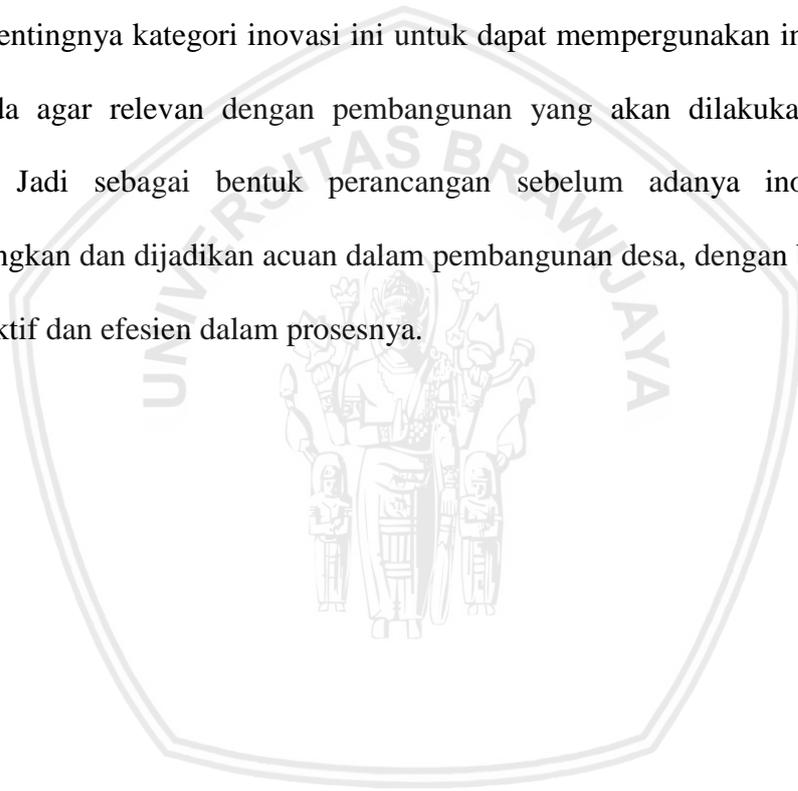
1. *Sustaining innovation* (inovasi terusan)

Merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru namun tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan dan produk yang sudah ada.

2. *Discontinues innovation* (inovasi terputus)

Merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang baru dan sama sekali tidak mendasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya. Kategori inovasi jenis kedua ini membawa pelayanan atau produk berbeda, pengguna layanan yang berbeda serta sumber daya yang berbeda pula. Tentu dalam hal inovasi yang kedua ini kadarnya jauh lebih tinggi daripada kategori yang pertama.

Pentingnya kategori inovasi ini untuk dapat mempergunakan inovasi yang sudah ada agar relevan dengan pembangunan yang akan dilakukan di desa tersebut. Jadi sebagai bentuk perancangan sebelum adanya inovasi yang dikembangkan dan dijadikan acuan dalam pembangunan desa, dengan begitu akan lebih efektif dan efisien dalam prosesnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2014:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Pasolong, 2012:161). Jenis penelitian kualitatif dipilih karena permasalahan yang diangkat oleh peneliti membutuhkan keterangan secara mendalam kepada narasumber-narasumber yang mengetahui mengenai *Quo Vadis* Inovasi terhadap pembangunan desa di desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif ini dikarenakan permasalahan yang akan dibahas serta data yang akan diperoleh lebih sesuai menggunakan metode kualitatif. Teknik penulisan dalam menganalisis, merumuskan dan memecahkan masalah yang dilakukan peneliti menggunakan teknik deskriptif agar

mendapat gambaran yang lebih detail dan lengkap mengenai masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga nanti tujuan penelitian dapat dicapai.

Pendekatan deskriptif dipilih karena akan mempermudah peneliti mendeskripsikan masalah yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti secara lebih mendalam. Sehingga peneliti dapat menggambarkan data yang berasal dari lapangan secara tepat dan akurat mengenai *Quo Vadis* Inovasi dalam Pembangunan Desa di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong (2014:94) fokus penelitian adalah pembatasan studi sebagai masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan-kepustakaan lainnya. Sehingga apabila peneliti menemui masalah dalam penelitiannya alangkah baiknya jika mendalami kembali kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian sehingga akan memenuhi kriteria untuk penyelidikan atau penelitian sehingga akan memenuhi kriteria untuk penyelidikan atau penelitian lebih mendalam dan peneliti akan bisa membedakan inklusi-inklusi penelitian.

Fokus dari penelitian ini adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti, sehingga fokus penelitian ini sangat penting dalam membatasi masalah dalam penelitian sehingga objek yang diteliti menjadi lebih spesifik dan tidak meluas. Fokus peneliti adalah sebagai berikut :

1. Quo Vadis Inovasi Pembangunan Desa studi di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan.
 - a. Tipologi inovasi dalam melakukan pembangunan desa

1. Inovasi Produk Layanan
 2. Inovasi Proses
 3. Inovasi Sistem
 4. Inovasi Kebijakan
 5. Inovasi Metode Pelayanan
- b. Inovasi Meningkatkan PADes (Pendapatan Asli Desa)
 - c. Kategori inovasi dalam melakukan pembangunan desa
 1. *Sustaining innovation* (inovasi terusan)
 2. *Discontinues innovation* (inovasi terputus)
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Quo Vadis Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah, yaitu :
 - a. Faktor Pendukung
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal
 - b. Faktor Penghambat
 1. Faktor Internal
 2. Faktor Eksternal

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana objek penelitian dilakukan. Penetapan pada lokasi penelitian merupakan hal penting yang harus dilakukan karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka objek dan tujuan yang telah ditetapkan akan mempermudah penulis untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi Kabupaten Malang. Sedangkan pada situs

penelitian merupakan tempat sebenarnya penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari objek penelitian. Adapun yang menjadi situs penelitian yaitu Desa Glagah.

Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena Kabupaten Lamongan merupakan daerah dengan banyak karakteristik dan beranekaragam potensi sumber daya yang tersedia. Terutama peneliti memilih di Desa Glagah yang dijadikan situs penelitian karena Desa Glagah merupakan desa yang berada di perbatasan Kabupaten Gresik dan Lamongan dan memiliki potensi sumber daya yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya, atau lebih tepatnya masih konvensional. Potensi desa tersebut ialah pertanian tambak, yang sebagian besar mata pencaharian penduduk disana adalah petani tambak, dan juga lahan persawahan disana memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pertanian padi dan juga budidaya ikan. Di Desa Glagah pembangunan yang dilakukan masih belum berfokus pada potensi lokal yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk mengetahui arah dari pembangunan desa, peneliti menentukan situs di Desa Glagah untuk mengetahui inovasi dalam pembangunan desa.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian mengenai *Quo vadis* Inovasi Pembangunan Desa sebagai upaya membangun desa sebagaimana potensi yang dimilikinya untuk dapat berkembang menjadi desa yang produktif ini menggunakan dua jenis data. Sesuai dengan jenisnya data penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Berikut merupakan penjelasan dari kedua data tersebut :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung saat melakukan penelitian dan juga data primer dapat diperoleh dari sumber-sumber yang dipilih untuk mendapatkan informasi yang dengan cara melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2014:225), data primer diperoleh langsung dan memberikan kepada pengumpul data. Sumber data primer diperoleh langsung dan memberikan kepada pengumpul data. Adapun sumber data primer dari hasil wawancara dengan informan yang berjumlah 3 orang :

- a. Kepala Bidang Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kabupaten Lamongan
- b. Kepala Desa Glagah
- c. Masyarakat Desa Glagah

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan (Sarwono, 2006:209). Data tersebut diperoleh dari siapapun yang bukan merupakan saksi yang terlibat yakni yang dapat memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding (Margono, 2005:45). Adapun data sekunder yang digunakan oleh penulis meliputi buku, jurnal, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan referensi dari internet yang dapat dilihat dalam daftar pustaka.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ialah proses kegiatan mencari dan mengumpulkan data dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari adanya penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2015:62). Teknik pengumpulan data dalam penelitian antara lain :

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati dan mencatat fenomena yang berada dilokasi penelitian. Menurut Marshall dalam Sugiyono (2015:64) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Metode observasi sumber informasinya berupa penampakan suasana dan perilaku yang diamati serta diabadikan dalam bentuk lembaran foto maupun catatan yang didalamnya terdapat penampakan keadaan suasana. Melalui observasi akan diperoleh gambaran yang jelas serta nyata. Adapun observasi pada penelitian ini ada pada lampiran 1 halaman 147-157.

2. Wawancara

Wawancara menurut Moleong (2014:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dilakukannya wawancara ini ialah untuk mendapatkan penjelasan dari narasumber. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi Bapak Said selaku Kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, Bapak Kohar selaku Kepala Desa Glagah, Bapak Khairul Hadi selaku Masyarakat Desa Glagah yang juga merangkap sebagai Kepala Dusun Glagah Masjid.

3. Dokumen

Sebagian besar data dokumentasi yang tersedia berbentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya peraturan dan kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar dapat berupa foto, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi ini akan membantu peneliti untuk mendapatkan data sekunder, menurut Bogdan dalam Sugiyono (2015:83) hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

a. Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (lihat halaman 54,55,56,59,60,62,63)

b. Dokumen Desa Glagah

- 1) Peta Desa Glagah (halaman 64)
- 2) RPJMDes Desa Glagah (halaman 66,68,70,73,74)

F. Instrumen Penelitian

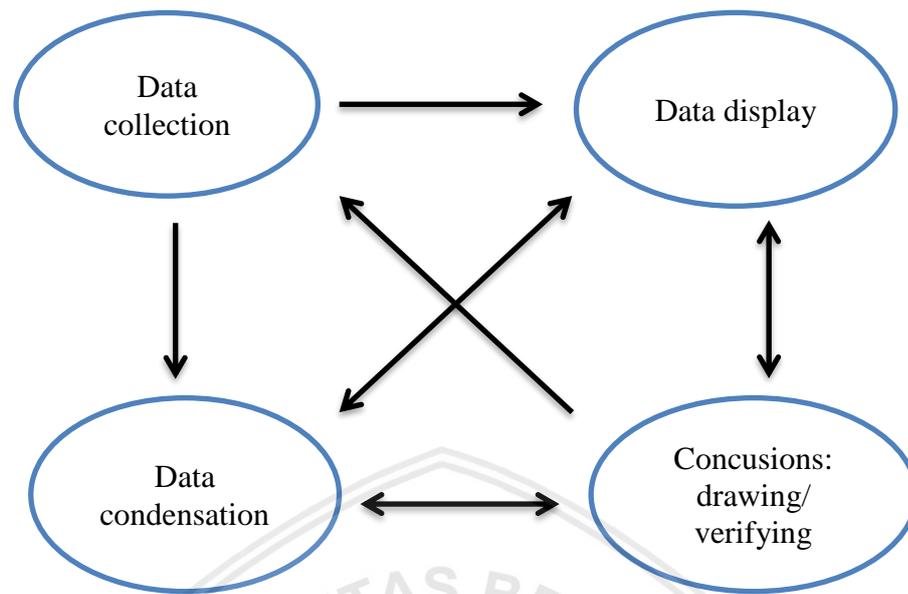
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data atau informasi terkait permasalahan yang diteliti dengan topik pada penelitian yang akan dilakukan. Menurut Sugiyono (2015:59) terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu, kualitas instrument penelitian dan kualitas penelitian. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah :

1. Peneliti, yaitu dengan menggunakan alat panca indra peneliti sendiri melakukan pengamatan dan pencatatan secara seksama terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian.
2. Pedoman wawancara (*Interview guide*), digunakan sebagai panduan pada saat melakukan wawancara kepada informan.

3. Catatan Lapang, digunakan untuk mencatat data yang didapat dari hasil wawancara.
4. Perangkat penunjang lapangan yang lain berupa *smartphone* yang digunakan sebagai alat perekam suara maupun kamera untuk mengabadikan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti.

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan dengan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Tahapan dan alur analisis ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 4 Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (*Miles, Huberman, dan Saldana. (2014:33)*)

Melihat gambar diatas dalam analisis model ini terdapat empat alur kegiatan, antara lain sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada tahap pengumpulan data ini peneliti melakukan proses pengumpulan data yang diperlukan peneliti. Pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data ialah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen serta materi-materi empiris lainnya. Proses kondensasi dilakukan

setelah peneliti sudah mendapatkan data di lapangan baik dari observasi, wawancara serta data-data sekunder dalam penelitian.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan pengorganisasian, penyatuan dan informasi yang memungkinkan dalam penyimpulan data. Penyajian data akan membantu dalam memahami apa yang terjadi untuk melakukan sesuatu, termasuk dalam menganalisis data berdasarkan pemahamannya. Penyajian data ini dilakukan dengan menyajikan data-data yang didapat dari wawancara, catatan lapang, dan dokumentasi sebagai pendukung penyajian data.

4. Penarikan Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusions*)

Tahap terakhir dari analisis ini yaitu penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan tersebut dilakukan setelah tiga tahapan sudah dilakukan. Tiga tahapan yang sudah dilakukan yang dimaksud ialah apabila pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data sudah dilakukan dan diidentifikasi berdasarkan sub fokus yang sudah ditetapkan dan dibandingkan dengan teori yang digunakan.

H. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid, apabila data yang berada dalam penelitian tidak terdapat perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2014: 270), keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan

confirmability. Berikut ini merupakan uji keabsahan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Uji *credibility*

Uji *credibility* merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian untuk menjamin validitas yang diperoleh dari penelitian, maka diperlukannya uji keabsahan dan kelayakan data yang dilakukan dengan cara uji *credibility*.

2. Uji *transferability*

Menurut Faisal dalam (Sugiyono, 2014: 277) bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang jelas maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas. Uji *transferability* merupakan validitas eksternal dalam sebuah penelitian kualitatif.

3. Uji *dependability*

Di dalam penelitian tersebut dapat dikatakan *dependability* apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Menurut Faisal dalam (Sugiyono, 2014: 277), “Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka dependibilitas penelitiannya patut diragukan.

4. Uji *confirmability*

Pengujian *confirmability* adalah sebuah penelitian dengan obyektivitas yang dimana jika hasil penelitian tersebut telah disepakati oleh banyak pihak maka obyektivitas tersebut telah diakui keabsahannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

a. Keadaan Geografis

Lokasi Kabupaten Lamongan berada disebelah utara wilayah Jawa Timur dengan Luas wilayah Kabupaten Lamongan adalah 1.812,8 km², atau menempati sekitar 3,73 % luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Lamongan terdiri dari 27 kecamatan, yang meliputi 462 desa, 12 kelurahan dan 1.431 dusun. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Lamongan terletak antara 6° 51' 54" sampai dengan 7° 23' 6" Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 41" . Dalam skenario pengembangan sistem perwilayahan Jawa Timur, Kabupaten Lamongan termasuk Wilayah Pengembangan Gerbakertosusila Plus, yang secara struktur maupun pola ruang lebih banyak diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan metropolitan sebagai pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur. Disamping itu, untuk pengembangan sistem perdesaan. (Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 halaman II-I)

Peta administrasi Kabupaten Lamongan sebagaimana pada gambar berikut

:



Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Lamongan 2016

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021) 2019

b. Keadaan Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Lamongan berdasarkan perkembangan jumlah penduduk yang tercatat sepanjang tahun 2011-2016 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 1,65% tetapi pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebanyak 4,97%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 0,70% dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 0,88%. Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2011-2016 rata-rata berada pada kisaran 0,61%. (Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 halaman II-I). Perkembangan jumlah penduduk secara detail disajikan dalam table berikut :

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lamongan

Tahun 2011-2016

Tabel 1 Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lamongan

No.	KECAMATAN	TAHUN						(laju pertumbuhan penduduk)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	SUKORAME	21.854	21.736	21.222	20.944	20.401	20.957	-0,70%
2	BLULUK	22.695	21.337	22.211	22.426	21.393	22.665	-0,02%
3	MODO	48.107	47.485	49.962	49.676	48.990	49.844	0,59%
4	NGIMBANG	42.872	45.942	47.192	46.855	46.386	47.417	1,69%
5	BABAT	85.185	85.066	88.547	88.332	88.958	88.406	0,62%
6	KEDUNGPRING	65.831	56.370	60.855	59.900	60.167	60.186	-1,48%
7	BRONDONG	57.205	67.821	73.295	71.400	73.790	71.180	3,71%
8	LAREN	37.268	46.588	50.910	47.873	52.054	49.397	4,81%
9	SEKARAN	60.253	40.852	47.448	43.926	49.099	47.041	-4,04%
10	MADURAN	41.927	31.196	36.054	34.645	37.329	35.527	-2,72%
11	SAMBENG	54.718	50.055	51.348	51.579	50.384	52.170	-0,79%
12	SUGIO	60.765	57.929	61.875	61.392	60.567	62.052	0,35%
13	PUCUK	51.267	47.085	48.816	48.514	49.529	49.132	-0,71%
14	PACIRAN	78.698	90.604	94.499	93.248	96.017	94.230	3,05%
15	SOLOKURO	44.369	38.437	46.029	45.857	47.086	47.342	1,09%
16	MANTUP	43.687	44.187	44.881	45.245	43.898	46.128	0,91%
17	SUKODADI	58.146	54.312	56.145	56.391	55.538	57.405	-0,21%
18	KARANGGENENG	47.660	41.603	44.154	43.843	44.735	44.442	-1,16%
19	KEMBANGBAHU	44.759	49.465	48.823	48.953	47.101	49.788	1,79%
20	KALITENGAH	35.333	33.417	35.756	36.007	35.429	36.009	0,32%
21	TURI	53.144	52.995	53.755	54.592	53.198	55.034	0,58%
22	LAMONGAN	65.847	67.289	67.167	68.105	66.549	68.729	0,72%
23	TIKUNG	41.342	43.852	43.822	44.126	42.840	44.968	1,41%
24	KARANGBINANGUN	45.728	39.068	41.248	41.851	40.381	41.310	-1,68%
25	DEKET	44.454	43.932	44.553	45.149	43.608	44.867	0,15%
26	GLAGAH	27.251	41.097	42.879	43.064	42.525	42.695	7,77%
27	SARIREJO	25.533	24.659	24.813	24.907	24.314	25.198	-0,22%
	Jumlah	1.305.898	1.284.379	1.348.259	1.338.800	1.342.266	1.354.119	0,61%

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian Lamongan dalam Angka 2017
(Dokumen BPS Kabupaten Lamongan) 2019

c. Visi dan Misi Kabupaten Lamongan

Visi yang termuat dalam RPJMD perubahan merupakan visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJM Nasional Tahun

2015-2019 (NAWACITA). Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, adalah “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
2. Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3. Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4. Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Misi dari Kabupaten Lamongan juga tercantum dalam RPJMD tahun 2016-2021. Misi tersebut guna untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten

Lamongan 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing” ditempuh melalui lima misi sebagai berikut :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan guna menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

1. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.
2. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
4. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut: Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

2. Gambaran Umum Desa Glagah

a. Kondisi Geografis

Desa Glagah adalah sebuah desa yang terletak di kabupaten Lamongan yang bertempat di Kecamatan Glagah. Desa tersebut merupakan desa yang sangat strategis, karena di desa tersebut merupakan desa yang memiliki potensi lokal pertanian tambak dan desa tersebut berada di kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten Gresik. Desa Glagah mayoritas pekerjaannya ialah menjadi petani tambak. Di desa Glagah sendiri, sebagian lahannya ialah lahan persawahan, yang mana menjadi iconic dari Desa Glagah dan Kecamatan Glagah.



Gambar 6 Peta Desa Glagah tahun 2016

Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Google) 2019

b. Keadaan Administrasi

Secara geografis Desa Glagah terletak pada posisi 112,3858 Bujur Timur dan 7,1058 Lintang Selatan. Topografi ketinggian desa ini merupakan daratan sedang yaitu sekitar 6 m diatas permukaan air laut, berdasar data BPS Kabupaten Lamongan. Berikut adalah batas-batas wilayah di Desa Glagah :

1. Sebelah Barat : Desa Margoanyar
2. Sebelah Timur : Desa Jatirenggo dan Desa Bapuhbaru
3. Sebelah Utara : Desa Priyoso. Kecamatan Karangbinangun
4. Sebelah Selatan : Desa Duduklor dan Desa Margoanyar

Desa Glagah berada di wilayah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Jarak kantor Desa Glagah menuju kantor Kecamatan Glagah sejauh 50 meter dan dapat ditempuh 5 menit, dari jarak tersebut bisa dipahami bahwa kegiatan administratif Kecamatan Glagah terletak di Desa Glagah. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten sejauh 10 km dan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 menit. Wilayah Desa Glagah secara Geografis merupakan wilayah Kecamatan Glagah, dan di Desa Glagah terdiri dari enam dusun, antara lain Dusun Glagah Masjid, Dusun Glagah Kulon, Dusun Glagah Pasar, Dusun Senden, Dusun Dukuan, Dusun Podo yang masing masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Glagah, dari keenam dusun tersebut terbagi menjadi 5 RW dan 15 RT.

c. Keadaan Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2015, jumlah penduduk Desa Glagah terdiri dari 659 kk, dengan jumlah total jiwa 2.654, dengan rincian 1.208 laki-laki, 1.446 perempuan, sebagaimana tertera dalam table berikut :

Table 2 : Jumlah penduduk Desa Glagah

No.	Usia (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	0-4	30	53	83	3.33

No.	Usia (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (orang)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	5-9	28	40	68	2.56
3.	10-14	31	41	72	2.71
4.	15-19	32	42	74	2.79
5.	20-24	33	52	85	3.20
6.	25-29	45	54	99	3.73
7.	30-34	189	225	419	15.79
8.	35-39	300	360	660	24.87
9.	40-44	140	104	244	9.19
10.	45-49	110	149	259	9.76
11.	50-54	108	180	288	10.85
12.	55-58	140	131	271	10.20
13.	>59	22	15	47	1.77
Jumlah Total		1208	1446	2656	100.00

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian
(Dokumen RPJMDes Desa Glagah 2015-2019) 2019

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Glagah sekitar 1.766 atau hampir 66.5 %. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM. Tingkat kemiskinan di Desa Glagah termasuk tinggi. Dari jumlah 659 KK di atas, sejumlah 136 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera; 461 KK tercatat Keluarga Sejahtera I; 15 KK tercatat Keluarga Sejahtera II; 56 KK tercatat Keluarga Sejahtera III; 3 KK sebagai Keluarga Sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih dari 25 % KK Desa Glagah adalah keluarga miskin. (Dokumen RPJMDes Desa Glagah 2015-2020).

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan Desa Glagah dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2 Pendidikan masyarakat Desa Glagah

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1.	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	-	0.00
2.	Usia Pra-Sekolah	46	1.97
3.	Tidak Tamat SD	2	0.09
4.	Tamat Sekolah SD	147	6.31

5.	Tamat Sekolah SMP	192	8.24
6.	Tamat Sekolah SMA	1902	81.60
7.	Tamat Sekolah PT/Akademi	42	1.80
Jumlah Total		2331	100.00

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian
(Dokumen RPJMDes Desa Glagah 2015-2019) 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian penduduk Desa Glagah hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai dan mempunyai, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Glagah, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Glagah baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 12 tahun (SD, SMP, dan SLTA), sementara untuk pendidikan tingkat perguruan tinggi berada di tempat lain yang relatif jauh. Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Glagah yaitu melalui pelatihan dan kursus.

d. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Glagah Rp. 50.000 yang mana secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Glagah dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian/pertambakan, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 596 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 1113 orang,

yang bekerja di sektor industri 41 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 45 orang.

Dengan adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencharian.

Tabel 3 Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No.	Mata Pencharian	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian/Pertambakan	596	40,4
2.	Jasa/Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	151	
	2. Jasa Perdagangan	42	
	3. Jasa Angkutan	20	
	4. Jasa Ketrampilan	20	
	5. Jasa Lainnya	6	55,7
3.	Sektor Industri	41	1,8
4.	Sektor lain	5	2,1
Jumlah		881	100

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJMDes Desa Glagah

2015-2019) 2019

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Glagah masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 134 orang dari jumlah angkatan kerja

sekitar 3.794 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Glagah. (Dokumen RPJMDes Desa Glagah 2015-2020).

e. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Glagah, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum. Berkaitan dengan letaknya yang berada di Jawa Timur dimana suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Glagah. dalam kegiatan agama misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lain sebagainya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

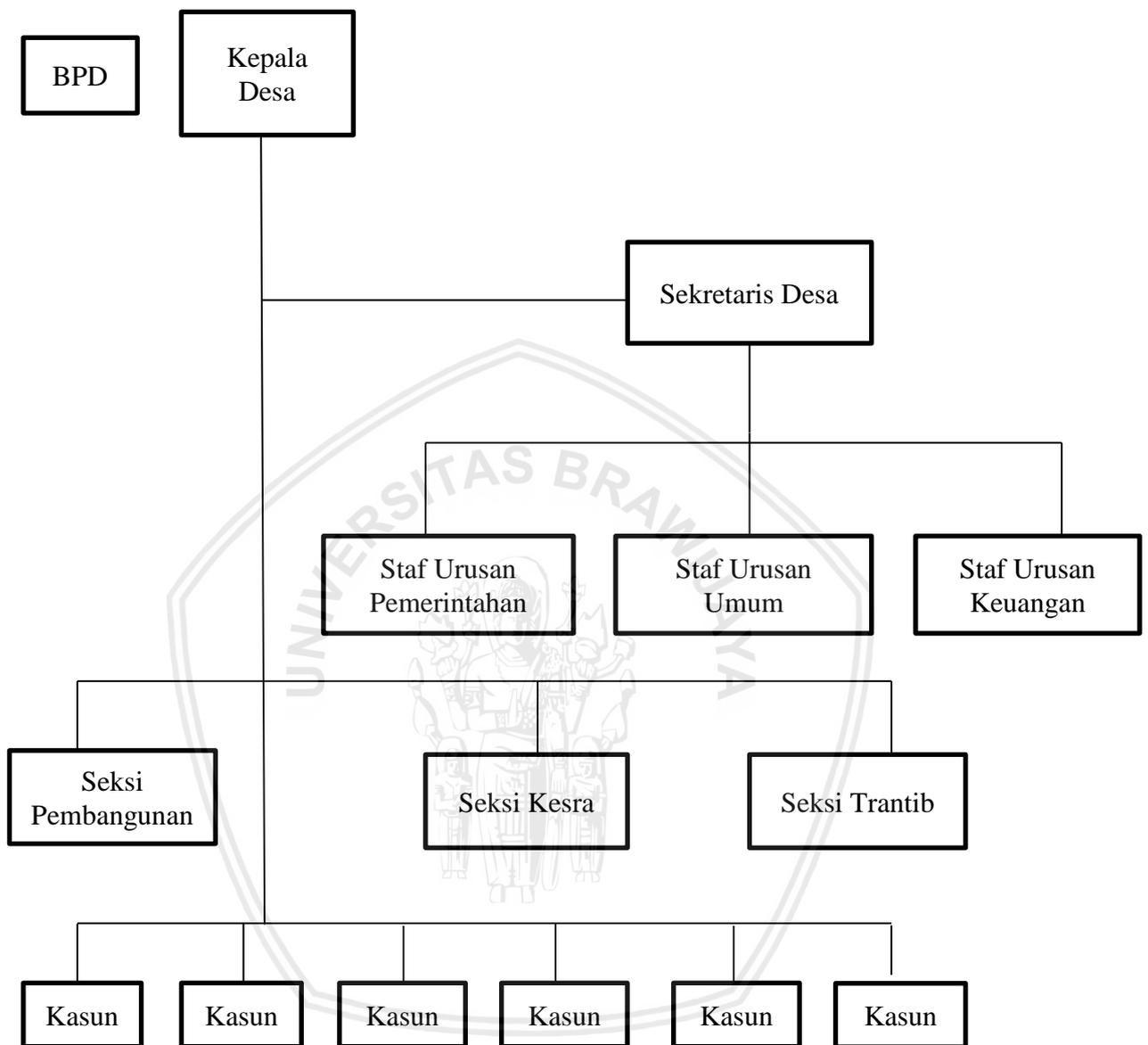
Masyarakat dengan semakin terbukanya terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Glagah. dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Glagah. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya

berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

f. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pemerintah desa dimulai dari adanya keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Glagah memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Padukuhan (Rukun Warga; RW) terbentuk. Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Glagah tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut :





Gambar 7 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Glagah

Sumber : RPJMDES Desa Glagah 2015-2020 (2019)

Tabel 4 Nama-nama Perangkat Desa Glagah

No.	Nama	Jabatan
1.	Abdul Qohar S.Pd	Kepala Desa
2.		Sekretaris Desa
3.	Lilik Hariani	Staf Urusan Pemerintahan
4.	Ah. Hasbullah	Staf Urusan Kesra
5.	Harno	Staf Urusan Umum
6.		Seksi Ekbang
7.	Sumardi	Kasun Glagah Kulon
8.	Khoirul	Kasun Glagah Masjid
9.	Mulyono	Kasun Glagah Pasar
10.	Sugeng	Kasun Dukuan
11.	Khayat	Kasun Senden
12.	Sunardi Rusdiana	Kasun Podo

Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen RPJMDes Desa Glagah 2015-2019) 2019

Pada table diatas dapat dilihat dari susunan organisasi yang terdapat pada Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah seorang Kepala Desa, seorang Staf Urusan Pemerintahan, seorang Staf Urusan Kesra, Staf Urusan Umum, dan enam kasun yang membantu perangkat desa dalam melakukan pekerjaan mengurus desa. Sedangkan untuk Sekretaris Desa dan Seksi Ekbang mengalami kekosongan jabatan. Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri mempunyai hak, wewenang dan kewajiban dibidang pemerintahan yaitu keputusan Kepala Desa, bersama BPD menetapkan Peraturan Desa, menetapkan dan melaksanakan APBDes setelah mendapat persetujuan dari BPD.

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

1. *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

a. Tipologi Inovasi dalam melakukan pembangunan desa

Tipologi inovasi memang diperlukan dalam melakukan pembangunan desa, karena tipologi inovasi mencakup berbagai hal dari inovasi untuk dapat menjalankan inovasi di dalam suatu pembangunan desa terutama dalam pemecahan suatu masalah. Poin didalam tipologi inovasi ini akan berpengaruh terhadap setiap pembangunan yang dilakukan di Desa Glagah. Tipologi inovasi akan membantu dalam menemukan berbagai cara inovasi untuk kemajuan desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Karena perlu diketahui Desa Glagah merupakan pusat administratif dari Kecamatan Glagah dan sepatutnya menjadi tolak ukur dari desa-desa yang ada di Kecamatan Glagah. Untuk itu Desa Glagah harus menjadi contoh dalam membangun desa. Karena dalam membangun Desa Glagah juga memerlukan inovasi agar dapat mewujudkan harapan dari pembangunan di Desa Glagah. Dalam pembangunan saat ini perangkat Desa Glagah juga sudah memberikan progress yang baik terhadap pembangunan di Desa Glagah. Hal ini sendiri disampaikan dan diperjelas oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah yang mengatakan :

“Keinginan kami juga seperti itu menjadikan Desa Glagah menjadi desa yang maju dengan terus berinovasi dalam menjalankan program kerja. Lha ini dibuktikan yang sekarang Desa Glagah sudah dikategorikan menjadi desa maju kalau yang menurut idm (indeks desa membangun tahun 2019 ini glagah itu masuk kategori desa maju jadi setelah berkembang masuk desa maju, akhirnya glagah satu satunya di kecamatan glagah dan ini kemarin seleksi lomba desa kabupaten hasil presentasi kemarin kita masuk 3 besar, 3 besar kabupaten setelah itu visitasi (kunjungan) mencocokkan dengan yang

disampaikan melalui presentasi tersebut dengan yang ada di desa akhirnya glagah dapat juara satu tingkat kabupaten, lha ini rencananya mau mewakili ke tingkat provinsi”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 11.30 WIB)

Kepala Desa Glagah menyatakan Desa Glagah dalam pembangunannya mengambil sebuah langkah yang baik berkat inovasi yang dilakukan oleh jajaran Perangkat Desa Glagah. Didalam tipologi inovasi terbagi menjadi 5 Inovasi yang akan membantu dalam melakukan pembangunan antara lain ; inovasi produk layanan, inovasi proses, inovasi kebijakan, inovasi metode pelayanan, dan inovasi sistem. Dari ke lima tipologi tersebut dimaksudkan untuk menjadi suatu acuan agar proses inovasi yang dijalankan dalam pembangunan bisa mencapai tujuan dari pembangunan tersebut. Karena dalam suatu inovasi untuk melakukan pembangunan desa nampaknya sudah menjadi sebuah acuan dari proses pembangunan itu sendiri, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara non fisik dan pembangunan tersebut dilakukan dengan cara bertahap. Karena inovasi sendiri menjadi tolak ukur dari perencanaan pembangunan yang nantinya akan dilaksanakan, apabila inovasi yang dimiliki oleh pemerintahan desa memiliki visioner yang baik, maka pembangunan yang dihasilkan pun memberikan manfaat yang efektif. Apalagi desa memiliki kewenangan otoritas melakukan suatu pembangunan, dan kewenangan dalam mengelola dana yang didapat desa. Oleh karena itu meningkatkan inovasi dari pembangunan diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri melalui program yang akan diterapkan.

1. Inovasi Produk Layanan

Setiap Desa memiliki sesuatu produk atau layanan yang diunggulkan dalam program kerja yang nantinya dicanangkan oleh pemerintahan desa. Peran dari perangkat desa dalam menawarkan produk layanan juga sesuai dengan produk layanan yang dimiliki desa, dalam arti pemerintahan desa hanya menawarkan suatu inovasi yang sudah dimiliki oleh desa, sehingga dengan begitu masyarakat desa mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Produk layanan disini dapat diartikan sebagai fasilitas dari pemerintah untuk ditujukan pada masyarakat dengan suatu layanan yang akan digunakan oleh masyarakat melalui penawaran dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Bapak Said selaku kepala Bidang Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan :

“Dalam menawarkan Produk layanan terkait dengan desa Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukannya dengan cara memfasilitasi terkait dengan adanya lembaga pengembangan pasar desa, dengan adanya badan usaha milik desa (Bumdes)”. (Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tanggal 28 Maret 2019 pukul 09.30 WIB).

Memang produk atau layanan yang ditawarkan oleh pemerintahan saat ini ialah melalui Bumdes, yang mana bumdes sendiri merupakan badan usaha milik desa dan bergerak dibidang usaha desa dengan menawarkan berbagai macam produk. Pengelolaan Bumdesa sekarang sudah dapat dilaksanakan di desa maupun kelurahan se kabupaten Lamongan, karena di Kabupaten Lamongan diwajibkan untuk mengelola bumdesa dan membentuk bumdesa karena itu sudah diatur dalam undang-undang juga. Di kabupaten Lamongan sudah diterbitkan dalam PERBUP (Peraturan Bupati) Nomor 21 tentang Pendirian, Kepengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan agar kepala kecamatan

dan kepala desa bisa memahami tentang pentingnya badan usaha milik desa, oleh sebab itu para perangkat kecamatan maupun desa menjadi pengawas langsung dari kegiatan Bumdes. Akan tetapi di dalam prosesnya bumdes seutuhnya digerakan oleh desa dengan produk atau layanan dari setiap desa yang akan ditawarkan pada masyarakat, dan hal ini kembali lagi oleh bagaimana desa tersebut mengelolanya dengan cara menggali potensi desa dan dikembangkan serta di wadah dalam bumdes. Badan usaha milik desa memiliki 4 kategori yaitu, kategori perintis, berkembang dan maju. Hal itu telah disampaikan sendiri oleh Pak Said selaku kepala bidang lembaga ekonomi masyarakat desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

“Kalau masih tahap awal itu kita klasifikasikan masih perintis, kalau sudah diatasnya itu sudah berkembang, diatasnya lagi sudah maju. Kalau perintis itu, usahanya masih 1 unit usaha, seperti yang mengelola usp (unit simpan pinjam) kalau sudah 2 unit usahanya itu sudah berkembang, kalau sudah maju sudah mengelola unit usaha 3 keatas. Tapi contoh sementara ini kebanyakan di lamongan masih berkembang itu tapi harus kita gerakkan terus. Baik bumdesnya atau pengurus”.(Wawancara di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 28 Maret 2019 pukul 09.45 WIB)

Dengan diwajibkannya Badan usaha milik desa, maka Desa Glagah juga termasuk di dalamnya dan Desa Glagah sendiri telah membentuk serta melakukan pengelolaan terhadap bumdes. Di Desa Glagah salah satu produk layanan dalam inovasi yang ditawarkan perangkat desa ialah dengan adanya kios pasar yang dikelola oleh Bumdes. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah :

“Sementara ini unit usaha yang ada di desa contoh pasar ada sewa kios dan sebagainya juga kita sampaikan pada masyarakat, barangkali ada yg mau menyewa dengan harga berapa-berapa, ini kan suatu produk inovasi desa yang dikelola oleh Bumdes, dan ada persewaan

untuk pertokoan kios yang ada di pertigaan tugu bandeng, jadi akses ini diberikan kepada masyarakat terutama yang menjadi penduduk desa yang lebih diutamakan, setelah itu penduduk luar Desa Glagah". (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 11.35 WIB)

Suatu produk atau layanan yang dimiliki desa tersebut akan ditawarkan pada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada kepala dusun melalui rapat antar dusun dan mensosialisasikannya melalui jama'ah islamiyah yang ada di Desa Glagah. Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah sendiri juga mengatakan bahwa :

"Melalui dusun (rapat-rapat yang ada didusun), jama'ah yasin dan sebagainya, kan ada itu. Jadi medianya melalui pertemuan ibu-ibu dan musyawarah di dusun program ini disampaikan. Setiap dusun diberitahu, jadi ya kita keliling dari dusun ke dusun kan ada 6 dusun". (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 11.40 WIB)

Sosialisasi dari perangkat desa cukup inovatif dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat desa, karena sesuatu yang ditawarkan oleh perangkat desa dalam mensosialisasikannya juga dengan cara yang sangat beragam, melalui tanggapannya Pak Khairul Hadi mengatakan bahwa:

"Gini mas, kalau untuk sosialisasi warga desa ke masyarakat beragam, misalkan kalau ada yang terbaru ini kan ada program pamsimas tepatnya di dusun glagah masjid, ini sosialisasinya cukup inovatif sekali karena mengundang warga dusun yang kebetulan ketempatan program tersebut ini juga didampingi oleh 2 lembaga yaitu BPD dan LPM jadi sangat merangkul semua pihak, jadi ndak asal temple pengumuman ataupun dari mulut ke mulut, tapi sudah terkoordinir melalui 2 lembaga tersebut kemudian disampaikan ke masyarakat. Yang saya rasakan dari pamsimas tersebut yang saat ini sudah selesai pembangunannya ini sangat bermanfaat sekali terutama saat kemarau, karena pamsimas sendiri kan mengutamakan kebutuhan air bersih masyarakat, semoga kedepannya mungkin ada pengembangan lain dari pengembangan program air bersih tersebut, misalkan yang saat ini hanya sekedar air bersih mandi dan cuci, mungkin kedepannya harapan kami sebagai masyarakat bisa dikelola lagi menjadi air minum bagi masyarakat desa glagah". (wawancara di Rumah kediaman Bapak Khairul Hadi tanggal 19 Mei pukul 23.55 WIB)

Produk atau layanan dari desa juga harus dirasakan pada masyarakat. Layanan dari desa sudah membuat masyarakat cukup puas. Pak Khairul Hadi selaku warga Desa Glagah juga memberikan pernyataan tentang produk atau layanan dari desa yang mengatakan:

“Kalau pelayanan disini desa sudah mempunyai yang namanya badan usaha milik desa, bumdes. Yang saya tau ini pengelolaannya satu pintu yakni di bumdes itu, jadi bumdes ini menaungi kegiatan usaha desa yang terbagi dari beberapa kelompok jadi misalkan ada apa namanya penyewaan hentractor ini jadi si penyewa tersebut langsung ke kantor bumdes desa glagah lain lagi dengan untuk koperasi atau simpan pinjam yang saat ini masih sebatas untuk kalangan ibu-ibu saja itupun pelayanannya sangat bagus sekali karena apa karena setiap bulan atau setiap minggu ada kegiatan jadi sudah terjadwal jadi untuk pelayanan simpan pinjam perempuan di simpan perempuan ini ada namanya kopwan ada arisan ibu ibu pkk yang semula saya tau yang semula anggotanya cuman perdusun ini ada 20 orang mungkin sekarang jadi 50 orang, lha ini sangat membantu sekali bagi kaum ibu ibu untuk masalah simpan pinjam perempuan tadi.” (Wawancara di Rumah kediaman Bapak Khairul Hadi tanggal 20 Mei pukul 00.15 WIB).

Inovasi produk atau layanan desa bisa dikatakan perangkat Desa Glagah aktif dalam memberikan sosialisasi terkait dari produk atau layanan yang dimiliki oleh Desa Glagah. Layanan yang dimiliki desa tersebut sudah tersampaikan pada masyarakat, mengingat pelayanan pada masyarakat desa ialah suatu hal yang penting. Akan tetapi dengan adanya produk layanan melalui bumdes tersebut, bukan berarti desa *stuck* pada produk layanan yang sudah ada di dalam Bumdes tersebut, pemerintah desa harus terus berinovasi dalam melakukan produk layanan terhadap masyarakat desa, terlebih pada kebutuhan desa.

2. Inovasi Proses

Dalam hal melakukan suatu program pembangunan pastilah ada suatu implementasi dari program tersebut. Sebelum adanya suatu implementasi

pembangunan, pemerintah desa memiliki adanya suatu inovasi proses yang mana membantu dalam menjalankan suatu pembangunan yang dilakukan. Di Desa Glagah proses inovasi ini juga berlangsung, proses dimana perangkat desa mencoba berinovasi dalam mengembangkan desa. Beberapa pembangunan dan program mulai dilaksanakan oleh perangkat desa dan menjadi fokus dalam pengembangan Desa Glagah. Untuk saat ini perangkat Desa Glagah berfokus dalam melakukan pembangunan pariwisata di Desa Glagah. Ini merupakan suatu bentuk pengembangan Desa Glagah melakukan inovasi proses, yang mana di Desa Glagah sendiri tidak memiliki potensi wisata yang menjual, namun dengan berbagai upaya semua itu dilakukan yang bermodal potensi lokal seadanya. Berikut pernyataan Pak Kohar selaku Kepala Desa mengenai inovasi proses yang sudah berjalan dalam mengembangkan Desa Glagah :

“Untuk desa glagah ini kan melirik dusun senden, ini kan kalau bisa disana dibuat ada kawasan wisata yang mulai hari-hari ini sudah fokus kesana untuk disana ditanami berbagai jenis buah. Terus ini juga rencananya dilakukan untuk tpt, tpt itu tembok penahan tanah di tepian sungai plengsengan dan tentunya disana itu kan keunggulannya dekat dengan sungai tidak jauh dari jalan besar terus suasana udaranya masih segar dan pemandangannya bagus, lha ini rencananya seperti itu jadi teman teman kami ajak semua untuk fokus kesana jadi perangkat desa dengan masyarakat bersama sama untuk memulai untuk ini, kita tanami berbagai jenis buah disana sudah mulai jalan didusun senden rencananya. Jadi ini berbaur antara masyarakat dengan perangkat desa”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 11.45 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas, jajaran perangkat Desa Glagah berinovasi di sektor pariwisata dan sedang dalam tahap proses penyusunan. Dengan adanya inovasi proses yang dilakukan oleh pemerintah Desa Glagah dapat dikatakan bahwa pemerintah desa mampu melihat adanya peluang di sektor wisata yang terdapat di

Desa Glagah. Keunggulan dari potensi lokal memang tidak begitu menjual, akan tetapi dengan adanya inovasi proses pembangunan wisata di Desa Glagah mengalami sebuah peningkatan. Karena proses inovasi dalam mengembangkan Desa Glagah di sektor wisata juga diperhitungkan, mengingat Desa Glagah ini merupakan Desa yang dialiri Sungai Anak Bengawan Solo yang mana ini akan dijadikan modal dalam membangun suatu wisata yang terdapat di Desa Glagah. Karena hal ini juga berpengaruh terhadap aliran air sungai, karena pada musim kemarau dikhawatirkan sungai akan mengering dan wisata akan menjadi tidak produktif. Akan tetapi menurut Pak Kohar selaku Kepala Desa itu sekarang bukan menjadi soal, Pak Kohar sendiri menjelaskan :

”Lha ini kan gini, setelah bgs (bendungan gerak sembayat ini jadi, ini dimungkinkan tidak ada air asin lagi, lha untuk jangka waktu yang masih sekarang ini masih belum bisa dirasakan, karena sudetan belum selesai. Sudetan yang berada di daerah kalitengah yang rencananya kan ada sudetan langsung. Lha rencananya air sungai yang ada di bgs kan ditahan jangan sampai keluar, air asinnya gabisa masuk, air tawarnya yg langsung masuk dari bengawan solo, itu melalui sudetan di kalitengah itu untuk masuk ke kali blawi, ini kan dimungkinkan air disini airnya tetep ada, seperti itu dan ini jangka panjang”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 11.50 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas pengembangan wisata di Desa Glagah masih belum bisa terealisasi dengan sempurna. Karena faktor utama dari pembangunan belum terselesaikan dengan tuntas, tapi hal ini sudah berjalan baik di dalam proses membangun wisata di Desa Glagah. Wisata di Desa Glagah dengan mengandalkan aliran sungai dan tepian sungai sudah diupayakan dengan baik. Hal ini tinggal menunggu waktu dan tahapan selanjutnya, dengan adanya wisata di Desa Glagah

maka pemerintah Desa Glagah sudah melakukan inovasi proses yang sudah dilakukan.

Proses Inovasi yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut sesuai dengan musyawarah untuk melakukan implementasinya. Banyak hal yang dilakukan dalam melakukan proses inovasi di desa, perangkat desa selalu berupaya dalam hal melakukan implementasi tersebut juga tidak semena-mena, akan tetapi perangkat desa dalam melakukannya merujuk pada hasil musyawarah kepada masyarakat. Hal ini di katakan Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah :

“Implementasi dari beberapa hal terkait dengan hasil musyawarah misalnya, ada suatu program ini lalu ada tindak lanjut di masyarakat. Ini mengajak serta tokoh masyarakat untuk bersama sama mensukseskan program yang sesuai rencana yg sudah diprogramkan oleh desa dan bersama sama dengan masyarakat untuk menciptakan ini, dan biasanya kan ditindaklanjuti didusun dengan harapan tercipta suasana dusun yang semakin tertata sesuai dengan harapan masyarakat”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 11.55 WIB).

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari program-program pemerintah Desa Glagah untuk menciptakan suasana desa yang tertata. Pemerintah Desa Glagah juga melakukan inovasi proses melalui program-program yang dihasilkan dari musyawarah desa. Inovasi proses yang berjalan di Desa Glagah tidak hanya program pengembangan wisata.

Adapun hasil inovasi proses dari musyawarah desa di Desa Glagah yang berjalan dengan rutin yaitu adanya pengelolaan sampah yang ada di Desa Glagah dan perangkat Desa Glagah sendiri mensupport adanya gerakan ini, hal tersebut seperti yang ungkapkan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa :

“ya pengolahan sampah, desa akhirnya mensupport dari sampah yang dikelola oleh anak-anak dengan cara mensupport kendaraan roda tiga,

kita belikan yang baru dan itu merupakan inventaris desa, tapi penggunaannya oleh dusun makanya di kendaraan roda tiga itu bunyinya barang milik pemerintah desa glagah, jadi itu bentuk ada program disambut oleh masyarakat kemudian kita support dengan kendaraan akhirnya bisa berjalan (memberi fasilitas) jadi mengimplementasi dari program itu. Itu sudah ada 4 dusun yang sudah berjalan". (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan pemaparan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Inovasi proses yang terjadi di Desa Glagah merupakan sesuatu yang inovatif, dimana perangkat desa memberi program dan menampung aspirasi yang nantinya akan direalisasikan setelah adanya musyawarah desa. Inovasi proses yang berjalan di Desa Glagah tidak hanya dari pemerintah desa melainkan masyarakat juga berperan dalam proses inovasi yang sedang berlangsung dan pemerintah desa beserta masyarakat saling bahu membahu dalam melakukan proses pengembangan Desa Glagah menjadi desa yang aktif dalam melakukan proses pembangunan dan pemberdayaan di Desa Glagah.

3. Inovasi Kebijakan

Inovasi kebijakan adalah sesuatu yang menghubungkan antara perencanaan dari pembangunan dan pemberdayaan terhadap suatu program yang akan diterapkan. Dalam langkahnya, pemerintah desa membuat program yang nantinya akan dilaksanakan dalam tujuan membangun desa, tidak hanya perangkat desa saja yang menginisiasi kebijakan yang diterapkan di desa akan tetapi pemerintah kabupaten juga turut andil dalam hal ini. Seperti yang diungkapkan Pak Kohar selaku kepala Desa Glagah :

"Kemarin baru kita bicara masalah inisiasi di program kabupaten, ini Glagah masuk di kampung KB, kemudian Glagah itu juga masuk di

Desaku Pintar itu program-program dari kabupaten yang keperuntukannya untuk desa, selama ini masih belum kelihatan jelas dari hasil program kabupaten yang dicanangkan di Desa, namun ini kan membutuhkan waktu tidak serta merta dengan program ini terus kelihatan”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.05 WIB)

Proses inisiasi kebijakan yang datang dari pemerintah Kabupaten Lamongan sifatnya hanya memfasilitasi terkait kebutuhan dari masyarakat desa melalui program kampung kb, melalui program desaku pintar dan sebagainya. Jadi, secara terus menerus desa juga menerapkan program-program dari kabupaten yang tentunya banyak bermanfaat untuk Desa Glagah. Tidak hanya kebijakan dari pemerintah kabupaten yang berjalan, namun program dari pemerintah desa sendiri terutama dalam menginisiasi pengelolaan potensi lokal yang dimiliki oleh Desa Glagah, dimana potensi Desa Glagah dengan 201 hektare lahan itu terdiri atas lahan sawah tambak dan 70 persen mata pencaharian dari penduduknya sebagai petani tambak. Program yang dibuat oleh pemerintah Desa ini terkait dengan pengelolaan hasil dari panen, karena untuk saat ini pemerintah Desa Glagah belum membentuk usaha bersama, seperti yang dikatakan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah bahwa :

”kemungkinan akan dibuat, karena pada akhirnya nanti begini kita akan bentuk kelompok usaha bersama dan modalnya nanti kita juga akan support modal berikut alat. Ini sudah mulai kalau yang usaha kripik sukun, kripik pisang karena usaha ini ada kelompok usaha bersama, kita support kita mintakan bantuan ke disperindag dibantu alat, tapi belum banyak”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.10 WIB)

Meski belum adanya pengelolaan secara swadaya, akan tetapi hasil yang didapat dari pertanian tambak sudah cukup mengatasi masalah ekonomi. Hal ini

juga menjadi pekerjaan rumah bagi perangkat desa dalam membuat suatu kebijakan atau program yang nantinya bisa membuat usaha bersama, karena hal ini juga merupakan sebuah peluang bagi Desa Glagah dengan memaksimalkan potensi yang ada dan nantinya juga akan bermanfaat bagi masyarakat desa. Pengolahan hasil panen juga memberikan dampak positif bagi harga jual dari hasil tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa yang menyatakan :

“Lha dari potensi itu tentunya desa glagah untuk masalah ekonomi ini terbilang ya Alhamdulillah intinya bisa mencukupi kebutuhan sendiri melalui budidaya ikan dan satu kali tanam padi, namun belum dikelola dan proses penjualannya masih belum ada pengolahan semacam kalau ikan itu diolah menjadi berbagai menu makanan dan sebagainya kan tentunya nanti hasil jualnya akan lebih tinggi jika dijual ikan segar. Mulai sedikit demi sedikit ada pengolahan mungkin otak-otak, bandeng tanpa duri ya seperti itu. Karena belum ada kelompok usaha bersama yang untuk menangani itu belum, jadi masih belum terealisasikan”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.15 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas, pemerintah Desa Glagah sudah merancang adanya kebijakan yang akan dilakukan dalam menangani potensi lokal sebagai usaha. Melihat dari segi Inovasi kebijakan yang ada di Desa Glagah, perangkat desa tanggap dalam menginisiasi suatu kebijakan maupun melihat peluang dari lapangan yang nantinya bisa dijadikan program dalam waktu dekat ataupun jangka menengah. Dengan adanya hal tersebut dapat dilihat dari proses penyusunan kebijakan terhadap pembangunan di desa yang merupakan awal dari inisiasi pembangunan di Desa Glagah. Runtutan proses dalam penyusunan kebijakan juga dijabarkan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah, dengan memberikan penjelasan sebagai berikut :

”Jadi semuanya kita awali melalui musyawarah mulai dari tingkat dusun untuk perencanaan program ya, program pembangunan dimulai dari perencanaan dari dusun, dusun akan dibawah untuk musdes lha kemudian di musyawarah desa nanti akan muncul prioritas jadi disusun skala prioritas kemudian dari program-program usulan yang dari dusun muncul nanti akan ada skala prioritas maka nanti akan tau apa saja yang bisa dilaksanakan pembangunan baik bidang pembangunan maupun pemberdayaan dari apa keuangan yang ada”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.15 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat inisiasi pembangunan yang dilakukan di Desa Glagah bukan serta merta timbul dari asumsi pribadi atau golongan, tapi dengan hasil musyawarah yang nantinya akan membuat suatu skala prioritas dari desa dan menjadikannya program pembangunan yang akan dicanangkan. Karena suatu program berjalan itu juga membutuhkan dana, dan dana tersebut berasal dari berbagai sumber. Maka dari itu disamping inisiasi program yang inovatif diimbangi dengan adanya sumber dana. Pak Kohar selaku Kepala Desa juga memberikan contoh terkait sumber dana dan penggunaannya, seperti ini pendapat beliau :

“Contoh dari sumber dana penghasilan asli desa kemudian ada dana transfernya itu dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak yaitu kemudian bantuan keuangan dari kabupaten atau bantuan keuangan provinsi itu semuanya merupakan dana transfer keperuntukkannya itu nanti akan disusun bersama melalui musyawarah desa jadi tanpa dengan sendirinya itu dibangun ini harus begini-begini tanpa melalui musyawarah desa kita tidak pernah melakukan seperti itu, karena untuk kepentingan bersama”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.20 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas suatu inovasi kebijakan yang akan diterapkan tidak langsung dibentuk begitu saja, sebelum itu juga harus menilik

sumber dana yang dimiliki oleh desa, karena bagaimanapun sumber dana ialah peran yang vital. Karena segala sesuatu terkait inisiasi kebijakan yang inovatif dipertimbangkan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Akan tetapi dalam inovasi kebijakan terdapat skala prioritas yang akan dilakukan, skala prioritas tersebut ada 2 hal, yaitu sektor pemberdayaan dan sektor pembangunan. Di Desa Glagah skala prioritas tersebut ialah pelatihan lifeskill yang dibuat oleh perangkat desa untuk masyarakat desa Glagah dalam meningkatkan kreativitasnya. Adapun penjelasan dari Pak Kohar selaku Kepala Desa terkait hal ini :

”Kalo pemberdayaan berupa pelatihan lifeskill, pelatihan ini untuk pembuatan makanan kecil yang tujuannya nanti agar bisa berusaha sendiri membuat *home industry*. Kemudian pelatihan pengolahan ikan menjadi berbagai makanan dalam rangka untuk menggali potensi itu. Hal ini guna meningkatkan produksi dari potensi desa tadi agar memiliki nilai jual yang lebih baik. Sudah kita laksanakan untuk pelatihannya, kemudian pelatihan pengolahan sampah, karena sampah kan sekarang hanya dibuang ketempat sampah ada tempat pembuangan sampah akhir itu, kemarin kita coba pengolahan sampah dengan bfs (black fly soldier) itu ngolah sampah dengan lalat hitam yang diolah jadi maggot istilahnya, maggot itu seperti set, itu cepet kemarin ada kandangnya kandang lalatnya yg hijau, seperti itu pelatihan-pelatihannya sudah kita laksanakan”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.25 WIB)

Menurut pemaparan dari Kepala Desa Glagah dalam sektor pemberdayaan di Desa Glagah mengedepankan hal yang menunjang dan meningkatkan produktifitas dari potensi desa untuk di kelola dengan efektif dan efisien. Dengan melalui pelatihan yang dilakukan di Desa Glagah. Sedangkan dalam sektor pembangunan ini masih dalam hal memperbaiki infrastruktur, seperti yang dijelaskan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah :

”Kalau pembangunan, skala prioritasnya masih dibidang infrastruktur jalan rabat ke lahan budidaya, jadi membangun jalur

produksi untuk akses yg lebih baik dan memudahkan untuk ketika panen dapat cepet nyampek ke tujuan karena udang kan harus cepet nyampek ke tujuan kalo ndak kan harganya turun. Sudah berjalan tinggal sedikit”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas tujuan dari skala prioritas pembangunan jelas, untuk memudahkan akses di Desa Glagah dengan meningkatkan sarana dan prasarana di bidang infrastuktur. Pembangunan di bidang infrastruktur ini juga dirasakan oleh warga Desa Glagah. Oleh karena itu inovasi kebijakan dalam sektor pembangunan sudah dijalankan. Pak Khairul Hadi Masyarakat desa yang saya tanyai tentang hal ini menyatakan :

“Bahwa dari desa yang saya tau beberapa inovasi dalam pembangunan desa ada pembangunan fisik dan pemberdayaan dan juga ada simpan pinjam. Yang pertama fisik ini, didanai dari add tahun 2019 ini ada bebrapa pembangunan fisik, jalan rabat beton terbagi menjadi 2 macam yakni jalan rabat beton produksi dan jalan rabat lingkungan, jalan rabat beton ini sangat bermanfaat sekali terutama dalam produksi yang menghubungkan persawahan dan bisa meningkatkan produktifitas petani dalam pengangkutan ikan atau padi didaerah glagah. Yang kedua, jalan produksi yang berada di jalan makam ini juga sangat bermanfaat sekali, ketika masyarakat glagah ingin ke makam atau ada sesuatu yg dimakam itu”. (wawancara di kediaman rumah Pak Khairul Hadi tanggal 20 Mei pukul 00.20 WIB)

Dari pernyataan Pak Khairul selaku masyarakat Desa Glagah sudah mengakui bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Glagah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, karena pembangunan infrastruktur sudah dilakukan dengan produktif. Dengan adanya skala prioritas pembangunan ataupun pemberdayaan ini maka bisa dikatakan Desa Glagah sudah menjalankan inovasi kebijakan yang sudah diterapkan. Dalam hal ini juga skala prioritas cukup dirasakan

oleh masyarakat, karena memang sifat dari skala prioritas ialah kebutuhan yang diperlukan warga Desa Glagah.

4. Inovasi Metode Pelayanan

Pelayanan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, dimana pelayanan tersebut menjadi suatu bentuk berjalannya pembangunan di desa, untuk itu metode pelayanan yang digunakan dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa sangatlah beragam. Di Desa Glagah pelayanan yang sudah diberikan cukup sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa terutama dalam bidang sosial dan administrasi. Hal ini telah disampaikan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa sebagai berikut :

”kalau pelayanan di bidang sosial dalam bidang administrasi pekantoran insyaAllah sudah cukup namun bagaimanapun sesuai dengan era jaman yang sudah maju kita masih merasa kurang, kurangnya dibidang digital misalnya. digitalisasi kurang produktif, jadi kita punya internet cuma belum bisa dijangkau sampai masyarakat, fungsinya masih belum bisa kita kembangkan kesana, lha mestinya kita sudah punya websitenya tapi tidak keramut akhirnya kan ngga bisa, mestinya ini kan kita punya website tinggal dibuka sama masyarakat website desa glagah udah ketemu muncul disitu apa aja profil dan sebagainya, ini yang masih kurang dari kita. Jadi, Go public melalui internet masih belum tapi kalau melalui sosialisasi dusun dusun sudah ada”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.30 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas pelayanan di Desa Glagah belum bisa diakses secara modern. Meski belum sepenuhnya diakses oleh masyarakat melalui media digital, itu tidak mengurangi transparansi dari perangkat desa. Karena pelayanan yang berada di Desa Glagah masih bersifat tradisional yang mana dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat melalui dusun-dusun yang berada di Desa Glagah. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan yang sudah merata

disetiap dusun di Desa Glagah, sehingga tidak menjadi persoalan yang penting ketika digitalisasi belum dilakukan dengan baik. Meski belum adaya digitalisasi tidak mengurangi pemerataan pembangunan di Desa Glagah, sehingga pembangunan ini tidak mengalami ketimpangan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah :

”Kalau pembangunan sudah merata, artinya sudah dilakukan oleh ada namanya tim pelaksanaan pembangunan, namanya timlak itu perdusun sudah jalan, mulai dari dusun glagah kulon sampai podo itu setiap tahun semuanya bangun, jadi kalau sekarang itu tidak membangun desa tapi desa membangun. Kalau desa membangun kan itu bersama perangkat bersama sama membangun desa itu namanya desa membangun, kalau membangun desa beda lagi. Kalau dulu yang top down sekarang bottom up”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.35 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas metode pelayanan di Desa Glagah terkoordinir dengan baik, maka tidak bisa dipungkiri jika pembangunan di Desa Glagah merata. Di Desa Glagah proses pelayanan juga tidak hanya berpacu pada perangkat desa atau kepala dusun, akan tetapi melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan. Adapun runtutan dari proses pelayanan yang dilakukan di Desa Glagah. Hal ini dijelaskan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa seperti ini :

”Jadi melibatkan masyarakat sepenuhnya dalam hal pelaksanaan pembangunan, kemudian hal yang terkait dengan segi social kemasyarakatan ini perangkat desa melaksanakan tugas kesehariannya membantu sepenuhnya pada masyarakat. Contoh jika ada bantuan sosial, bantuan sosial jika ada bencana atau mungkin jika ada bencana bantuan social dari dulu ada rastra, raskin kalau dulu ya, ya ini memberikan akses itu kemasyarakat jadi membagikan sesuai dengan apa daftar sesuai yang sudah masuk di data base itu jadi menyampaikannya langsung. Kemudian untuk pelaksanaan posyandu, posyandu baik posyandu balita maupun lansia ini peran serta perangkat dalam hal menyampaikan program ini kemasyarakat semakin banyak tiap harinya makin banyak jumlahnya makin

meningkat”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.40 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas perangkat Desa Glagah sudah aktif dalam melakukan pelayanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses dari runtutan tersebut juga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, karena sosialisasi terus dilakukan dalam membangun desa. Dimana disini andil dari masyarakat juga penting karena masyarakat dirasa perlu untuk mengetahui arah dari pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Khairul Hadi selaku Masyarakat Desa Glagah berikut pernyataannya :

“Jadi gini mas, sebelum adanya pembangunan fisik yang ada didesa, dari pihak desa ini meminta kepada perangkat desa terutamanya kepala wilayahnya masing-masing atau disebut kasun(kepala dusun) ini mengagendakan yang namanya musdus(musyawahar dusun) dulu jadi didalam musyawahar dusun tersebut kita menggali potensi atau permasalahan ataupun permasalahan tersebut, jadi kita mencari dari musyawahar tersebut kepada warga masyarakat ini apa apa saja yang mungkin bisa terbangun ataupun membangun dalam tahun ini misalkan jadi kita mengundang seluruh warga masyarakat ini perdusun jadi sebelum adanya musyawahar desa ini dilaksanakan musyawahar dusun dulu, nah kemudian dari musyawahar dusun itu kalau sudah ada beberapa poin, beberapa poin namanya pembangunan fisik misalnya ini kemudian dibawah ke musyawahar desa, kemudian di dalam musyawahar desa tersebut ini kan ada yang namanya skala prioritas ataupun bukan. Misalkan ada jembatan yang rusak lha ini skala prioritas yang harus segera terbangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat misalkan, ini kemudian di dahulukan ataupun jalan-jalan produksi yang masih belum terbangun ini mungkin juga bisa masuk skala prioritas yg didahulukan, jadi prosesnya seperti itu. Lha bukan sampai berhenti didesa saja ini juga ada prosesnya lagi yang saya tau setelah ada musyawahar didesa ini kan dicari lagi, dicari pembangunan fisik yang skalanya besar. Misalkan jembatan penghubung antar wilayah sedangkan jembatan itu sangat besar dan membutuhkan dana yang besar ini bisa di musyawarahkan di tingkat kecamatan dengan desa lain dengan harapan bisa didanai yang besar oleh kabupaten”. (wawancara di kediaman rumah Pak Khairul Hadi tanggal 20 Mei pukul 00.25 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas bisa dilihat bahwa kinerja dari perangkat desa terkait metode pelayanan sudah terkordinir dengan baik. Hal ini bisa diamati dengan melihat proses yang dilakukan oleh perangkat desa serta penyampaian kepada masyarakat desa. Dalam proses memberikan pelayanan Desa Glagah cukup maju untuk pembangunan serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta jajarannya. Karena Desa Glagah sendiri dalam pengelolaan sumber dana yang tersedia maupun melakukan inovasi untuk pembangunan terkordinir dengan baik. Maka dari itu Desa Glagah termasuk dalam kategori Desa maju sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Desa Glagah sebagai berikut :

“Kalau yang menurut idm (indeks desa membangun tahun 2019 ini glagah itu masuk kategori desa maju jadi setelah berkembang masuk desa maju, akhirnya glagah satu satunya di kecamatan glagah dan ini kemarin seleksi lomba desa kabupaten hasil presentasi kemarin kita masuk 3 besar, 3 besar kabupaten setelah itu visitasi (kunjungan) mencocokkan dengan yang disampaikan melalui presentasi tersebut dengan yang ada di desa akhirnya glagah dapat juara satu tingkat kabupaten, lha ini rencananya mau mewakili ke tingkat provinsi”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.45 WIB)

Tidak hanya dikategorikan menjadi desa maju saja, Desa Glagah juga berprestasi dalam membangun Desa, terlebih dalam layanan Bumdes yang mendapat predikat baik. Seperti yang diungkapkan Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah :

”Bumdes pemula nya juara 1 kabupaten, terus lomba desa, lomba desa itu keseluruhan dari apa yang ada di desa, mulai dari pemerintahan segi pelayanan kemudian organisasi mulai dari pkk, karang taruna terus ini posyandu pokoknya kegiatan itu dinilai semua sudah berjalan atau belum dokumentasinya apa ada semua sector dari bidang pemerintahan sampai pelayanan sampai perencanaan pembangunan ternyata sini masuk juara 1 tingkat kabupaten”.

(Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.50 WIB)

Berdasarkan runtutan pemaparan diatas Desa Glagah sudah melakukan visi dan misi dengan baik, karena apa yang dilakukan dalam proses pembangunan terhadap Bumdes menuai keberhasilan. Akan tetapi dengan dikategorikannya Desa Glagah menjadi desa yang maju bukan berarti Desa Glagah tidak mengembangkan lagi inovasinya, karena semakin maju sebuah desa akan semakin banyak persoalan yang didapatkannya. Desa Glagah dalam menuju desa maju mengalami berbagai macam proses untuk itu pelayanan yang ada di Desa terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan dari desa tersebut.

5. Inovasi Sistem

Inovasi sistem adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengatur pola pembangunan yang diperuntukkan dalam membangun desa untuk menjadi lebih baik. Inovasi sistem seringkali dikaitkan dengan kerjasama atau kemitraan antara pihak satu dengan yang lainnya. Di Desa Glagah sendiri setelah melihat pembangunan yang dilakukan, memang belum maksimal karena sumber dana yang terbatas menjadi suatu persoalan yang mendasar. Karena di Desa Glagah tidak menjalin sistem kerjasama dengan pihak lain untuk membantu membangun Desa Glagah sesuai dengan program yang inovatif agar terwujudnya desa yang modern. Memang sistem kerjasama di Desa Glagah dalam menjalin kerja sama kepada aktor-aktor atau pihak yang terlibat dalam pembangunan desa ini belum ada, ini dikarenakan belum adanya jalinan antara Desa dengan pihak swasta. Hal ini diakui oleh Kepala Desa Glagah dengan menyatakan pernyataan sebagai berikut :

”Kalau selama ini belum bisa menjalin dengan pihak swasta namun dalam setiap pelaksanaan kegiatan ini menjalin dengan tokoh masyarakat dalam kaitannya dengan lancarnya pelaksanaan pembangunan. Semua stake holder yang disitu yang ada kan tokoh agama, tokoh masyarakat, rt/rw itu semua kan dilibatkan dalam rangka untuk lancarnya program. Kita juga bentuk tim was tim pengawas jadi tim pengawas pembangunan itu ada sendiri dari bpd, jadi perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan pembangunan ini apa sudah sesuai belum lha ini tugasnya panwas mengawasi kerja dan kinerja dari perangkat desa dan tim lak sudah sesuai belum?, kalau belum sesuai lha dari pihak bpd berhak untuk bertanya kepada kepala desa sesuai dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan itu. Mana kala ada yang kurang benar, jadi dia punya hak untuk bertanya”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 12.55 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan Desa Glagah dalam menjalin sistem pembangunan tidak menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Namun kerjasama justru mengarah kepada pihak *stakeholder* yang dilakukan oleh Desa Glagah menjadi hal yang menguntungkan masyarakat desa, karena masyarakat desa juga harapannya mengelola potensi yang dimiliki Desa. Dengan tidak adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Desa Glagah dengan pihak swasta tidak mempengaruhi perekonomian Desa Glagah, karena dengan program itu pemerintah sendiri sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan. Dan dalam mengelola potensi lokal tidak ada ketimpangan keuntungan jika nanti ketika menjalin kerja sama oleh pihak swasta. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat desa ketika hal itu terjadi, seperti yang diungkapkan Pak Khairul :

“harapan desa ini bisa diatur sendiri ataupun swakelola jadi bukan kontraktual kalau bisa ya swakelola saja”.

Berdasarkan pernyataan Pak Khairul masyarakat ingin menjadi desa yang mandiri dalam mengelola potensi lokal yang dimiliki dengan begitu pembangunan

di Desa Glagah termasuk pembangunan swakelola, dimana pembangunan tersebut dikelola oleh masyarakat desa nya sendiri yang di arahkan oleh pemerintah desa. Dengan begitu inovasi dari system pembangunan tersebut stabil dan konsisten tidak mengalami suatu ketimpangan dalam keberpihakan. Semua dari rakyat dan untuk rakyat, mungkin begitu kiranya system pembangunan yang ada di Desa Glagah. Karena ada faktor dimana belum adanya kerja sama antara pihak swasta dengan perangkat desa.

b. Inovasi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Dalam melakukan pembangunan desa, sumber dana tidak hanya mengandalkan add(alokasi dana desa),dd(dana desa) dan lain sebagainya. Akan tetapi Desa diwajibkan memiliki pendapatan asli daerah, yang mana dengan cara desa menggali potensi lokal dan dikembangkan untuk memperoleh dana segar sebagai uang kas dari desa tersebut. Dengan melakukan sebuah inovasi desa memperoleh dana tersebut, maka dari itu di Desa Glagah dalam meningkatkan PADes (pendapatan asli desa) memanfaatkan Bumdes. Bumdes di Desa Glagah dikelola dengan baik agar dapat memberikan profit pada Desa Glagah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Glagah sebagai berikut :

”Meningkatkan PADes yakni dengan peningkatan pengelolaan Bumdes (badan usaha milik desa) kita punya bumdes itu namanya makmur sejahtera. Lha kita punya 3 jenis usaha, sekarang berkembang jadi 4. Air bersih, sewa hentracktor, kemudian yang satunya lagi persewaan kios pertokoan, trus yang satunya usaha dagang material bahan bangunan. Jadi kita tingkatkan pengelolaan bumdes ini untuk meningkatkan penghasilan/pendapatan asli desa”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.00 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas dengan adanya suatu inovasi dalam meningkatkan PADes (pendapatan asli desa) melalui Bumdes tersebut, yang mana pengelolaannya dilakukan dengan cara menyediakan adanya penyewaan unit usaha cukup membuat program tersebut mampu meningkatkan PADes (pendapatan asli desa). Hal ini juga ditambahkan dalam pernyataan oleh Kepala Desa Glagah sebagai berikut :

”Untuk sementara belum bisa sepenuhnya, namun sudah ada perkembangan, jadi untuk memenuhi kebutuhan PADes untuk meningkatkan PADes sepenuhnya ini masih dalam rangka proses kesana. Karena usahanya belum maksimal”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.05 WIB)

Meningkatkan PADes melalui Bumdes memang belum bisa maksimal mengingat hal itu dalam tahap proses, akan tetapi dengan langkah seperti itu memberikan suatu peluang bagi Desa Glagah dalam meningkatkan PADes yang terdapat di Desa Glagah. Meski dalam tahap perkembangan, program itu berjalan aktif mengingat usaha yang belum maksimal. Hal tersebut dikatakan lagi oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah, seperti ini :

”Ya kan kita bentuk pengurus per unit usaha, jadi perunit usaha ini ada pengelolanya, jadi ada pengelola per unit usaha. Kemudian kita bentuk pengurus bumdesnya, dari hasil bersih untuk hasil pengelolaan perunit usaha setiap bulannya setor ke Bumdes, ya jadi bumdes ini nanti sebagai sumber keuangan yang nanti menjadi penghasilan asli desa ini bumdesnya nanti bisa menyumbangkan ke desa berapa, karena disana bumdes itu dibangun itu merupakan penghasilan dari desa yang dipisahkan, jadi ada presentasinya untuk start up ke desa itu berapa 50 persen atau 70 persen itu kalau dengan adrt 50 persen setornya ke desa dalam rangka untuk menunjang program desa yang tidak bisa didanai oleh dana transfer dan hanya diambilkan pada pendapatan asli desa itu. Jadi bumdes rangkapan kayak bumdes menyumbang desa segini, jadi ada seperti dana social yang biasanya dicantumkan ke anak yatim, lha itu kan 1 tahun 2 kali. Pada mulai tahun ajaran baru, sekolah it uterus yang kedua itu pada

tanggal 10 muharam berarti hari asyurra itu biasanya, mengumpulkan anak yatim itu sudah berjalan mulai 2009 jadi udah 10 tahun”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.10 WIB)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan dalam meningkatkan PADes di Desa Glagah perangkat desa sudah memberikan solusi yang inovatif, maka dari itu hal ini menjadi awal yang bagus bagi Desa Glagah menjadi desa yang mandiri dalam melakukan pengelolaan untuk meningkatkan PADes.

c. Kategori Inovasi dalam melakukan Pembangunan Desa

1. Inovasi Terusan (*Sustaining innovation*)

Suatu pembagunan memiliki kelanjutan dalam prosesnya, ini terkait dengan inovasi terusan dimana program nantinya akan diselesaikan atautkah berhenti, program yang dimaksudkan terkait dari pembangunan infrastruktur dan program dalam memperoleh penghasilan asli desa. Di Desa Glagah dalam melakukan program tersebut juga terdapat program yang dilanjutkan ataupun diberhentikan. Akan tetapi di Desa Glagah semua program tetap dilanjutkan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Glagah yaitu :

”Program ini tidak lain untuk pembangunan infrastruktur yang masih belum selesai tentunya dilanjutkan pada kepemimpinan tahun periode yang akan datang itu berkelanjutannya seperti itu. Yang kedua untuk peningkatan pendapatan asli desa ini tentunya juga berkisinambungan ini juga dilakukan pada kepemimpinan berikutnya. Seperti Bumdes itu pada tahun 2015 mulai berdirinya, 2016 saya habis selesai masa jabatan saya, lha kemudian 2016 terpilih kembali, lha maka kami juga melanjutkan program kemarin yang masih tertunda dan masih bisa dijalankan. Jadi programnya tetap berkelanjutan”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.15 WIB)

Jika melihat dari apa yang disampaikan oleh Kepala Desa, maka inovasi terusan akan terus berlanjut. Karena hal tersebut merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan dengan skala berbagai tahapan yang harus diselesaikan. Akan tetapi yang menjadi suatu persoalan ialah ketika program pada periode Kepala Desa sebelumnya tidak sesuai dengan periode selanjutnya, yang mana ini membutuhkan suatu pertimbangan yang matang dan penyesuaian kondisi. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Glagah seperti berikut :

”Betul, jadi kita melaksanakan program itu sesuai dengan kondisi atau disesuaikan dengan kebutuhan jadi kalau kita melaksanakan kenapa bumdes ini harus ditindak lanjuti sampai sekarang? Tujuannya ada bumdes itu tidak lain ini kebutuhannya desa ini agar hasil dari unit usaha bisa berkumpul dalam satu pintu butuh kita itu, biar tidak terjajar di masing-masing unit usaha maka dikumpulkanlah dalam satu unit wadah yang namanya bumdes, lha ini harus dilanjutkan terus untuk pelaksanaannya. Adapun yang kurang sesuai yang lainnya mungkin bisa dipertimbangkan diganti dengan program yang lain, kan seperti itu”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.20 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas dengan adanya program berkelanjutan, maka rangkaian dari inovasi terusan di Desa Glagah terlaksana secara lisan. Adapun beberapa program berkelanjutan yang ditawarkan oleh perangkat desa, yang mana program-program ini sangat dibutuhkan oleh Desa Glagah. Seperti yang di jelaskan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah :

”ya, tentunya dari penataan sarana irigasi, karena setiap tahun perlu adanya sarana irigasi tiap tahun untuk pertanian, lha ini dilaksanakan dengan apa setiap tahun berkelanjutan karena bagaimanapun saluran ini setiap tahunnya itu mesti terjadi pendangkalan itu secara tidak langsung kalau terjadi pendangkalan kan mengganggu proses aliran air menuju ke sawah tambak, lha program kelanjutannya yakni kita laksanakan dengan pembangunan tembok penahan tanah itu, agar tidak terjadi ini longsoran tanah sedimentasinya akan semakin besar

pendangkalannya". (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.25 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas inovasi terusan di Desa Glagah terorganisir dengan baik, dalam hal ini bisa dilihat bahwa perangkat Desa Glagah peka terhadap isu jangka panjang, dimana hal itu haruslah diatasi dengan tanggap. Oleh karena itu, dalam rangkaian program pembangunan yang berjalan di Desa Glagah telah membuat suatu inovasi terusan atau terencana dalam memberikan kebutuhan pembangunan di Desa Glagah.

2. Inovasi Terputus (*Discontinues Innovation*)

Proses dalam pembangunan yang berlangsung tidak serta merta mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, ada kalanya pembangunan tersebut berjalan lancar atau diberhentikan. Apalagi melibatkan suatu inovasi dalam pembangunan yang akan dilakukan dengan perencanaan yang matang. Tidak terkecuali pembangunan di Desa Glagah, dimana dalam proses pengimplementasian suatu inovasi tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Dan Inovasi terputus ini juga mungkin ada di Desa Glagah, selama melakukan pembangunan terhadap desa yang diberhentikan. Hal ini dijelaskan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah :

"Jadi semuanya berkelanjutan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat, jadi dihentikan untuk sementara nanti agar sementara belum ada jadi berjalan terus, sesuai yang diinginkan". (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.30 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas inovasi terputus di Desa Glagah selama ini belum ada. Artinya semua inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Glagah

berjalan dengan baik tanpa hambatan, mungkin ada penundaan yang dilakukan untuk menstabilkan neraca keuangan dan nantinya pembangunan tersebut dilanjutkan kembali

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dari *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Internal

Dalam melihat arah dari pembangunan desa, faktor pendukung sangatlah mempengaruhi proses mencapai tujuan dari pembangunan. Seperti halnya pembangunan yang berlangsung di Desa Glagah yang mana faktor dari dalam sangat mempengaruhi hasil dari tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, menurut penuturan dari Kepala Desa Glagah bahwa faktor pendukung internal berpengaruh dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Berikut penuturan dari Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah :

”Faktor pendukungnya itu hanya satu jadi semangat kebersamaan ini, hanya itu kalau potensi diambil dari segi material apa kita barang impor, dari semangat kebersamaan dan tenaga manusianya yang memang masih cukup. Semangat kebersamaan dari masyarakat untuk membangun desa itu tinggi ditunjang lagi dengan dari jajaran perangkat desanya yang sudah melaksanakan tugas pokok fungsi sesuai dengan yang sudah di apa tugas fungsi masing-masing udah sesuai itu. Jadi factor internalnya, tugas fungsi perangkatnya jalan kemudian semangat kebersamaan masyarakat desa ini tinggi jadi 2 itu yang internal”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.35 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas memang benar dalam melakukan suatu pembangunan segala elemen sangat berpengaruh didalamnya. Akan tetapi tidak serta merta mengandalkan semangat kebersamaan dari berbagai elemen, dana *financial* juga berperan penting untuk merealisasikannya. Seperti yang dikatakan

oleh Pak Khairul Hadi selaku masyarakat Desa Glagah yang melihat proses pembangunan di Desa Glagah secara langsung dan merasakan perubahan perubahan tersebut menuturkan faktor internal :

“Jadi gini mas, yang jelas yang pertama ini ada dana, dana mencukupi trus yang kedua masyarakat. Sebelum adanya pembangunan fisik di masing-masing wilayah dusun, dari perdusun ini sosialisasi ini ada pembangunan proyek A misalkan.jadi sebelum ke proyek A pembangunan ka sudah ada yang namanya musyawarah dusun. Sudah ada kesetujuan dari warga masyarakat melalui musyawarah dusun tadi”.

Berdasarkan pemaparan diatas proses pembangunan memiliki berbagai macam aspek untuk dapat merealisasikannya, terutama dorongan faktor internal yang mana akan memperkuat pondasi dari inovasi untuk suatu pembangunan yang dilakukan di Desa Glagah. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk menguatkan faktor internal dalam medukung berjalannya pembangunan.

2. Faktor Eksternal

Faktor pendukung tidak hanya berasal dari dalam atau faktor internal, akan tetapi faktor eksternal juga mempengaruhi proses berjalannya suatu pembangunan. Faktor eksternal yang berada dalam pembangunan di Desa Glagah tidak terlepas dari peranan instansi daerah yang mengawasi pembangunan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Glagah :

”Yang eksternalnya, yaitu tidak lepas dari ini pembinaan dari apa pihak kecamatan dan kabupaten dalam rangka untuk suksesnya pembangunan di desa itu faktor pendukungnya”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.40 WIB)

Dalam hal ini faktor eksternal sangat mempengaruhi untuk mengawasi jalannya pembangunan yang dilakukan. Tidak hanya berasal dari instansi, tapi faktor eksternal juga mengarah pada potensi lokal yang mana mengangkat Desa Glagah dalam segi nama. Di Desa sendiri potensi lokal berasal dari pertanian tambak yang juga dapat memberikan pengaruh bagi kemajuan Desa Glagah. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala Desa Glagah, sebagai berikut :

”Yang jelas begini untuk glagah ini memang sudah terkenal untuk gabah, gabah itu kuatitasnya paling baik diantara, gabah gabah yang lain padinya itu, makanya banyak pedagang yang dari Jawa Tengah, dari Pati, dari Kudus, itu kalau udah waktunya panen di glagah itu buru-buru banyak ke glagah untuk membeli gabah gabah di glagah. Karena apa, karena disinyalir lebih bagus diantara yang lain jadi hasil perkuintalan gabah beratnya mencapai 80-90 kg, jadi kulitnya yg tipis tapi isinya yg besar. Tapi kalau ikan, ikan ini yang udang ini andalannya yang memang hasilnya juga melimpah, ini justru kita jualnya ke daerah Lamongan dan Gresik”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.45 WIB)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami, bahwa faktor pendukung eksternal juga berpengaruh dalam meningkatkan kebutuhan di Desa Glagah. Dan

segala sesuatu yang berlangsung dalam proses pembangunan yang mana pembangunan tersebut tidak hanya pembangunan yang bersifat fisik, akan tetapi pembangunan yang menyeluruh dari berbagai sektor. Perlunya faktor pendukung eksternal untuk dikuatkan lagi untuk menambah kualitas dari pembangunan yang dilakukan di Desa Glagah.

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Internal

Dalam hal melakukan pembangunan, pasti ada suatu hambatan yang mengganggu proses dari pembangunan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum, kalau dalam pembangunan tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Termasuk faktor hambatan internal di Desa Glagah. Hal ini juga diungkapkan oleh Pak Kohar selaku Kepala Desa Glagah, yang menjelaskan bahwa:

”Satu diantaranya kurang sadarnya masyarakat untuk ini apa, swadaya jadi oh sini udah ada dana pemerintah dibangun, jadi yasudah jadi kurang kesadaran untuk membantu dalam hal swadaya, swadaya masyarakatnya masih kurang gitu aja”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.50 WIB)

Berdasarkan pemaparan diatas dalam pernyataan kepala desa tersebut faktor penghambat internal ialah sesuatu yang wajar di setiap desa bahkan tingkatan yang lebih tinggi terkait kesadaran masyarakat akan membantu mewujudkan rangkaian program dari perangkat desa. Dengan adanya hal ini tugas perangkat desa ialah selalu memberikan pengarahan terkait kesadaran dalam membantu membangun desa.

2. Faktor Eksternal

Hambatan yang terjadi tidak hanya pada faktor internal, tapi juga faktor eksternal. Faktor ini sangatlah mempengaruhi kinerja dari pembangunan yang dilakukan oleh jajaran perangkat desa. Hambatan faktor eksternal di Desa Glagah juga ada. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Glagah :

”Yaitu dari bantuan yang dari atas belum bisa memenuhi kebutuhan, artinya masih belum cukup untuk memenuhi target kebutuhan pembangunan di desa, jadi pada akhirnya ada yang terhambat jadi mestinya bisa bangun ini tapi dananya mungkin kurang PAD nya juga masih belum besar akhirnya terhambat pembangunan tidak bisa dilaksanakan, ditunda di hari berikutnya. Jadi biasanya factor eksternalnya sementara semacam begini, glagah ini ada desanya luas penduduknya besar dana desanya ini sekarang 714 juta sedangkan desa yang lainnya seperti kentong, tanggung prigel kan kecil kecil itu, itu sudah kisaran 1,2 miliar”. Padahal desa glagah sendiri kan termasuk pusat dari administrasi kecamatan glagah, kayak ibukota dari kecamatan glagah. “Tapi dananya kecil, ya saya ndak tau apa mungkin yang sudah kategori maju itu, ketika kategori maju sehingga desa glagah ini tidak butuh banyak biaya, ya saya dank tahu juga, ya memang pada dasarnya sudah terpenuhi semua tapi bagaimana ya masih banyak kurangnya. Jadi factor dari eksternalnya bantuan untuk desa glagah yang dirasa masih belum bisa memenuhi kebutuhan”. (Wawancara di Kantor Desa Glagah tanggal 13 Mei pukul 13.55 WIB)

Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Kepala Desa, hambatan yang paling mendasar ialah ketersediaan sumber dana yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam mengatasi kekosongan di kas desa, yaitu dengan cara mengelola Bumdes dengan baik sebagai alternative untuk mendapat dana segar. Sehingga perputaran keungan desa akan berjalan lancar dan dapat memenuhi kebutuhan desa tersebut. Dengan begitu program-program yang dijalankan akan terus berjalan tidak jalan ditempat karena alasan financial. Ini akan memberikan dampak positif bagi siklus dari pembangunan desa yang produktif.

C. Analisis Data Penelitian

1. *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan

a. Tipologi Inovasi dalam Pembangunan Desa

Peningkatan kualitas dalam pembangunan desa menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara terarah, terencana dan berkisinambungan dalam rangka memberikan kualitas pelayanan dan pembangunan yang mumpuni untuk kemajuan desa. Sasaran dari peningkatan kualitas pembangunan ialah inovasi, yang mana inovasi memberikan suatu pembaharuan terhadap pembangunan yang sedang berlangsung ataupun yang akan dilangsungkan. Dengan adanya inovasi di dalam pembangunan, memudahkan langkah dari proses pembangunan untuk mencapai tujuan. Pembangunan tidak hanya bersifat fisik adapun pembangunan non fisik.

Berdasarkan hasil dari penelitian pada Kepala Desa Glagah Desa harapannya ialah Desa Glagah menjadi desa yang maju dengan terus berinovasi dalam menjalankan program kerja. Hal ini karena adanya suatu inovasi dalam pembangunan tersebut, suatu pembangunan tidak terkesan monoton dan juga inovasi menghadirkan sebuah peranan penting dalam pengelolaan tata kelola pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, dalam pembangunan di Desa Glagah perlu adanya suatu Tipologi Inovasi. Dalam Konsep baru tentang pembangunan adanya sebuah inovasi memang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, terutama dalam upaya pembangunan di desa yang sangat membutuhkan sebuah terobosan untuk berkembang. Menurut

Muluk (2008:45) menyatakan bahwa tipologi dari inovasi sektor publik adalah sebagai berikut :

1. Inovasi produk
2. Inovasi proses
3. Inovasi dalam metode pelayanan
4. Inovasi kebijakan.
5. Inovasi sistem pemerintahan

1. Inovasi Produk atau Layanan

Inovasi produk atau layanan berasal dari suatu pembaruan dengan meningkatkan kualitas yang berkelanjutan, dan mengacu pada suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh pemerintah desa dengan membuat suatu kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Dengan adanya hal ini membuat jajaran perangkat desa berinovasi dalam menawarkan suatu produk atau layanan. Di Desa Glagah Produk atau layanan yang ditawarkan melalui program Bumdes, dimana Bumdes sendiri suatu inovasi dalam tata kelola layanan yang diterapkan di Desa Glagah. Bumdes di Desa Glagah menawarkan beberapa unit usaha antara lain penyewaan hentracktor, penyewaan kios pertokoan, pamsimas (bantuan air bersih) dan lain sebagainya, yang mana suatu produk usaha tersebut dikelola oleh Bumdes sendiri.

Berdasarkan hasil dari penelitian Bumdes sudah diwajibkan di setiap desa di Kabupaten Lamongan. Peraturan tentang Bumdes ini juga sudah ditetapkan dalam PERBUP Nomor 21 (Peraturan Bupati) Nomor 21 tentang Pendirian, Kepengurusan, dan Pengelolaan serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Dan

dalam implementasinya di akhir tahun 2017, 462 desa dan 12 kelurahan yang ada di Kabupaten Lamongan itu sudah membentuk badan usaha milik desa. Bumdes juga mendapat pegawasan dari kecamatan dan kabupaten, selebihnya itu bumdes pengelolaannya digerakan oleh desa. Dengan adanya produk atau layanan dari setiap desa akan ditawarkan pada masyarakat, kembali lagi oleh bagaimana desa tersebut mengelolanya dengan cara menggali potensi desa dan dikembangkan serta di wadahi dalam bumdes. Badan usaha milik desa memiliki 4 kategori yaitu, kategori perintis, berkembang dan maju. Dengan adanya fasilitas Bumdes tersebut diharapkan produk atau layanan yang ditawarkan dapat membantu masyarakat desa dalam mendapatkan jasa dan juga dapat membantu perangkat desa untuk memperoleh sumber dana tambahan. Keberadaan Bumdes di Desa Glagah mulai dirintisnya tahun 2015 dan berkembang sangat cepat. Karena Bumdes di Desa Glagah dikategorikan sebagai Bumdes kategori maju dengan lebih dari 4 unit usaha. Oleh karena itu, jajaran perangkat Desa Glagah dalam menawarkan suatu produk atau layanan sudah berjalan dengan sangat produktif mengingat perkembangan dari Bumdes di Desa Glagah.

Selain memiliki suatu produk atau layanan Desa Glagah tidak pasif dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Desa Glagah. Pemerintah Desa Glagah dalam sosialisasinya melalui rapat dusun, perkumpulan paguyuban yang ada di desa dan sebagainya, yang mana hal tersebut dilakukan diberbagai macam kesempatan dengan terkordinir, terutama dalam menawarkan suatu program atau produk layanan dari Desa Glagah. Sebagai contoh yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta jajarannya untuk sosialisasi warga Desa Glagah melalui sebuah program bernama

pamsimas, dimana terdapat di Desa Glagah tepatnya di Dusun Glagah Masjid, dan ini cara sosialisasinya cukup inovatif. Karena mengundang warga dusun yang berada dalam lingkup program tersebut yang juga didampingi oleh 2 lembaga yaitu BPD dan LPM. Jadi sosialisasi yang dilakukan sangat merangkul semua pihak dan tidak asal memberi pengumuman, karena sudah terkoordinir melalui 2 lembaga tersebut kemudian disampaikan ke masyarakat. Inovasi produk atau layanan dalam hal ini sangat berperan dalam mengukur sejauh mana Pemerintah Desa Glagah memiliki sesuatu hal untuk ditawarkan dan disosialisasikan kepada masyarakat desa. Hal tersebut merujuk pada teori Muluk (2008:45) menyebutkan bahwa Inovasi produk atau layanan berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi.

2. Inovasi Proses

Inovasi proses memiliki hal-hal yang harus diterapkan dalam pembangunan, seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Glagah yang mana disana terdapat proses pengembangan untuk desa. Proses inovasi dalam mengembangkan desa yang dilakukan oleh perangkat desa beserta jajarannya ialah membuat kawasan wisata di dusun senden, perangkat desa juga fokus kesana untuk memberikan pembaharuan dengan menanami kawasan dari berbagai jenis buah. Dan disana rencananya akan dibuatkan tembok penahanan tanah di tepian sungai. Dusun Senden dilirik sebagai kawasan wisata penuh dengan pertimbangan, karena keunggulan Dusun Senden yaitu dekat dengan sungai tidak jauh dari jalan besar terus suasana udaranya masih segar dan pemandangannya bagus, untuk kedepan ini

rencananya akan jadi tempat wisata ramah lingkungan yang akan menjadi rekreasi masyarakat Desa Glagah ketika ingin bersantai.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Glagah jajaran perangkat desa dalam berinovasi mengembangkan desa berfokus kesana. Tidak hanya perangkat desa saja yang fokus dalam pengembangan, partisipasi masyarakat juga diperlukan. Dengan kata lain perangkat desa dan masyarakat bersama-sama untuk memulai mengembangkan kawasan wisata di Desa Glagah. Meskipun diketahui di Desa ini sering dilanda kekeringan kalau musim kemarau atau kelebihan air kalau musim penghujan, namun hal ini sudah tidak menjadi persoalan. Karena setelah bgs (bendungan gerak sembayat) sudah jadi, ini dimungkinkan tidak ada air asin lagi untuk jangka waktu panjang. Hal ini masih belum bisa dirasakan, karena sudetan belum selesai. Sudetan yang berada di daerah kalitengah yang rencananya juga diberikan sudetan langsung. Dengan begitu rencananya air sungai yang ada di bgs ditahan tidak sampai keluar, sehingga air asinnya tidak bisa masuk, dan air tawarnya yang langsung dari bengawan solo itu melalui sudetan di kalitengah itu untuk masuk ke kali blawi. Hal ini kan dimungkinkan air dari aliran sungai di Desa Glagah tetep ada, yang menjadikan aliran sungai stabil, proses dari inovasi tersebut sifatnya jangka panjang. Hal ini merujuk pada teori Suwarno (2008:91-97) menjelaskan proses inovasi konsumen atau warga negara mulai dipengaruhi sikap dan perilakunya agar positif atau sejalan dengan misi dari produk tersebut. Pada tahapan ini berbentuk pola pikir dari konsumen atau warga negara yang akan menentukan perilaku konsumen atau warga negara yang akan menentukan perilaku konsumen selanjutnya untuk memutuskan sikapnya untuk menerima atau menolak. Tahapan

persuasi merupakan tahapan kritis yang menentukan jenis keputusan yang akan diambil oleh calon adopter.

Inovasi proses yang dilakukan oleh Desa Glagah tersebut tak lepas dari peran perangkat desa, kinerja dari perangkat Desa Glagah termasuk aktif dalam berinovasi untuk pembangunan Desa Glagah. Karena kerja dari struktur perangkat desa tanggap dalam menimplementasi suatu program yang dicanangkan. Implementasi yang dimaksudkan ialah dari beberapa hal terkait dengan hasil musyawarah desa sebelum melakukan penerapan program pembangunan tersebut. Tidak hanya itu jajaran perangkat desa juga mengajak serta tokoh masyarakat untuk bersama-sama mensukseskan program yang sesuai rencana dan sudah diprogramkan oleh desa. Dengan begitu akan lebih mudah bagi Desa dan masyarakat untuk bersama-sama merealisasikan program. Berangkat dari menata dusun, yang permasalahan di dusun tersebut diatasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan harapan masyarakat yang berada di dusun tersebut. Dengan langkah selanjutnya yang akan diangkat secara luas di tingkat desa. Contoh kasusnya seperti ini, hasil proses inovasi yang ada di Desa Glagah ialah pengolahan sampah, itu berawal dari salah satu dusun yang berjalan dan dari desa akhirnya mensupport sampah yang dikelola oleh anak-anak dengan cara memberikan kendaraan roda tiga dan itu merupakan inventaris desa, tapi penggunaannya oleh dusun. Lambat laun perdusun sudah memiliki sarana dan prasarana pengolahan sampah ini, sudah terdapat 4 dusun yang sudah berjalan. Jadi itu bentuk ada program yang disambut oleh masyarakat kemudian kita support dengan kendaraan akhirnya bisa berjalan (memberi fasilitas) jadi mengimplementasi dari program itu. Hal ini merujuk pada

teori Muluk (2008:45) Inovasi proses berasal dari gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi.

3. Inovasi Kebijakan

Inovasi kebijakan adalah suatu inovasi mengenai regulasi dari program pemerintah yang akan diterapkan. Inovasi kebijakan menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam suatu pembangunan, karenanya bisa mempengaruhi kondisi pembangunan. Dalam inovasi kebijakan terdapat aturan tata kelola untuk mencapai suatu regulasi dalam tahapan proses yang dilakukan untuk merealisasikan pembangunan. Seperti halnya yang terjadi di Desa Glagah dalam berinovasi untuk pembangunan, salah satu yang dilakukan ialah membuat suatu regulasi kebijakan. Dengan begitu akan mudah menggolongkan pembangunan yang akan didahulukan atau pembangunan yang akan dilakukan sesuai kebutuhan dari masyarakat desa tersebut. Di Desa Glagah sendiri inovasi kebijakan tidak hanya berasal dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, tetapi juga menerapkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Inisiasi program terkait inovasi kebijakan dari Kabupaten Lamongan untuk Desa Glagah ialah dengan memasukkan Desa Glagah didalam program kampung KB, kemudian Desa Glagah juga masuk di Desaku Pintar. Program-program dari kabupaten tersebut memang keperuntukannya untuk desa, akan tetapi selama ini masih belum kelihatan jelas dari hasil program kabupaten yang dicanangkan di desa. Jadi selama berjalannya program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ialah hanya memfasilitasi

kebutuhan dari masyarakat desa melalui program kampung kb ataupun program desaku pintar dan sebagainya belum ada suatu pendampingan yang jelas.

Inovasi kebijakan juga dapat dikembangkan dengan menilik potensi lokal yang dimiliki, dari potensi lokal tersebut dapat membuat suatu kebijakan yang mana akan mengembangkan sektor pertanian tambak, sebagaimana diketahui potensi Desa Glagah ini dengan luas lahan desa 201 hektar itu terdiri atas lahan sawah tambak dan 70 persen itu mata pencharian sebagai petani tambak, dari potensi itu tentunya jajaran perangkat Desa Glagah dalam membuat suatu inovasi kebijakan sangatlah terbuka dalam menciptakan peluang yang memberi dampak positif bagi masyarakat ataupun bagi Desa Glagah. Dalam masalah ekonomi ini, pemanfaatan masyarakat dalam mengelola potensi lokal di Desa Glagah terbilang bisa mencukupi kebutuhan sendiri melalui budidaya ikan dan satu kali tanam padi, namun hal itu belum cukup untuk kemajuan di Desa Glagah karena tidak adanya pembaharuan terhadap pengelolaan potensi lokal tersebut, dengan kata lain pengelolaannya masih konservatif. Pemerintahan Desa Glagah harusnya ketika melihat suatu peluang ini bisa memanfaatkan dengan baik dengan cara dikelola secara swakelola atau melakukan pengolahan terhadap bahan mentah tersebut dan diproduksi secara matang, agar menghasilkan nilai jual yang lebih. Mungkin kedepan akan menjadi suatu yang menarik dijadikan pembahasan di musyawarah desa dalam membuat program ataupun menetapkan kebijakan tentang pengelolaan potensi lokal ini. Inovasi-inovasi yang dimaksudkan diatas ialah dengan adanya pemerintah desa membuat suatu kelompok usaha bersama yang menangani pengolahan hasil sawah/tambak, karena di Desa Glagah belum ada kelompok usaha

bersama yang untuk menangani itu. Tapi dengan seiring perkembangan jaman kemungkinan akan dibuat, karena pada akhirnya nanti pemerintah Desa Glagah akan bentuk kelompok usaha bersama dan juga akan support modal berikut alat.

Akan lebih mudah jika inovasi kebijakan terkait dengan pemberdayaan potensi local dijadikan sebagai skala prioritas. Namun hal ini belum bisa terwujud karena rendahnya SDM yang dimiliki oleh desa, maka untuk skala prioritas pemberdayaan ini berupa pelatihan lifeskill. Pelatihan ini diperuntukkan pada masyarakat yang tujuan dari pemerintah desa ialah agar nanti bisa berusaha sendiri membuat *home industry*. Adapun kegiatan yang sudah berjalan tapi masih belum ada perhatian khusus yaitu pelatihan pengolahan ikan menjadi berbagai makanan. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk menggali potensi itu tadi dan meningkatkan produksi dari potensi desa tadi agar memiliki nilai jual yang lebih baik. Tidak hanya pelatihan pada sector meningkatkan produksi dari potensi desa, ada juga pelatihan pengolahan sampah, karena sampah sekarang hanya dibuang ketempat sampah, tidak dikelola dengan baik. Pemerintah Desa Glagah mencoba memberikan pelatihan terhadap kesadaran akan sampah dan pengelolaan sampah organik agar menjadi produktif, dengan cara melakukan pengolahan sampah organik bfs (*black fly soldier*).

Dalam pembangunan penyediaan sarana dan prasarana terhadap meningkatkan potensi local, pemerintah desa sudah membuat kebijakan akan pembangunan infrastruktur di area jalan tambak atau jalan produksi. Hal tersebut menjadi skala prioritas untuk pembangunan di Desa Glagah. Karena dalam pembangunan fisik, di Desa Glagah gencar-gencarnya dalam melakukan

pembangunan untuk membuat sarana dan prasarana di Desa Glagah lebih layak. Di Desa Glagah pembangunan infrastruktur terhadap jalan produksi menjadi skala prioritas. Hal ini bisa dilihat dengan adanya jalan rabat ke lahan budidaya, dan membangun jalur produksi untuk akses yang lebih baik untuk memudahkan petani ketika panen mendapatkan akses jalan menuju tambak dengan lancar dan hasil panen bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Agar harga jual tetap stabil tidak mengalami penurunan kualitas hasil panen, hal ini dikarenakan ketika panen udang harus cepat sampai ke tujuan kalo tidak bisa menurunkan kualitas dari udang tersebut dan menyebabkan harganya turun.

Sebuah inovasi kebijakan tidak akan terbentuk dan dapat direalisasikan kalau dari rancangan untuk melakukan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Di Desa Glagah proses dari melakukan suatu inovasi kebijakan berawal dari musyawarah tingkat dusun untuk perencanaan programnya, lalu program pembangunan tersebut dimulai dari perencanaan di dusun, dari dusun akan dibawah untuk musyawarah desa, lalu kemudian di musyawarah desa nanti akan muncul skala prioritas pembangunan. Jadi program tersebut disusun dengan berdasar pada skala prioritas dari program-program usulan yang berada di dusun. Dengan begitu akan memudahkan jajaran perangkat desa dalam melaksanakan suatu pembangunan dan juga hal tersebut untuk mengetahui program apa saja yang bisa dilaksanakan untuk membangun Desa Glagah baik bidang pembangunan maupun pemberdayaan. Karena dengan musyawarah bersama akan menunjukkan transparansi dari kegunaan dana yang tersedia untuk dialokasikan pada pembangunan tersebut.

Melalui musyawarah desa juga jajaran perangkat desa menjaga pemerataan pembangunan yang dilakukan di Desa Glagah.

Setelah melihat hal tersebut inovasi kebijakan di Desa Glagah harus melalui proses yang panjang dan tidak serta merta membuat kebijakan untuk memajukan Desa Glagah, akan tetapi inovasi kebijakan digunakan dengan dasar skala prioritas pembangunan yang dicanangkan untuk mewujudkan kebutuhan pembangunan dari masyarakat Desa Glagah. Jadi arah dari pembuatan suatu program atau kebijakan tersebut jelas adanya dalam upaya meningkatkan kualitas yang ada di Desa Glagah secara merata, hal ini dikarenakan agar tidak adanya ketimpangan dalam mewujudkan suatu pembangunan. Inovasi kebijakan yang terjadi di Desa Glagah selaras dengan teori Muluk (2008:45) tentang inovasi kebijakan yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada.

4. Inovasi Metode Pelayanan

Metode pelayanan menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam sebuah pemerintahan, karena dari metode pelayanan bisa mempengaruhi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa. Metode pelayanan ini sebagai tolak ukur dari apa yang sudah dilakukan pemerintah desa. Masyarakat juga menilai keberhasilan dari kinerja pemerintah desa melalui metode pelayanan. Di Desa Glagah metode pelayanan yang diterapkan ialah dengan mengedepankan sosialisasi terhadap masyarakat. Oleh karena itu Inovasi metode pelayanan sangat berpengaruh bagi perangkat Desa Glagah, dimana pemerintah Desa Glagah sudah menerapkan metode pelayanan sosialisasi masyarakat terkait hal yang akan disampaikan oleh

pemerintah desa dan ini berjalan cukup baik terutama di bidang sosial ekonomi dan bidang administrasi pekantoran. Akan tetapi pemerintah Desa Glagah tidak mengalami perkembangan, karena dalam mengontrol informasi melalui informasi digital kurang memadai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap proses pelayanan yang akan dilakukan desa, karena bagaimanapun sesuai dengan era jaman yang sudah maju masih merasa kurang, tidak memanfaatkan dibidang digital. Di kantor Desa Glagah hanya memiliki akses internet saja dan tidak dikembangkan untuk menyampaikan informasi pada masyarakat, sehingga mengakibatkan kurang tanggapnya masyarakat mengetahui pelayanan yang dilakukan pemerintah Desa Glagah.

Pemerintah Desa Glagah memang sudah mempunyai alamat website akan tapi tidak dijalankan dengan baik. Pentingnya akses website juga untuk mengangkut Desa Glagah ke arah yang lebih luas lagi dengan adanya website yang aktif memudahkan masyarakat bahkan orang yang berkepentingan di Desa Glagah mengetahui program kerja beserta pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Glagah. Disamping menghambat proses peningkatan kualitas desa, tidak adanya inovasi terhadap website desa juga membuat penyampaian pelayanan menjadi tidak efektif dan penyampaian pelayanan melakukan cara yang konvensional dimana cara tersebut membutuhkan waktu yang lama tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, inovasi di Desa Glagah tidak sesuai dengan teori Muluk (2008:45) yang mengatakan Inovasi dalam metode pelayanan adalah perubahan baru dalam berinteraksi dengan pelanggan atau cara baru dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan dari teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembaruan mengenai inovasi metode layanan perlu dilakukan, yang semula masih konvensional dikembangkan menjadi lebih modern dan terbuka bagi masyarakat. Jadi, sosialisasi perlu dilakukan tapi tidak dilakukan terus menerus ini dikarenakan akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Untuk itu perlu adanya metode pelayanan online, karena untuk menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien maka perlu dilakukannya sistem online yang akan membawa perubahan berupa terbukanya informasi Desa Glagah bagi kalangan masyarakat luas, terutama bagi masyarakat Desa Glagah sendiri.

Dalam proses pembangunan yang dilakukan di Desa Glagah terkait dengan inovasi metode pelayanan sudah berjalan dengan baik sesuai prioritas. Pelayanan dalam pembangunan mengarah pada pembangunan infrastruktur yang berada di Desa Glagah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan sudah merata, artinya sudah dilakukan dengan baik oleh tim pelaksanaan pembangunan yang ditugaskan untuk meninjau pembangunan yang dilakukan oleh desa, dan dalam pembangunan infrastruktur juga terdapat tim pelaksana di setiap dusun yang dibangun infrastruktur dan hal itu juga membantu mempercepat proses dari pembangunan. Pembangunan infrastruktur di Desa Glagah mulai dari Dusun Glagah Kulon sampai Dusun Podo itu setiap tahun semuanya dibangun secara merata sesuai kebutuhan dusu tersebut. Jadi hal ini menegaskan kalau dewasa ini tidak lagi membangun desa tapi desa membangun. Kalau desa membangun ialah cara bagaimana masyarakat dan perangkat desa bersama sama membangun desa. Dalam hal membangun desa masyarakat desa beserta jajaran perangkat Desa Glagah sudah sesuai dengan defnisi

desa menurut Jamaludin (2017:4) yang mengatakan desa sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu, baik tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya. Dimana mengacu pada masyarakat desa yang berbondong-bondong membangun desa tempat ia tinggal lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan teori yang ada, di Desa Glagah sudah memiliki suatu pedoman terhadap pentingnya bersama-sama membangun desa. Dan dalam membangun desa, proses pembangunan yang dilakukan di Desa Glagah juga mengacu pada prosedur dari pemerintah desa tersebut. Jadi sebelum adanya proses pembangunan desa dari pihak desa, perangkat desa meminta kepada kepala wilayahnya masing-masing atau disebut Kasun (Kepala Dusun) ini mengagendakan yang namanya musdus (musyawarah dusun). Dan didalam musyawarah dusun tersebut bertujuan untuk menggali potensi atau permasalahan kepada warga masyarakat ini apa saja yang mungkin bisa terbangun ataupun membangun dalam waktu dekat. Contohnya ialah dalam jajaran perangkat desa mengundang seluruh warga masyarakat ini perdusun dan dilaksanakan musyawarah dusun dulu, kemudian dari musyawarah dusun itu kalau sudah ada beberapa poin, diangkat ke musyawarah desa. Lalu tahapan berikutnya menentukan prioritas pembangunan yang mana pembangunan tersebut akan didahulukan dalam skala prioritas. Merujuk pada Adisasmita (2013:75) yang menjelaskan salah satu point didalam tiga prinsip pokok pembangunan desa yaitu Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan trilogi pembangunan tersebut yaitu:

a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

- b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
- c) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor dan antar sektor disetiap daerah, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori dapat disimpulkan bahwa dengan hal tersebut prosedur pembangunan di Desa Glagah sudah sesuai dengan apa yang ada pada teori tersebut. Pembangunan tersebut juga mempengaruhi inovasi metode layanan yang ada di Desa Glagah terutama layanan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Glagah yang lebih terarah dan berjalan dengan merata. Kondisi tersebut akan menguntungkan Desa Glagah dalam membangun komponen pelayanan yang diberikan untuk masyarakat.

5. Inovasi Sistem

Inovasi sistem merupakan bentuk pelaksanaan tata kelola yang terdapat di dalam pemerintahan desa. Dengan adanya sistem yang terdapat di pemerintahan desa akan memudahkan bagaimana arah dalam menjalin suatu kerjasama ataupun arah dari visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena dalam melakukan pembangunan membutuhkan sebuah kerja sama yang melibatkan berbagai pihak. Peran pemerintah desa disini ialah bagaimana menjaring kerja sama dengan pihak-pihak tertentu, terutama dengan tujuan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kesepakatan.

Menurut hasil dari penelitian di Desa Glagah selama melakukan pembangunan untuk desa belum melakukan sebuah sistem kerjasama dengan pihak

swasta. Namun dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa Glagah menjalin kerjasama dengan tokoh masyarakat, tujuannya agar memperoleh kelancaran pelaksanaan pembangunan yang dapat diterima oleh masyarakat. Kerjasama yang dilakukan menjaring semua *stakeholder* yang berada di Desa Glagah antara lain ; tokoh agama, tokoh masyarakat, rt/rw itu semua dilibatkan dalam rangka untuk lancarnya program yang ditawarkan. Pemerintah Desa Glagah juga membentuk timwas (tim pengawas), jadi tim pengawas pembangunan berasal dari BPD (badan perwakilan desa), tim pengawas bertugas mengawasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan dengan maksud mengawasi apa sudah sesuai belum pembangunan tersebut dan kinerja dari perangkat desa maupun tim pelaksana sudah diterapkan atau belum. Jika belum sesuai dari pihak bpd berhak untuk bertanya kepada kepala desa sesuai dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan itu. Mana kala ada yang kurang benar dan dijadikan bahan evaluasi. Merujuk pada teori Muluk (2008:45) mengatakan bahwa inovasi sistem mencakup cara baru atau yang diperbaharui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori tersebut inovasi sistem yang ada di Desa Glagah tidak sesuai dengan rujukan teori tersebut. Karena tidak adanya suatu pembaruan terhadap kerja sama sistem. Dan dalam pembangunan di Desa Glagah masih mengandalkan peranan dari jajaran perangkat desa. Inovasi sistem tidak mengalami pembaharuan yang mengakibatkan Desa Glagah tidak dapat berkembang dan masih menggantungkan pada peranan masyarakat desa. Memang hal itu juga bagus dalam pengawasan serta pengelolaannya, akan tetapi untuk

mengalami perkembangan yang pesat Desa Glagah juga membutuhkan peranan swasta dalam menopang kebutuhan dari kegiatan yang dilangsungkan di Desa Glagah. Oleh karena itu, Desa Glagah perlu membuka atau menjalin kerja sama dengan pihak luar dengan catatan sama-sama meraih keuntungan dalam suatu proyek yang dilaksanakan.

b. Inovasi meningkatkan Pendapatan Asli Desa(PADes)

Inovasi meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) pada dasarnya ialah suatu cara agar berjalannya sirkulasi dari pendapatan yang diperoleh desa, inovasi meningkatkan PADes juga sebagai *alternative* dalam mencukupi kebutuhan pemerintah desa. Di Desa Glagah upaya dalam meningkatkan PADes melalui suatu program yang sedang berjalan, pemerintah desa melakukannya yakni dengan peningkatan pengelolaan Bumdesa (badan usaha milik desa) yang bernama Makmur Sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian didalam Bumdes tersebut pemerintah Desa Glagah memiliki 3 jenis usaha yang dalam prosesnya mengalami perkembangan menjadi 4 jenis usaha, yaitu air bersih, sewa hentractor, dan persewaan kios pertokoan. Jenis usaha yang keempat masih dalam tahap proses untuk menentukan jenis usahanya yang membutuhkan pertimbangan, tapi ada kemungkinan jenis usaha tersebut ialah dagang material bahan bangunan. Dari sini pemerintah desa mencoba meningkatkan pengelolaan jenis usaha di Bumdes untuk memperoleh sumber dana dan penghasilan tambahan yang diperoleh dari Bumdes. Program yang dijalankan dalam meningkatkan PADes belum sepenuhnya dapat meraih keuntungan, akan tetapi sudah ada perkembangan dalam mencukupi kebutuhan

perangkat Desa Glagah. Hal tersebut dikarenakan usaha yang dijalankan belum maksimal. Dalam proses berjalannya program tersebut pemerintah Desa Glagah sudah membentuk pengurus per unit usaha yang mana pengelolaannya ada di setiap unit usaha. Dari per unit usaha tersebut hasil bersih setiap bulannya disetorkan ke pengurus Bumdes dan nantinya dari Bumdes tersebut menjadi sumber keuangan penghasilan asli desa. Adapun persentasenya sumbangan pendapatan Bumdes untuk desa sekitar 50-70 persen dari hasil pendapatan disetorkan.

Dengan berjalannya program dalam meningkatkan PADes tersebut sudah merujuk pada tiga komponen menurut Goulet (1971) dalam Nurman (2017) yaitu:

1. Kecukupan (*sunstenance*)

Di Desa Glagah sudah mencukupi kebutuhan yang ada di desa tersebut dengan menawarkan adanya Bumdes. Dengan adanya Bumdes sirkulasi dana yang dimiliki desa menjadi stabil. Karena Desa Glagah memiliki pendapatan asli desa melalui Bumdes.

2. Jati Diri (*self-esteem*)

Pemerintah Desa Glagah sudah memiliki jati diri. Karena Desa Glagah memiliki dorongan untuk maju dengan menawarkan program-program yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

3. Kebebasan (*freedom*)

Pemerintah Desa Glagah dalam melakukan suatu pembangunan belum sepenuhnya selaras dengan aspek kebebasan menurut Goulet. Karena

pemerintah belum bisa melakukan pembangunan secara maksimal yang mana terhalang oleh keterbatasan dana yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori, program terhadap meningkatkan PAD di Desa Glagah sudah menemui titik temu, dimana hal tersebut mengarah pada proses yang dilakukan pemerintah Desa Glagah untuk memperoleh pendapatan asli desa. Adanya Bumdes dapat memenuhi kecukupan dari masyarakat dengan pemerintah desa yang memiliki dorongan untuk maju dalam jati diri yang pemerintah buat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa ataupun pemerintah desa. Dan dalam pengelolaan Bumdes pemerintah Desa Glagah sudah memiliki kebebasan untuk berdiri tegak diatas kaki sendiri dengan caranya sendiri untuk mewujudkan suatu ekosistem desa, dimana didalam ekosistem tersebut pemerintah desa beserta masyarakatnya sama-sama mendapat keuntungan.

c. Kategori Inovasi dalam melakukan Pembangunan Desa

1. Inovasi Terusan (*Sustaining Innovation*)

Inovasi terusan merupakan suatu inovasi yang memiliki tahapan berdasar pada inovasi yang sudah berjalan. Hal tersebut mengacu pada adanya program pembangunan yang sedang berlangsung dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian Inovasi terusan yang ada di Desa Glagah ialah adanya program pembangunan infrastruktur yang masih belum selesai, yang mana pembangunan tersebut akan dilanjutkan pada periode kepemimpinan yang akan datang. Program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Desa Glagah sering dilanjutkan dan dilakukan pembaharuan terhadap pembangunan yang dilakukan, tapi tidak

mengubah maksud awal dari pembangunan dengan kata lain akan mengalami pembaruan konsep yang dilakukan.

Dalam inovasi terusan yang berjalan di Desa Glagah memiliki berbagai pertimbangan sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada. Adapun program tersebut tidak sesuai maka akan dilakukan penundaan sementara dan diganti program lain yang memang diperlukan oleh Desa Glagah. Dalam melakukan suatu inovasi terusan pemerintah desa dituntut untuk memiliki inisiatif dalam melaksanakan pengembangannya. Di Desa Glagah inisiatif terhadap inovasi terusan berupa penataan sarana irigasi, karena setiap tahun perlu adanya sarana irigasi untuk pertanian. Hal ini dilaksanakan dengan setiap tahun berkelanjutan. Karena bagaimanapun saluran ini setiap tahunnya itu mesti terjadi pendangkalan, hal itu secara tidak langsung kalau terjadi pendangkalan akan mengganggu proses aliran air menuju ke sawah tambak dan program kelanjutannya yakni pemerintah desa melaksanakan dengan pembangunan tembok penahan tanah, agar tidak terjadi longsor tanah.

Berdasarkan hasil penelitian Inovasi terusan di dalam pembangunan Desa Glagah sesuai dengan teori inovasi terusan. Hal ini Merujuk pada konsep yang terdapat didalam kategori inovasi. Menurut pendapat Christensen dan Laergreid dalam Muluk (2008:47-48) menyatakan bahwa inovasi terusan merupakan proses inovasi yang membawa perubahan baru namun tetap mendasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang sedang berjalan dan produk yang sudah ada.

2. Inovasi Terputus (*Discontinues Innovation*)

Inovasi terputus memiliki hal-hal yang menjadi penghambat dalam melakukan proses pembangunan. Dalam proses pengimplementasiannya tahapan pembangunan sering diberhentikan dengan berbagai macam alasan. Banyak juga faktor yang mempengaruhi suatu inovasi yang terputus. Di Desa Glagah Inovasi yang terputus tidak ada karena semua program berkelanjutan sesuai yang diinginkan. Merujuk pada pendapat Christensen dan Laergreid dalam Muluk (2008:47-48) menyatakan inovasi terputus merupakan proses inovasi yang membawa perubahan yang baru dan sama sekali tidak mendasar pada kondisi yang sudah ada sebelumnya. Kategori inovasi jenis kedua ini membawa pelayanan atau produk berbeda, pengguna layanan yang berbeda serta sumber daya yang berbeda pula. Tentu dalam hal inovasi yang kedua ini kadarnya jauh lebih tinggi daripada kategori yang pertama.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori, inovasi terputus di Desa Glagah tidak sesuai dengan teori tersebut. Karena inovasi terputus di Desa Glagah belum ada, dan inovasi terputus di Desa Glagah belum mengarah pada perubahan kondisi ketika inovasi tersebut tidak berjalan. Dalam hal ini inovasi terputus di Desa Glagah belum mencapai tahapan yang lebih lanjut dan masih melanjutkan inovasi yang tertunda.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan

Desa di Desa Glagah

a. Faktor Pendukung

1. Internal

Didalam suatu pembangunan pasti ada faktor pendukung yang mempengaruhi lancar tidaknya suatu pembangunan. Adapun faktor internal yang berpengaruh dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung di Desa Glagah itu ialah semangat kebersamaan dari perangkat desa dan masyarakat desa. Dan dari semangat kebersamaan masyarakat untuk membangun desa itu tinggi, ditunjang lagi dari jajaran perangkat desanya yang sudah melaksanakan tugas pokok fungsi sesuai dengan yang sudah diberikan. Jajaran perangkat desa sudah melaksanakan tugas fungsi masing-masing sesuai dengan arahan dan dalam prosesnya sebelum adanya pembangunan di masing-masing wilayah dusun, dari satu dusun ke dusun diadakan sosialisasi terkait adanya pembangunan.

Jadi perangkat desa sudah melakukan penyuluhan mengenai pembangunan melalui musyawarah dusun dan sudah ada persetujuan dari warga masyarakat melalui musyawarah dusun tadi. Dengan adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dan masyarakat menjadikan suatu landasan dari faktor pendukung pembangunan tersebut. Selain semangat kebersamaan faktor pendukung dari dalam yang berpengaruh begitu jelas ialah ketersediaan dana. Karena tanpa adanya dana, inovasi pembangunan akan berjalan lambat. Faktor pendukung internal di Desa Glagah merujuk pada teori menurut Arni (1995:25) salah satunya ialah sumber daya

manusia yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia di wilayah perdesaan merupakan subjek atau pelaku utama yang menggerakkan roda perekonomian dan perubahan dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, faktor pendukung internal yang berasal dari kualitas masyarakatnya sangat mempengaruhi kemajuan di Desa Glagah dan dalam kualitas masyarakat yang mempunyai akan menghasilkan roda perekonomian dengan baik. Jika roda perekonomian berjalan stabil maka pembangunan di Desa Glagah akan mengalami perkembangan yang pesat. Oleh karena itu, faktor pendukung dari dalam merupakan sebuah komponen yang penting secara mendasar dalam melakukan pembangunan perubahan dalam jangka panjang.

2. Eksternal

Dalam faktor pendukung selain adanya faktor pendukung internal terdapat pula faktor pendukung eksternal. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan, dukungan yang diterima tidak hanya dari dukungan dari dalam, akan tetapi dukungan dari luar juga berpengaruh agar terciptanya visi dan misi dari pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pembinaan yang diberikan oleh pihak kecamatan maupun pihak kabupaten dalam rangka meningkatkan kinerja dari pemerintah desa. Tidak hanya pada kelembagaan, faktor eksternal juga diperoleh dari potensi lokal. Karena potensi lokal ini berpengaruh dalam menguatkan identitas dari desa dan potensi lokal ini juga berpengaruh dalam mengontrol Desa Glagah dari segi nama ataupun pembangunan yang direncanakan untuk Desa Glagah.

Berdasarkan hasil penelitian potensi lokal Glagah ialah pertanian tambak dan untuk pertanian tambak di Desa Glagah memang sudah terkenal dari segi kualitasnya, baik bidang pertanian padi atau pertambakan ikan. Akan tetapi perangkat Desa Glagah belum bisa memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki, oleh karenanya konsep pembangunan terhadap faktor pendukung eksternal ini hanya sebagai penguat kelembagaan saja. Hal ini tak sesuai dengan konsep pembangunan menurut Siagian (dalam Harjanto 2011:5) menyatakan konsep pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori konsep pembangunan di Desa Glagah terkait dengan faktor pendukung eksternal yaitu pertanian tambak masih belum mencapai titik produktivitas dari pembangunan. Karena pembangunan dalam sektor ini masih menggunakan cara konvensional yang mana tidak terorganisir dengan baik. Dalam sektor pertanian tidak mengalami perkembangan dan dibiarkan begitu saja tanpa ada progress untuk menata konsep dari pembangunan pertanian tambak di Desa Glagah. Pemerintah Desa Glagah hanya melakukan perbaikan terhadap sarana infrastruktur saja, itupun masih belum merata. Jadi pembangunan sektor pertanian tambak perlu diperhatikan, karena sektor ini merupakan faktor pendukung yang mana harus dimaksimalkan dengan baik dan pengelolaannya mengarah pada efektivitas dan efisien. Seperti apa kata Siagian bahwa itu juga ditujukan kearah yang modernitas untuk pembinaan bangsa.

b. Faktor Penghambat

1. Internal

Dalam melakukan suatu pembangunan pasti ada faktor penghambat yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pembangunan tersebut. Terlebih faktor penghambat dari dalam (internal). Desa Glagah sama halnya dengan desa-desa lain terkait adanya hambatan dalam proses pembangunan. Di Desa Glagah sendiri berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa hambatan pemerintah dalam melakukan suatu pembangunan yang berasal dari faktor internal ialah satu diantaranya kurang sadarnya masyarakat dalam hal swadaya, kesadaran tersebut bersifat kurang sadarnya masyarakat desa untuk membantu dalam hal swadaya. Dengan kata lain swadaya masyarakatnya masih kurang. Merujuk pada definisi pembangunan menurut Bryant dan White (dalam, Harjanto 2011:5) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dan memiliki lima implikasi, salah satunya ialah pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*).

Berdasarkan hasil penelitian dan teori, dengan begitu pemerintah Desa Glagah belum sepenuhnya dapat mengembangkan pembangunan. Karena proses pembangunan tingkat kesadaran masyarakat belum begitu tanggap dan terkesan pasif dalam menerima program dari pemerintah Desa Glagah. Dalam hal ini hambatan dari pemerintah Desa Glagah sesuai dengan teori tersebut, karena belum bisa mewujudkan kesadaran masyarakat yang masih pasif dan tugas dari pemerintah Desa Glagah saat ini ialah harus melakukan suatu pembaruan dalam menyampaikan informasi. Hal ini untuk merangkul masyarakat desa agar lebih tanggap dalam

menerima program pembangunan. Kalau tidak segera diperbarui akan berakibat pada pembangunan yang tidak berkembang pesat atau perkembangannya melambat.

2. Faktor Eksternal

Dalam proses pembangunan faktor penghambat tidak hanya berasal dari faktor internal, tapi ada juga berasal dari eksternal yang mana faktor tersebut juga berpengaruh dalam pengimplementasian program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Di Desa Glagah faktor penghambat eksternal berasal dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang mana masih dirasa belum bisa memenuhi kebutuhan dari pemerintah desa. Dengan masih kurangnya bantuan sumber dana memberi dampak terhadap belum tercukupya pembangunan dalam memenuhi target kebutuhan pembangunan di desa. Jadi pada akhirnya ada pembangunan yang terhambat dimana pembangunan tersebut mestinya bisa di bangun dengan cepat atau bisa dibangun sesuatu. Tapi dananya mungkin kurang, sehingga dilakukan penundaan. Dan untuk PAD nya juga masih belum besar dan akhirnya menghambat pembangunan yang akan dilaksanakan. Faktor eksternal yang berasal dari sumber dana tersebut sementara masih dibawah angka yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Glagah dengan luas dan padat penduduknya diberikan dana sebesar 714 juta sedangkan desa yang lainnya yang mana diketahui lebih kecil luasnya dan tingkat kepadatan yang rendah diberikan dana kisaran 1,2 miliar seperti Desa Kentong, tanggung prigel. Padahal Desa Glagah sendiri termasuk pusat dari administrasi Kecamatan Glagah, seperti ibukota

dari Kecamatan Glagah. Jadi dalam melakukan pembangunan Desa Glagah tidak bisa melaksanakan program-program dengan leluasa dan penuh pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan, karena bantuan untuk Desa Glagah yang dirasa masih belum bisa memenuhi kebutuhan. Untuk itu saat ini di Desa Glagah dalam melakukan pembangunan merujuk pada model pembangunan yang diterapkan di Desa Glagah, yaitu Model pembangunan III (Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia) menurut David C (dalam Jamaludin 2017:228) yang menyatakan model pembangunan ini meliputi prakarsa dan pengambilan keputusan yang diserahkan kepada masyarakat; meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber-sumber yang ada; memanfaatkan kondisi local secara optimal dan maksimal; menekankan pembelajaran social antara birokrasi dan lembaga swasta.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori pembangunan di Desa sesuai dengan model pembangunan III. Karena di Desa Glagah sendiri sedang dalam tahap perkembangan dari segala aspek dan hal tersebut membantu Desa Glagah untuk tidak menggantungkan sumber dana dari bantuan yang ada. Sehingga pembangunan yang dilakukan di Desa Glagah mendasari pemerataan pembangunan dan aktualisasi sosial serta pengembangan potensi lokal. Dengan begitu akan memudahkan Desa Glagah dalam melakukan pembangunan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa studi di Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan

a. Tipologi Inovasi Pembangunan Desa

Quo Vadis inovasi pembangunan di Desa Glagah yang merujuk dari konsep tipologi inovasi belum mencapai sasaran dalam meningkatkan kualitas pembangunan di Desa Glagah, dimana inovasi yang dilakukan untuk memberikan suatu pembaharuan terhadap pembangunan Desa Glagah masih penuh pertimbangan. Meskipun di dalam pelaksanaannya masih belum benar-benar sesuai, pemerintah Desa Glagah setidaknya sudah menjalankan beberapa konsep inovasi meski inovasi tersebut belum berfokus untuk meningkatkan pembangunan pada potensi lokal yang dimiliki.

1) Inovasi Produk atau layanan

Perangkat Desa Glagah berinovasi dalam menawarkan suatu produk atau layanan berupa program Bumdes, dimana Bumdes sendiri merupakan suatu inovasi dalam tata kelola layanan yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas desa menjadi lebih mandiri. Dengan adanya Bumdes maka produk atau layanan melalui

usaha yang dimiliki desa akan ditawarkan pada masyarakat. Oleh karena itu, jajaran perangkat Desa Glagah dalam menawarkan suatu produk atau layanan sudah berjalan dengan sangat produktif mengingat perkembangan dari Bumdes di Desa Glagah. Akan tetapi inovasi produk atau layanan belum mengarah pada pengembangan potensi lokal.

2) Inovasi Proses

Inovasi proses di Desa Glagah belum mengarah pada inovasi proses yang mengembangkan area lahan pertanian tambak. Di Desa Glagah inovasi proses berlangsung dengan rencana pemerintah Desa Glagah membangun kawasan wisata. Dan juga inovasi proses yang sudah berlangsung di Desa Glagah ialah pengolahan sampah. Hal ini dikarenakan inovasi proses yang ada di Desa Glagah berasal dari sebuah gerakan pembaruan kualitas yang berkelanjutan dan di Desa Glagah inovasi proses belum mengarah pada keberlanjutan pembangunan untuk potensi lokal.

3) Inovasi Kebijakan

Quo Vadis dari pembuatan suatu program atau kebijakan tersebut jelas adanya dalam upaya meningkatkan kualitas yang ada di Desa Glagah secara merata. Hal ini dikarenakan agar tidak adanya ketimpangan dalam mewujudkan suatu pembangunan. Inovasi kebijakan yang terjadi di Desa Glagah mampu dalam menjalankan Inovasi kebijakan menurut pendapat Muluk (2008:45) tentang inovasi kebijakan yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada. Akan tetapi, inovasi kebijakan di Desa Glagah belum adanya kepastian arah untuk pengembangan terkait dengan pengelolaan potensi lokal.

4) Inovasi Metode Pelayanan

Pembaruan mengenai inovasi metode layanan di Desa Glagah perlu dilakukan, karena metode pelayanan yang semula masih konvensional harus dikembangkan menjadi lebih modern dan terbuka bagi masyarakat. Jadi, sosialisasi perlu dilakukan tapi tidak dilakukan terus menerus ini dikarenakan akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Untuk itu perlu adanya metode pelayanan online, karena untuk menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien maka perlu dilakukannya sistem online yang akan membawa perubahan berupa terbukanya informasi Desa Glagah bagi kalangan masyarakat luas, terutama bagi masyarakat Desa Glagah sendiri.

5) Inovasi Sistem

Inovasi sistem yang ada di Desa Glagah belum mampu dalam mengembangkan sistem kerjasama terhadap pihak lain. Karena tidak adanya suatu pembaruan terhadap kerjasama yang dilakukan untuk pembangunan. Dan pembangunan di Desa Glagah masih mengandalkan peranan dari jajaran perangkat desa. Inovasi sistem tidak mengalami pembaharuan yang mengakibatkan Desa Glagah tidak dapat berkembang dan masih menggantungkan pada peranan masyarakat desa. Memang hal itu juga bagus dalam pengawasan serta pengelolaannya, akan tetapi untuk mengalami perkembangan yang pesat Desa Glagah juga membutuhkan peranan swasta dalam menopang kebutuhan dari kegiatan yang dilangsungkan di Desa Glagah.

b. Inovasi Meningkatkan Pendapatan Asli Des (PADes)

Di Desa Glagah upaya dalam meningkatkan PADes melalui suatu program yang sedang berjalan, pemerintah desa melakukannya yakni dengan peningkatan pengelolaan Bumdesa (badan usaha milik desa) yang bernama Makmur Sejahtera. Berdasarkan hasil penelitian didalam Bumdes tersebut pemerintah Desa Glagah memiliki 3 jenis usaha yang dalam prosesnya mengalami perkembangan menjadi 4 jenis usaha, yaitu air bersih, sewa hentractor, persewaan kios pertokoan, dan usaha dagang material bahan bangunan. Dari sini pemerintah desa mencoba meningkatkan pengelolaan jenis usaha di Bumdes untuk memperoleh sumber dana dan penghasilan tambahan yang diperoleh dari Bumdes.

Jadi *Quo Vadis* inovasi meningkatkan PADes di Desa Glagah sudah menemui titik temu, dimana hal tersebut mengarah pada proses yang dilakukan pemerintah Desa Glagah untuk memperoleh pendapatan asli desa. Adanya Bumdes dapat memenuhi kecukupan dari masyarakat dengan pemerintah desa yang memiliki dorongan untuk maju dalam jati diri yang pemerintah buat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa ataupun pemerintah desa.

c. Kategori Inovasi dalam melakukan Pembangunan

1. Inovasi Terusan (*Sustaining Innovation*)

Quo vadis inovasi terusan di Desa Glagah memiliki berbagai pertimbangan sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada. Adapun program tersebut tidak sesuai maka akan dilakukan penundaan sementara dan diganti program lain yang memang diperlukan oleh Desa Glagah.

2. Inovasi Terputus (*Discontinues Innovation*)

Quo vadis inovasi terputus di Desa Glagah belum mencapai tahapan yang lebih lanjut dan masih melanjutkan inovasi yang tertunda.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah

a. Faktor Pendukung

Quo Vadis inovasi pembangunan desa di Desa Glagah didukung oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal :

Faktor pendukung internal di Desa Glagah ialah semangat kebersamaan dari perangkat desa dan masyarakat desa. Hal ini juga karena pemerintah desa sudah melaksanakan tugas fungsi masing-masing sesuai dengan arahan dan dalam prosesnya sebelum adanya pembangunan di masing-masing wilayah dusun, dari satu dusun ke dusun diadakan sosialisasi terkait adanya pembangunan. Oleh karena itu, faktor pendukung internal merupakan sebuah komponen yang penting secara mendasar dalam melakukan pembangunan perubahan dalam jangka panjang.

Faktor pendukung eksternal ialah pembinaan yang diberikan oleh pihak kecamatan maupun pihak kabupaten dalam rangka meningkatkan kinerja dari pemerintah desa. Tidak hanya pada kelembagaan, faktor eksternal juga diperoleh dari potensi lokal. Karena potensi lokal ini berpengaruh dalam menguatkan identitas dari desa dan potensi lokal ini juga berpengaruh dalam mengontrol Desa Glagah dari segi nama ataupun pembangunan yang direncanakan untuk Desa Glagah.

b. Faktor Penghambat

Terdapat dua faktor hambatan yang terjadi dalam *quo vadis* inovasi pembangunan yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor penghambat internal Desa Glagah ialah hambatan untuk pemerintah dalam melakukan suatu pembangunan satu diantaranya kurang sadarnya masyarakat dalam hal swadaya, kesadaran tersebut bersifat kurang sadarnya masyarakat desa untuk membantu dalam hal swadaya. Jadi dalam melakukan *quo vadis* inovasi pembangunan, pemerintah Desa Glagah belum sepenuhnya dapat mengembangkan pembangunan. Karena dalam proses pembangunan tingkat kesadaran masyarakat belum begitu tanggap dan terkesan pasif dalam menerima program dari pemerintah Desa Glagah.

Faktor penghambat eksternal di Desa Glagah berasal dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang mana masih dirasa belum bisa memenuhi kebutuhan dari pemerintah desa. Dengan masih kurangnya bantuan sumber dana memberi dampak terhadap belum tercukupya pembangunan dalam memenuhi target kebutuhan pembangunan di desa.

Jadi pada akhirnya *quo vadis* inovasi pembangunan merasa terhambat, dimana pembangunan tersebut mestinya bisa di bangun dengan cepat atau bisa dibangun sesuatu. Tapi dananya mungkin kurang, sehingga dilakukan penundaan. Dan untuk PADes nya juga masih belum besar dan akhirnya menghambat pembangunan yang akan dilaksanakan.

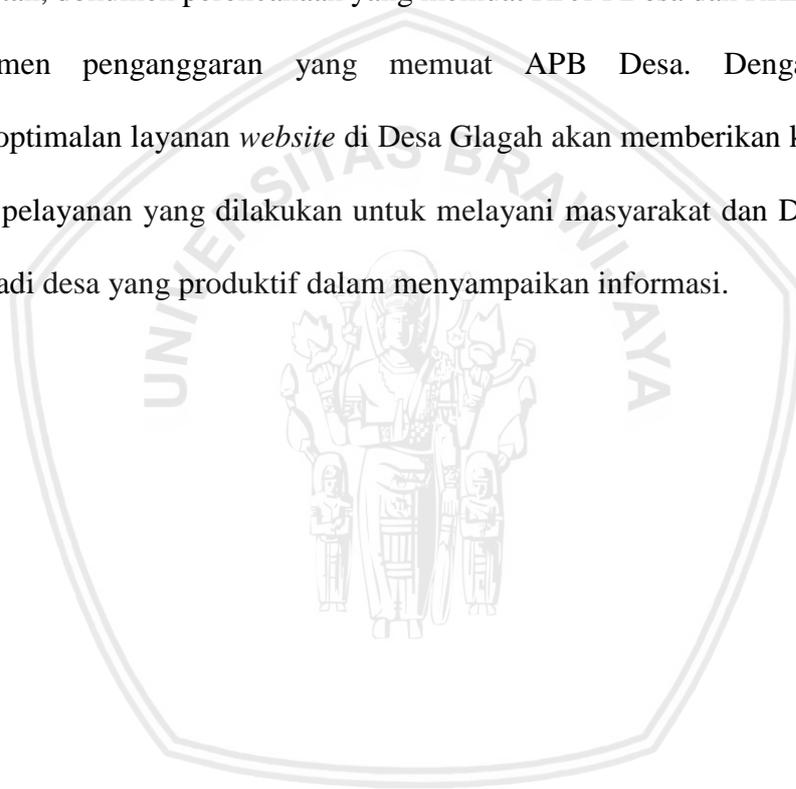
B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran terhadap *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Glagah sebaiknya membuat sebuah program yang berfokus pada pengelolaan potensi lokal. Dengan cara mengadakan kegiatan pemberdayaan beserta pembinaan yang benar-benar dapat memberikan bekal kepada masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Contoh seperti program pemberdayaan pada petani tambak yang menjadikan hasil panen menjadi berkualitas beserta pedistribusianya dan program usaha kelola desa yang membentuk rumah industri. Hal ini akan mendapatkan keuntungan bagi desa ataupun masyarakat. Karena dengan adanya potensi lokal yang dikelola secara terkoordinir, dan ketika masyarakat merasakan dampak yang nyata, dengan sendirinya akan mendorong pemikiran masyarakat bahwa mereka membutuhkan kegiatan tersebut sehingga pelan-pelan mendorong munculnya kesadaran masyarakat untuk memberikan usulan-usulan kegiatan di bidang pemberdayaan, karena mereka merasa memang membutuhkannya. Disamping itu akan memajukan roda perekonomian di Desa Glagah.
2. Sebaiknya dalam melakukan pembangunan infrastruktur perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan bagi desa, tidak hanya skala prioritas bagi dusun. Akan tetapi bagi Desa Glagah dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kelangsungan potensi lokal desa agar menjadi lebih berkembang. Dengan cara tiap dusun melakukan kolaborasi, bersama-sama

dalam memberikan usulan untuk pembangunan yang semakin tepat dan berkualitas bagi peningkatan pembangunan infrastruktur desa.

3. Pemerintah Desa Glagah seharusnya dapat lebih mengoptimalkan penggunaan *website* desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan dilakukannya *updating data* setiap tahunnya. Informasi yang dimuat berupa kegiatan, dokumen perencanaan yang memuat RPJM Desa dan RKP Desa serta dokumen penganggaran yang memuat APB Desa. Dengan adanya pengoptimalan layanan *website* di Desa Glagah akan memberikan keterbukaan pada pelayanan yang dilakukan untuk melayani masyarakat dan Desa Glagah menjadi desa yang produktif dalam menyampaikan informasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arni, Muhammad. 1995. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hardjanto, Imam. 2011. *Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2017. *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia
- Margono S. 2005. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. 2008. *Knowledge Management : Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Ndraha, Talizdhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Irwan. 2013. *Desain Inovasi Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press
- Nucholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Depok: PT RajaGrafindo.

- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pratiwi, Nur Annisa. 2015. “*Quo vadis Hubungan Internasional*”, diakses pada 17 Januari 2017 dari [Ahttps://www.academia.edu/16472748/Quo_Vadis_Ilmu_Hubungan_Internasional](https://www.academia.edu/16472748/Quo_Vadis_Ilmu_Hubungan_Internasional)
- Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administratif Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Siagian, Sondang P. 2012. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- Susanto, A.B dan Masri Sareb Putra, R. 2010. *60 Management Gems*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Tjahya Supriatna. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung: Humaiora Utama Press.
- Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Desa*
- Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang *Pemerintahan Desa*
- Peraturan Bupati No.21 tahun 2017 tentang *Bumdes*
- Wasistiono, Sadu, dan Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia

Veithzal Rivai. 2004. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Raja
Grafindo

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa*



Lampiran 1 OBSERVASI LAPANGAN

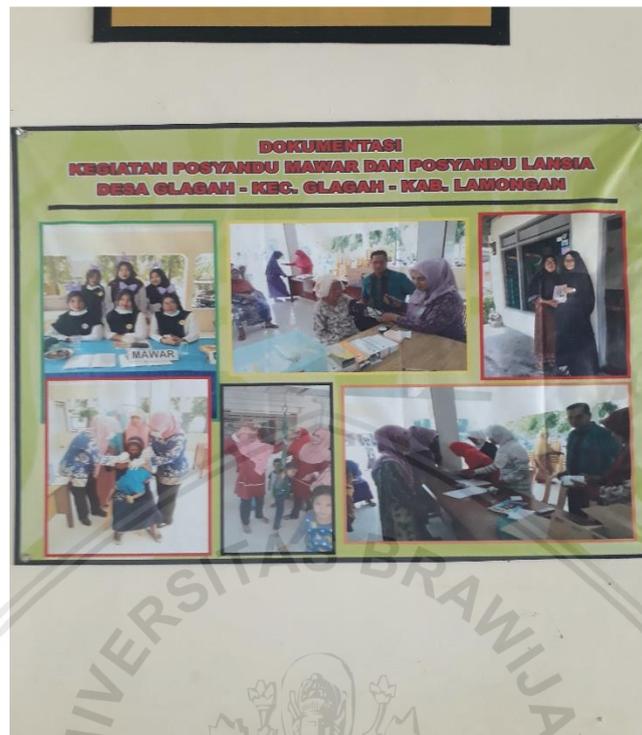


Gambar 8 Kantor Desa Glagah, Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 9 Realisasi Kerja Desa Glagah
 Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 10 Kegiatan Posyandu

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 11 Wawancara dengan Kepala Desa Glagah

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 12 Wawancara dengan Pak Said selaku Ketua bidang lembaga ekonomi masyarakat desa Dinas Pemberdayaan dan Desa

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 13 Wawancara dengan Pak Khairul selaku masyarakat Desa Glagah

Sumber : Data Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 14 Petani Tambak memanen hasil tambak

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 15 Kegiatan Posyandu Desa Glagah

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



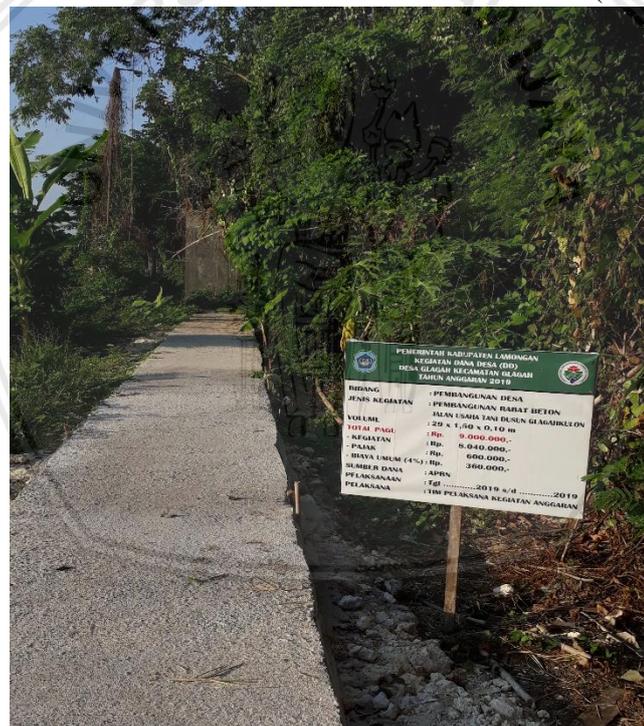
Gambar 16 Membangun jalan dari program Desa Glagah

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 17 Kios Pertokoan Desa Glagah

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 18 Jalan Rabat Beton

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



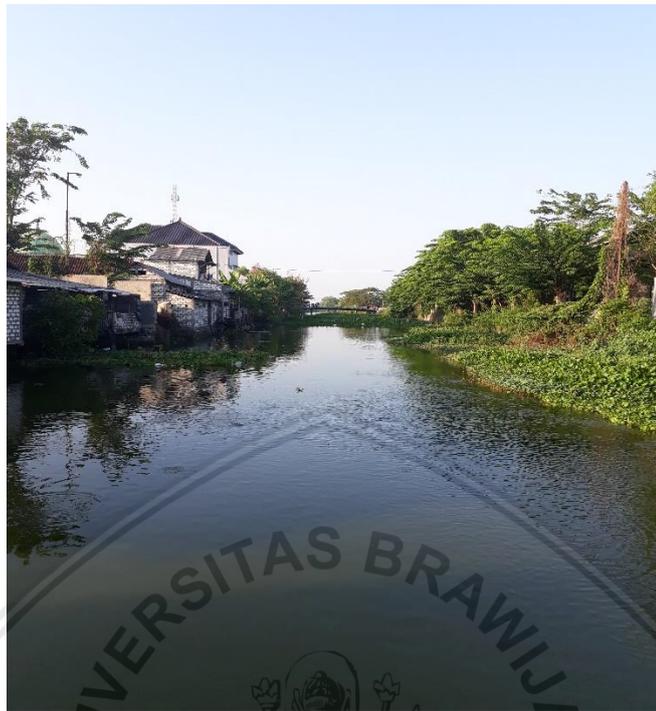
Gambar 19 Kantor Bumdes Glagah

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 20 Program Kampung KB

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 21 Anak Sungai Bengawan Solo

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 22 Akses jalan menuju salah satu area persawahan

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 23 Tempat pengolahan sampah di Desa Glagah

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Gambar 24 Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Glagah

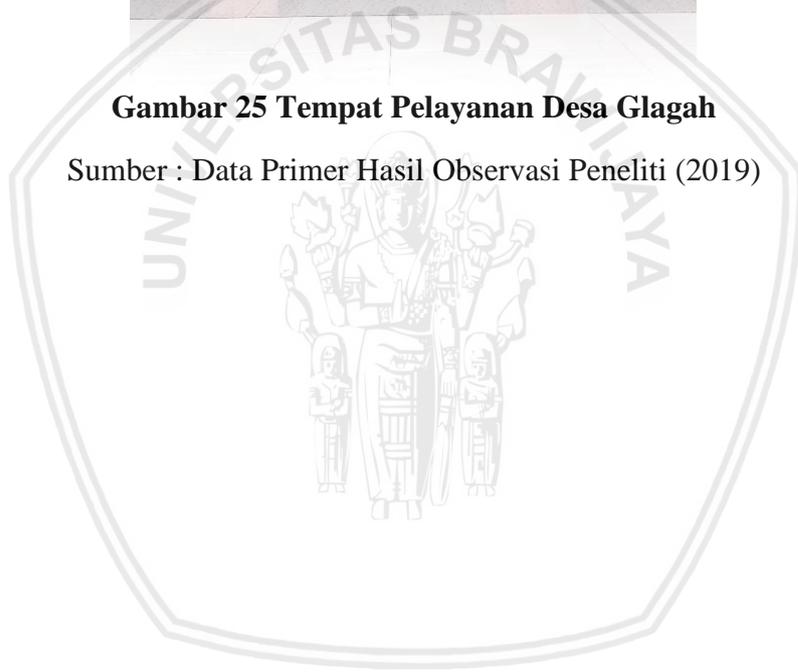
Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)





Gambar 25 Tempat Pelayanan Desa Glagah

Sumber : Data Primer Hasil Observasi Peneliti (2019)



Lampiran 2 Surat Riset Penelitian



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
 Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 3120/UN10.F03.11/PN/2019
 Lampiran : -
 Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Desa Glagah
 Jl. Raya Glagah, Glagah, Lamongan

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset dan pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Bahrul Alam
 Alamat : Perum Griya Shanta G317, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang
 NIM : 155030100111021
 Jurusan : Administrasi Publik
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Judul : *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Glagah)
 Lokasi : Kantor Desa Glagah
 Waktu : 20 Maret 2019 s/d 22 Mei 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 14 Maret 2019

a.n Dekan
 Ketua Jurusan Administrasi Publik



Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
 NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 3175/UN10.F03.11/PN/2019
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Jl. Jaksa Agung Suprpto, Berigin, Tumenggungan, Kec. Lamongan, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya memohon dengan hormat
bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan melakukan riset dan pengambilan
data bagi mahasiswa:

Nama : Bahrul Alam
Alamat : Perum Griya Shanta G317, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang
NIM : 155030100111021
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa (Studi di Desa Glagah)
Lokasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Lamongan
Waktu : 18 Maret 2019 s/d 15 April 2019

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 14 Maret 2019

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D.
NIP 19670217 199103 1 010

Formulir di buat rangkap 4 untuk :

1. Instansi
2. Mahasiswa
3. Jurusan
4. Arsip TU





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
 website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 25 Maret 2019

Nomor : 070/212/413.207/2019
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian.**

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa Kab. Lamongan

Di-

LAMONGAN

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 14 Maret 2019, Nomor : 3175/UN10.F03.11/PN/2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **BAHRUL ALAM** dengan Judul kegiatan "*Quo Vadis Inovasi Pembangunan Desa*", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMONGAN
 Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,

TEMBUSAN :
 Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan);
 2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah
 Kab. Lamongan
 3. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang

RP. AGOES HARI WIDODO, SH
 Pembina
 NIP. 19610820198212 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/212/413.207/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 3175/UN10.F03.11/PN/2019 Perihal Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

- | | |
|------------------------|--|
| a. Nama | : BHRUL ALAM |
| b. NIK/NIM | : 3522153008970005 |
| c. Alamat | : Jl. MH Thamrin Gg. Mawar 07 RT 011/RW 002 Kauman Kec. Bojonegoro |
| d. Pekerjaan/Jabatan | : Mahasiswa |
| e. Instansi/Organisasi | : Universitas Brawijaya Malang |
| f. Kebangsaan | : Indonesia |

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a. Judul Proposal/Kegiatan | : Quo Vadis Inovasi Pembangunan Desa |
| b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan | : Penyusunan Skripsi |
| c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan | : Pembangunan Desa |
| d. Penanggungjawab | : BHRUL ALAM |
| e. Anggota/Peserta | : - |
| f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan | : 27 Maret s/d 27 April 2019 |
| g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kab. Lamongan |

Dengan ketentuan

- a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
 - b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
 - c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, selambat-lambatnya 6 (enam) Bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 25 Maret 2019

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan

TEMBUSAN :

1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

RP. AGOES HARI WIDODO, SH

Pemina
NIP. 19610820198212 1 001



Lampiran 3 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Quo Vadis* Inovasi dalam Pembangunan Desa di Desa Glagah Kabupaten Lamongan ?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembangunan di Desa di Desa Glagah Kabupaten?

Fokus Penelitian

1. **Bagaimana *Quo Vadis* Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah?**
 - A. Tipologi inovasi dalam melakukan pembangunan desa
 - a. Inovasi Produk Layanan
 - Bagaimana cara membuat produk layanan dari program pembangunan di desa untuk di tawarkan kepada masyarakat desa?
 - Bagaimana Sosialisasi yang dilakukan desa dalam memberi tahu program kepada masyarakat?
 - b. Inovasi Proses
 - Bagaimana proses inovasi yang dilakukan di desa tersebut ?
 - Bagaimana cara kerja struktur dalam proses pengimplementasian program?

c. Inovasi Kebijakan

- Bagaimana proses dalam menginisiasi program mendasar pada kebijakan yang ada di Kabupaten Lamongan?
- Bagaimana proses dalam penyusunan kebijakan terhadap pembangunan desa?

d. Inovasi Metode Pelayanan

- Bagaimana pelayanan di Desa Glagah? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- Bagaimana proses pelayanan dari perangkat Desa yang diberikan kepada masyarakat?

B. Inovasi meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) desa tersebut.

- Apa saja program dalam meningkatkan PADes Desa Glagah?
- Apakah program yang dibuat mampu meningkatkan PADes di Desa Glagah?

C. Kategori Inovasi

a. *Sustaining innovation* (inovasi terusan)

- Apakah ada program yang dilakukan desa secara berkelanjutan?
- Apakah ada *improvement* pada program yang dilakukan dalam pembangunan berkelanjutan?

b. *Discontinues innovation* (inovasi terputus)

- Apakah dalam proses pegimplementasiannya ada tahapan yang diberhentikan?

2. Faktor Pendukung dan Penghambat *Quo vadis* Inovasi Pembangunan Desa di Desa Glagah

a) Faktor Pendukung

Apa saja faktor pendukung internal maupun eksternal yang mendukung pembangunan di Desa Glagah?

b) Faktor Penghambat

Seperti apa faktor penghambat internal maupun eksternal yang menghambat pembangunan di Desa Glagah?

